



UNIVERSITAS GADJAH MADA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UP3M  
Unit Publikasi, Penelitian,  
dan Pengabdian Kepada Masyarakat

# SINOPSIS RESEARCH DAYS



2022

COMMITTED TO SCIENCE  
FOR BETTER SOCIETY

## KATA PENGANTAR

*Research days* merupakan agenda tahunan FISIPOL UGM yang sangat strategis. Forum ini memfasilitasi para dosen dan peneliti di internal fakultas, serta lintas fakultas dan universitas untuk mempresentasikan hasil-hasil riset terbaru di berbagai topik. Riset-riset yang dihasilkan oleh para dosen dan peneliti beragam, baik yang bersifat teoretik maupun praktis untuk kebijakan maupun advokasi sosial.

Untuk tahun ini, topik-topik yang dipresentasikan di berbagai forum yang akan berlangsung selama 5 hari terutama berkaitan dengan *flagship megashift* FISIPOL yang mencakup: perubahan iklim dan transisi energi, transformasi digital, dan respons pasca pandemi khususnya aspek-aspek inklusi sosial. Satu topik lainnya yang sedang menjadi perhatian kita bersama terkait dengan dinamika sosial anak muda dan persoalan kesehatan mental. Selain topik-topik yang mendapatkan dukungan hibah Fakultas, *research days* juga menampilkan berbagai hasil riset yang dilakukan oleh para dosen dan peneliti lainnya di FISIPOL UGM. Dalam pelaksanaannya, riset-riset di atas melibatkan berbagai pihak, yang bukan semata sebagai narasumber maupun subyek penelitian, namun juga menjadi bagian aktif dari agenda yang sedang dikembangkan, khususnya untuk riset *triple-helix, penta-helix*, dan pengabdian masyarakat.

Atas nama Fakultas, saya mengucapkan terimakasih kepada Wakil Dekan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerjasama, dan Alumni, dan tim UP3M yang telah bekerja sangat keras untuk mengawal pelaksanaan hibah riset Fakultas dan penyelenggaraan *research days*, termasuk tersusunnya sinopsis ini. Diseminasi hasil riset, baik dalam bentuk publikasi maupun forum akademik semacam ini menjadi momentum penting untuk mengkomunikasikan kepada publik luas berbagai agenda dan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh segenap dosen dan peneliti di FISIPOL UGM. Hal ini akan menunjukkan kontribusi Fakultas secara konsisten terhadap ilmu pengetahuan dan terus berupaya untuk menjadi *center of reference*, serta sebagai bentuk kontribusi civitas akademika dalam transformasi sosial, politik, dan pemerintahan yang berpihak pada nilai-nilai inklusifitas dan pengembangan demokrasi.

Yogyakarta, 14 November 2022

Dekan,

Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P., M.P.A

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>Hibah Penelitian dan Publikasi Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik</b>	
Socio Entrepreneurship and Community Based Tourism Development .....	2
Negara dan Wabah: Memandang Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia melalui Lensa Governmentality dan Partnership (Kemitraan) .....	4
<b>Hibah Penelitian dan Publikasi Departemen Politik dan Pemerintahan.....</b>	6
Diskursus Program Kemitraan dan Dilema Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Hutan: Analisis Jaringan Wacana ( <i>Discourse Network Analysis</i> ) di Register 45 Mesuji .....	7
<i>Woman Regional Heads and Gender-Responsive Policies in Tabanan Regency, Bali, Indonesia</i> ...	9
Politik seni dan isu-isu kritis untuk pendidikan toleransi dan pluralisme di Sekolah Menengah Atas Studi Kasus Program CREATE - Creative Youth for Tolerance di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan .....	11
<b>Hibah Penelitian dan Publikasi Departemen Ilmu Komunikasi</b>	
Pejabat Publik Dan Wacana Ujaran Kebencian Bernuansa “Sara” Di Media Sosial .....	14
Organizational Engagement pada Program Kota Cerdas Studi Kasus Integrasi Smart City ke Dalam Jogja Smart Province (JSP) .....	15
Inovasi Model Bisnis Media Nasional: Studi Kasus Konsep Ekonomi Kolaboratif Pikiran Rakyat <i>Media Network</i> (PRMN) .....	16
Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi di Indonesia .....	18
Kajian Literatur Game Industri Gim Independen Tiongkok, Jepang dan Kanada.....	20
Dari Multiverse dan Multinarasional Menuju Komodifikasi Ekstrem: Analisis Naratif Film-film Spider-man Marvel Cinematic Universe dan Sony’s Spider-man Universe dalam Perspektif Ekonomi Politik Komunikasi .....	22
Jurnalisme di <i>Global South</i> : Tantangan dan Transformasi Digital .....	24
“Kekebasan” Dalam Komunikasi Digital.....	26
Mengeksplorasi Paradoks Privasi Gen-Z dalam Personalisasi Iklan di Media Digital.....	27
Redefinisi Keintiman Di Balik Kisah Extradyadic Kaum Urban Indonesia .....	28
Komunikasi, Gender, dan Inklusi Sosial: Teori, Kajian, Metode Riset .....	30
Diri yang Bermain Peran: <i>Idol-roleplaying</i> dan Identitas Diri Penggemar K-Pop dalam Twitter .....	32

Politik Kebijakan Media di Indonesia Pasca-Reformasi (1998-2022) .....	33
Komunikasi Autopoiesis .....	35
Sinopsis Menilik Komik dalam Kacamata Masyarakat Simulasi Baudrillard: Analisis Semiotika “Shingeki no Kyōjin” .....	37
Informasi Kesehatan di Media Digital (Studi pada Konten Media Digital tentang Stunting di Indonesia).....	39
Media dalam Seni Kontemporer .....	41
<i>The Opportunity and Challenge of Higher Education for Creating Talent Management Ecosystem of Research and Innovation in Indonesia .....</i>	42
<i>Youth and Privacy: Giving Meaning and Negotiating Privacy in Social Commerce.....</i>	43
<b>Hibah Penelitian dan Publikasi Departemen Ilmu Hubungan Internasional</b>	
I-SAY: Illuminate Sustainability Axis in Yogyakarta .....	46
Transnasionalisme dan Olahraga dalam Politik Global .....	48
<i>Rethinking of Local Election in the Unitary State: A Study of Indonesia's Politics.....</i>	50
<i>The Indonesia Investment Authority: a developing country's approach of a sovereign investment?.....</i>	51
Bahan Bacaan Mata Kuliah MRHI Lanjutan: Metode Perbandingan dalam Studi Hubungan Internasional .....	52
Etnografi dalam Studi Hubungan Internasional: Membenamkan Diri dalam Politik Sehari-hari .....	53
<b>Hibah Penelitian dan Publikasi Departemen Sosiologi</b>	
Globalisasi dan Emansipasi Politik: Penelitian tentang Dialektika Demokrasi dalam Pergerakan Politik Nasional di Indonesia .....	55
<i>The Human-Spirits Relationship in the Syncretism of Theravada Buddhism: A Study of Danghyang in Indonesia, Neak Ta in Cambodia and Nat in Myanmar .....</i>	57
<i>Representasi Komoditas Fashion dalam Pameran Designer of Dreams Representation of Fashion Commodity in Desainer of Dreams Exhibition.....</i>	58
<i>Network Analysis of Knowledge Sharing on Data Sovereignty in Indonesia.....</i>	59
<i>Elite-Power or the Power of Elite Populist Moment in Comtemporary Indonesian Democracy ..</i> 60	60
<i>The Dynamic Meaning of Subculture among DIY Indonesian Musicians.....</i>	61
Tiga Bentuk Kekerasan yang dihadapi Siswa Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19.....	62
Strategi Meningkatkan Employability Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia .....	63
Rekognisi dan Kompleksitas Ulayat di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, Papua Barat ....	65
<b>Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b>	

Knowledge Sharing Pariwisata Halal Untuk Pemberdayaan Kampung-Kampung Wisata di Kota Yogyakarta.....	68
--	----

#### **Hibah Penelitian Mahasiswa S-1**

Inovasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam Penanganan Anak Yatim/Piatu Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Blora Jawa Tengah .....	71
Pemberian Ulasan Pascapembelian Produk Makanan dan Minuman (Studi Kasus Praktik Customer Brand Advocacy pada Akun Finstagram) .....	73
Strategi Resiliensi Pengemudi Ojek Difabel Selama Pandemi COVID-19.....	75
Perubahan Implementasi Program Bina Keluarga Lansia Khusnul Khotimah Dusun Munggur Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Di Masa Pandemi Covid-19 ..	77
Pembingkaian Berita Bencana di Media Online (Analisis <i>Framing</i> Pemberitaan Bencana Banjir NTT di Kompas.com dan Pos-Kupang.com) .....	79
Keterlibatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Wilayah Rawan Banjir Pesisir (Studi tentang Implementasi Program Mas Dana [Masyarakat Sadar Bencana] oleh PT Pertamina Integrated Terminal Semarang di Kelurahan Kemijen) .....	81
Strategi dan Peran HopeHelps dalam Advokasi Kekerasan Seksual di Ranah Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah .....	83
Asosiasi Usia Melahirkan Ibu dan Kemampuan Kognitif Anak pada Usia 8-9 Tahun .....	84
Fandom dan Partisipasi Politik: Studi Kasus Fandom ARMY Indonesia dalam Aksi Tolak Omnibus Law Indonesia di Twitter .....	86
Kesiapan Digital Mahasiswa untuk Beradaptasi dengan Kehumasan Digital (Survei Kesiapan dan Kecakapan Digital Mahasiswa Anggota Perhumas Muda Indonesia) .....	88

#### **Hibah Penelitian Mahasiswa S-2**

Digital Activism dalam Melawan Infodemic: <i>KawalCOVID19</i> sebagai Media Penyedia Informasi pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia .....	91
Penyegelan Batu Satangtung: Dominasi Wacana “Agama” dan Bertahannya Praktik Diskriminasi terhadap Penganut Agama Lokal Sunda Wiwitan .....	93
Literasi Digital Calon Pekerja Indonesia dan <i>Self-control</i> dalam Berbagi Konten Digital .....	94
<i>Digital (platform) inequality: Informal food vendors' appropriation of on-demand food delivery services</i> .....	96
Potret Kerja dan Resiliensi Generasi Muda Pekerja Lepas pada Sektor Ekonomi Platform Kreatif- Digital.....	97
Kontestasi antara Negara dan Masyarakat: Kasus Elektrifikasi di Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo .....	99
Mekanisme Ketahanan Kala Pandemi: Antara <i>Voluntary Action</i> dan Respon Kebijakan (Studi Hermeneutik Aksi “Canthelan”) .....	101

Strategi Gerakan Guru Tonggo dalam Menghadirkan Pendidikan Alternatif pada Masa Pandemi COVID-19 di Klaten, Jawa Tengah.....	103
Analisa Jaringan Wacana Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia .....	105
Kekerasan berbasis Gender <i>Online</i> dan Aplikasi Pencari Jodoh (Studi Deskriptif Kualitatif pada Perempuan Pengguna Aplikasi Ta’aruf) .....	107

#### **Hibah Penelitian Mahasiswa S-3**

Antara Perumahan dan Lahan Pertanian Kota: Kontestasi Politik Ruang Kota di Surabaya Barat .....	110
Relasi Literasi Media Sosial, Kepercayaan dan Kualitas Informasi terhadap Perilaku Komunikasi Masyarakat pada Media Sosial Pemerintah Daerah Urban di Indonesia.....	112
Korupsi Politik Kartel Impor Komoditas Pangan Di Indonesia Dalam Setting Kelembagaan.	113
Narasi Karet ke Narasi Tambang Minyak Artisanal: Studi Governmentalitas di Dusun Tue, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.....	115

#### **Diseminasi Hasil Riset Dosen dan Peneliti Pusat Kajian FISIPOL UGM**

<i>Young Citizen and Social Assistance Program: Their Perception Towards the Effectiveness of Kartu Prakerja as an Employment Benefit to Mitigate Covid-19 Socio-economic Impact.....</i>	118
<i>Finding Indonesia’s (Missing Link) Policy on MSME’s Product/Service Invention and Innovation: a Case Study in Agricultural Industry .....</i>	120
<i>Regulating Harmful Content in Indonesia: Legal Framework, Trends, and Concerns .....</i>	121
Penipuan Digital: Modus, Medium, dan Rekomendasi .....	123
Penurunan Pemahaman Siswa sebagai Dampak Pembelajaran Daring Era COVID-19 ( <i>Learning Loss</i> ).....	125
Tindak Kekerasan dan Konflik di Tanah Papua (Januari 2010 - Agustus2022) .....	126
Politik Seni untuk Pendidikan Toleransi dan Pluralisme di Sekolah Menengah Atas: Studi Kasus Program CREATE – Creative Youth for Tolerance di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan .....	128

**HIBAH**

**PENELITIAN DAN PUBLIKASI**

**DEPARTEMEN MANAJEMEN**

**DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

**Research  
Days**  
2022

## **Socio Entrepreneurship and Community Based Tourism Development**

Ag. Subarsono, Lutfi Untung Angga Laksana, Nimas Hapsari

Community based tourism (CBT) lahir karena adanya socio entrepreneurship dan telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan pada masyarakat lokal (Hustedde, 2009; Kontogeorgopoulos et al., 2014). Studi tentang community based tourism development telah banyak dilakukan oleh para pakar (Giampiccoli & Mtapuri, 2015; Kontogeorgopoulos, et al., 2014; Ohe, 2020; Zagarkhorloo et al., 2021). Di negara berkembang, pariwisata berbasis masyarakat lahir karena negara tidak hadir mengelola sumberdaya alam yang potensial. Socio entrepreneurship perlu dukungan modal manusia dan modal sosial (Rooks et al., 2011). Destinasi wisata Goa Pindul dipilih menjadi lokus studi. Studi ini mengelaborasi driving forces lahirnya socio entrepreneurship dan juga kaitan antara socio entrepreneurship dengan community based tourism (CBT) yang belum dibahas di dalam studi-studi sebelumnya. Penelitian ini menyoroti 2 (dua) driving forces, yakni social driving force dan economic driving force. Dengan mengambil lokus destinasi wisata Goa Pindul, pertanyaan penelitian yang dijawab adalah bagaimana kaitan antara tipologi driving forces dengan derajad community based tourism (CBT) di destinasi wisata Goa Pindul. Pada bagian berikutnya, Kami membuat sketsa latar belakang teoritis yang mendiskusikan bagaimana driving forces socio entrepreneurship dan kaitan antara socio entrepreneurship dengan community based tourism development.

Diskusi hasil penelitian ini diawali dari driving forces lahirnya socio entrepreneurship, kemudian dilanjutkan dengan Community Based Tourism (CBT) dan diakhiri dengan diskusi hubungan antara socio entrepreneur dengan derajad CBT.

1. Social driving forces dan economic driving forces menjadi kata kunci lahirnya **Socio Entrepreneurship**
2. Terdapat (3) tiga temuan penting dari social driving forces yakni: (1) Rekognisi Pokdarwis yang sudah eksis terhadap lahirnya Pokdarwis baru; (2) Adanya upaya penyelesaian gesekan sosial antar Pokdarwis dalam perebutan sumberdaya ekonomi; dan (3) Tingkat kohesivitas sosial Pokdarwis dan masyarakat.
3. Sedangkan, economic driving forces dapat diketahui dari: (1) Transformasi lapangan pekerjaan baru; dan (2) Peningkatan pendapatan.
4. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa Pokdarwis Goa Pindul termasuk dalam tipologi socio entrepreneurship **Quadrant D** yang artinya *inclusive social activity with market oriented*, karena: (1) Socio entrepreneurship yang ada bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi sebanyak mungkin dan hasilnya Sebagian dialokasikan untuk kesejahteraan semua warga, bukan hanya untuk pengurus Pokdarwis; dan (2) Adanya rekognisi antar entrepreneurs mendorong para pokdarwis mau bekerja sama dan selalu berupaya menyelesaikan gesekan sosial yang muncul.
5. Analisis community based tourism dengan menggunakan 4 (empat) perspektif, yakni: (1) environmental sustainability; (2) socio sustainability; (3) participation of local community; dan (4) control and responsibility sharing. Hasil akhir menunjukkan bahwa, elaborasi socio entrepreneurship dan community based tourism (CBT) yang terjadi di destinasi wisata Goa Pindul tergolong **Tinggi dengan nilai 10 poin**.

Socio entrepreneurship yang ada di destinasi wisata Goa Pindul disebabkan oleh *social and economic driving forces*. Social driving forces seperti variabel kohesivitas sosial yang tinggi dan adanya saling rekognisi antar pokdarwis. Sedangkan, economic driving forces, seperti upaya untuk

menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan masyarakat. *Social and economic driving forces* yang tinggi juga memberikan kontribusi bagi CBT karena kesiapan masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial dalam bentuk gotong rorong merawat Goa Pindul. Demikian juga tersedianya alokasi anggaran yang diambil dari benefit pengelolaan destinasi wisata. Pengelolaan destinasi Goa Pindul sudah saatnya beralih kepada sistem digital, bukan sekedar mengandalkan pada website, namun juga promoting, ticketing, dan manajemen waktu operasional selama di dalam Goa.

**Negara dan Wabah: Memandang Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia melalui  
Lensa Governmentality dan Partnership (Kemitraan)**

Suripto

Buku ini merupakan hasil studi mendalam terhadap kemitraan TB-DOTS. Kemitraan TB-DOTS adalah kebijakan yang didesain secara khusus untuk menanggulangi wabah TB di Indonesia. Informan utama penelitian ini adalah profesional kesehatan, yang merupakan anggota tim proyek Kemitraan TB-DOTS. Area utama penyelidikan studi ini adalah hubungan antara fitur kebijakan dan program Kemitraan TB-DOTS, di satu sisi, dan praktik dan tanggapan petugas kesehatan seperti yang diamati di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit, di sisi lain. Menganalisis persinggungan antara wacana Kemitraan TB-DOTS, struktur dan konteks kerja, dan perilaku petugas kesehatan, studi ini memberikan materi yang memungkinkan kita untuk mempertimbangkan hubungan antara kebijakan dan tindakan diskresi dalam pelaksanaan Kemitraan TB-DOTS .

Secara teoritis, studi ini menggabungkan minat Michael Lipsky dalam tindakan diskresioner 'birokrat tingkat jalanan' dan konseptualisasi kebijakan Foucaultian sebagai *governmentality*. Dengan cara ini studi menyatukan pendekatan kebijakan-sebagai-praktik seperti yang dicontohkan oleh Lipsky dan pendekatan kebijakan-sebagai-wacana yang tampak dalam karya Akhil Gupta, Carol Bacchi, Chris Shore dan Susan Wright. Menyatukan pendekatan kebijakan-sebagai-praktik dan kebijakan-sebagai-wacana menggarisbawahi pengakuan bahwa implementasi kebijakan tidak netral dan obyektif, melainkan kontekstual, subyektif dan kontroversial.

Buku ini mengungkap bagaimana suatu kebijakan publik dapat berjalan secara berkebalikan dari perspektif arus utama dalam studi kebijakan dalam dinamika implementasinya. Kebijakan publik yang seringkali dilihat sebagai suatu instrumen intervensi yang bersifat top-down, legal-rasional, dan terlepas dari konteks sosial ternyata dapat menjadi berbanding terbalik 180 derajat. Buku ini secara gamblang memperlihatkan bagaimana para *frontliner* atau *street-level bureaucrat* memainkan peran bukan hanya sebagai implementator namun juga formulator kebijakan dalam proses implementasi. Suatu hal yang terdengar aneh namun merupakan realitas yang terekam dengan jelas dalam studi ini. Selain itu, studi ini juga mengungkap tentang bagaimana berbagai konteks sosial, ekonomi, dan budaya menjadi begitu signifikan dalam mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan. Lebih jauh, studi ini juga merekam bagaimana ruang diskresi ternyata dapat diciptakan dan dieksplorasi sedemikian rupa oleh para implementator kebijakan.

Secara struktur penulisan, buku ini terdiri dalam 8 bab yang secara sistematis akan mengantar pembaca untuk menyelami bagian demi bagian dalam dinamika kebijakan kemitraan TB-DOTS. Bab pertama menjadi pengantar bagi pembaca untuk memahami apa sebenarnya fokus dan lokus dari studi ini serta memberi penjelasan kenapa buku ini penting untuk dibaca. Bab kedua menjadi instrumen untuk memperkenalkan pembaca dengan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam buku ini sembari memperkaya wawasan pembaca tentang studi kebijakan publik. Bab ketiga, memberikan informasi mengenai metodologi serta *setting* dari studi dalam buku ini. Studi ini menggunakan turunan studi kualitatif, yaitu: Etnografi. Studi Etnografi menggambarkan jaringan kesehatan Kemitraan TB-DOTS tertentu di provinsi Indonesia yang penulis sebut Mardiko Negoro. Lokus studi adalah lima puskesmas dan lima rumah sakit yang merupakan peserta awal program kemitraan TB-DOTS. Bab keempat secara khusus memberi penjelasan tentang bagaimana kemitraan TB-DOTS diformulasikan dan hubungannya dengan peran yang dijalankan oleh negara. Bab kelima berfokus pada analisis terkait berbagai program pelatihan yang menjadi tulang

punggung dari kemitraan Tb-DOTS ini. Bab keenam berfokus pada analisis terhadap bagaimana dinamika implementasi kebijakan serta dinamika perilaku dari para implementator kebijakan di puskesmas. Bab ketujuh berfokus pada analisis terhadap bagaimana dinamika implementasi kebijakan serta dinamika perilaku dari para implementator kebijakan di rumah sakit. Kedua bab ini, bab 6 dan 7 akan memperlihatkan berbagai dinamika menarik dari suatu kebijakan yang tidak terekam oleh berbagai buku kebijakan publik yang menggunakan perspektif arus utama. Terakhir, bab kedelapan menjadi instrumen reflektif yang secara strategis akan memberikan berbagai refleksi kritis tentang studi kebijakan, hubungan antara negara dengan kebijakan, serta agenda strategis ke depannya yang perlu untuk dilakukan di Indonesia.

**HIBAH**  
**PENELITIAN DAN PUBLIKASI**  
**DEPARTEMEN POLITIK DAN**  
**PEMERINTAHAN**

**Research  
Days**  
2022

**Diskursus Program Kemitraan dan Dilema Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Hutan:  
Analisis Jaringan Wacana (Discourse Network Analysis) di Register 45 Mesuji**

Devy Dhian Cahyati

Perhutanan sosial merupakan upaya untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan yang dikuasai oleh negara. Studi ini akan melihat diskursus kebijakan kemitraan dalam praktik perhutanan sosial dengan menggunakan analisis jaringan wacana. Perjalanan konflik tanah di Register 45 Mesuji hingga menyebabkan bentuk kekerasan, penggusuran, hingga pembunuhan, mendorong pemerintah untuk membuat skema perhutanan sosial dalam bentuk kemitraan kehutanan di wilayah ini sejak tahun 2014. Pola kerja Kemitraan dilakukan dengan mengajak petani yang menduduki tanah register untuk bekerjasama dengan perusahaan menanam komoditas yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Namun, kasus register 45 menunjukkan bahwa program perhutanan sosial tidak selalu mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat lokal. Studi ini ingin menjawab pertanyaan yaitu *Bagaimana discourse kemitraan hutan terkait dengan menurunnya partisipasi di register 45?*

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis jaringan wacana (*Discourse Network Analysis*) yang menggabungkan analisis wacana dan analisis jaringan sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu artikel-artikel yang ada di media online yang ada di Indonesia serta transkrip wawancara. Dari data yang dihimpun melalui pemberitaan di media maupun transkrip wawancara, terdapat 81 dokumen, 284 statement yang dikeluarkan oleh 72 orang dengan latar belakang organisasi yang berbeda-beda.

Hasil Analisa DNA menunjukkan bahwa tokoh yang paling vokal dalam membicarakan tentang kemitraan yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Dinas Kehutanan memiliki misi besar dalam penyelesaian konflik di register 45 dengan mendorong skema kemitraan hutan. Selain itu, ada pengacara yang cukup sentral dalam mewacanakan kemitraan karena posisinya sebagai ketua LBH.

Penelitian ini menunjukkan secara visual bagaimana jejaring aktor terbentuk terkait dengan wacana kemitraan kehutanan. Di beberapa tempat di Indonesia, kemitraan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat sekitar hutan. Studi ini menemukan fenomena sebaliknya dimana petani yang menggarap Kawasan hutan register justru menolak gagasan ini dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya.

Hasil analisa memperlihatkan bahwa di awal program kemitraan, Dinas Kehutanan menjadi organisasi yang secara intensif mewacanakan tentang kemitraan sebagai bentuk penyelesaian konflik. Bupati menjadi aktor lain yang berusaha mendorong program ini sebagai upayanya untuk menertibkan hutan register dari aktivitas petani yang dianggap ilegal secara hukum. Ketika itu, beberapa kelompok tani bersedia mengikuti program ini melalui perjanjian kerjasama dengan perusahaan, sementara kelompok tani lain menolak untuk bergabung dalam program ini.

Diskursus program kemitraan mulai bergeser setelah tahun 2017 baik dari sisi aktor maupun konsep-konsep yang diperdebatkan. Dari sisi aktor, walaupun Dinas Kehutanan masih menjadi tokoh sentral dalam wacana kemitraan, telah muncul aktor-aktor lain misalnya dari kelompok masyarakat sipil. Sedangkan dari sisi konsep, beberapa konsep mengundang perdebatan misalnya

konsep kemitraan menyejahterakan dan kemitraan sesuai dengan yang dijanjikan banyak ditentang oleh para aktor.

Partisipasi masyarakat dalam program kemitraan menurun disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya pengelolaan kemitraan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh perusahaan, aktivisme dari para petani yang mengganggu kerja para peserta kemitraan, serta kemandirian petani dalam mengelola tanah register lebih menguntungkan daripada ketika mereka mengikuti program kemitraan.

## **Woman Regional Heads and Gender-Responsive Policies in Tabanan Regency, Bali, Indonesia**

Ratnawati & Oberlin Silalahi

This study aims to examine the contribution of women regional heads to the realization of gender responsive policies by analyzing the case of Ni Putu Wiryastuti, the Regent of Tabanan Regency (Bali), who served for two tenures (2010 to 2015 and 2015 to 2020). This regency was used because Wiryastuti was the first female regent in Indonesia, and during her time, there was an increase in the Gender Development Index (IPG) from 2010 to 2020. Furthermore, this study was triggered by the opinion that the 21st century is often referred to as the century of women.

In Indonesia, several women have started to take on important roles and positions in local politics since the direct regional head elections (pilkada) were held in 2015. The 2015 simultaneous regional elections are the first transitional phase carried out in three stages before the national, scheduled in 2024. Along with implementing this direct electoral mechanism, the involvement of women in local politics has become increasingly evident.

This study does not explain the factors that led to the election of women as regional heads at the local level. However, it analyzes how their presence promotes constructive governance in initiating, realizing, and implementing gender-responsive policies. Indeed, their emergence as local leaders or regional heads through direct election is an achievement, although it need not be interpreted as the ultimate goal. It is even more critical that their presences aid in the realization of gender-responsive policies for both practical and strategic interests; besides this is the significance or importance of this study.

The primary materials analyzed in this study are gender-responsive policies and, second, social capital realized by women regional heads of Tabanan Regency from 2010 to 2020. Therefore, this led to using a case study methodology. The number of key informants is 19 people, consist of Regent of Tabanan Regency, Member of the Regional Parliament of Tabanan Regency, Office (Regional Apparatus Organization/ OPD) Civil Society Organizations (CSOs) Public figure Mass media and Academics.

The main argument of this study is that social capital influences women regional heads in realizing gender-responsive policies First is the extent these laws have succeeded in meeting practical gender interests, namely and second is how policies have succeeded in meeting strategic gender interests. This includes those adopted to overcome backwardness in the society by creating an orderly structure that is gender-equitable and related to changes in women's subordination to men, such as changes in the division of roles, labor, power, and control resources. This gender strategic need is also related to improved law and equal pay for the same type of work. Furthermore, the social capital of women regional heads is analyzed first from the material (financial) and non-material resources possessed (trust and togetherness system). The second analysis is through access to information, organizations, and public officials. The third is bonding or social networks with close and stable ties; bridging or open and heterogeneous networks; and linking or networks between groups and countries.

Based on the concept adopted in this empirical study, it discovered that women regional heads have social capital in the form of material resources, trust, access to information, organizations, and public officials, as well as social networks in the form of bonding, bridging and linking, used to realize gender-responsive policies successfully. In accordance with empirical evidence, this study succeeded in resolving the problem associated with the initiation of gender-responsive policies by empirical evidence. Based on this context, the success of women regional heads in realizing these regulations

*depends on their social capital, usually in the form of material resources, access to information from organizations and public officials, and networking capital such as bonding, bridging, and linking.*

**Politik seni dan isu-isu kritis untuk pendidikan toleransi dan pluralisme di Sekolah Menengah Atas**

**Studi Kasus Program CREATE - Creative Youth for Tolerance di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan**

Evi Sutrisno, RB Abdul Gaffar Karim, Ulya Jamson, Desi Rahmawati, Ignatius Juru

Creative Youth for Tolerance (Generasi Muda Kreatif untuk Toleransi, selanjutnya disebut CREATE) merupakan program tiga tahunan yang dilaksanakan oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial yang bekerjasama dengan organisasi-organisasi lokal di tiga provinsi di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan). Program CREATE bertujuan untuk meningkatkan pluralisme dan toleransi di beberapa sekolah dengan menguatkan toleransi dan pluralisme di antara siswa dan meningkatkan peran orang tua dan komite sekolah untuk mendukung praktik-praktik toleransi. Program CREATE mengupayakan pendekatan seni yang inovatif dan jalan budaya sebagai pintu masuk untuk mempromosikan toleransi dan pluralisme di kalangan siswa di provinsi-provinsi di mana terjadi peningkatan jumlah kasus intoleransi, termasuk eksklusivisme agama, dan sejumlah besar peraturan daerah (perda) yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas.<sup>1</sup> Program ini menargetkan sekolah-sekolah di area perkotaan dan pedesaan tetapi memprioritaskan sekolah yang relatif berdekatan satu sama lain di tiga provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Yayasan Hivos menerapkan program CREATE yang memfasilitasi kolaborasi banyak aktor dan kerjasama yang menyasar pada toleransi agama, suku, gender dan disabilitas serta inklusivitas di Indonesia. CREATE merespons secara langsung masalah-masalah intoleransi di sekolah dengan menggunakan pendekatan inovatif. Pendekatan ini didukung oleh keterlibatan elemen-elemen kunci dalam komunitas pendidikan: orang tua, guru, komite sekolah, pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan akademisi. Jika sesuai, peluang-peluang untuk mengadakan kerjasama dengan sektor swasta juga perlu digali.

Hivos bekerjasama dengan PolGov, melaksanakan penelitian kualitatif memfokuskan diri pada pengumpulan data secara mendalam pada 7 (tujuh) sekolah yang telah menunjukkan kemajuan dan pembelajaran penting selama dua tahun pelaksanaan program. Pengumpulan data kualitatif dilaksanakan pada bulan Maret 2022, dan menyasar pada 4 (empat) Sekolah Menengah Atas Negeri dan 2 (dua) Madrasah Aliyah di Jawa Barat (Bandung dan Bogor), Jawa Timur (Surabaya dan Malang), dan Sulawesi Selatan (Makassar dan Gowa). Secara ringkas, 1 USAID CREATE Fact Sheet 2020. 6 studi kualitatif mengumpulkan data dari 10 pejabat pemerintah di tingkat nasional dan provinsi, 7 (tujuh) kepala/wakil kepala sekolah, 7 (tujuh) orang tua/wali, 57 siswa, dan 52 guru.

Sebagai kelanjutan dari studi baseline sebelumnya (Rahmawati et al., 2021) dan studi midline kuantitatif (CREATE, 2021), penelitian ini menggunakan segitiga konflik ABC Galtung (Galtung, 1958) untuk memahami kemampuan individu dalam menangani konflik secara konstruktif. Akan tetapi, studi kualitatif ini melihat lebih dekat pada aspek “kontradiksi”, yang dapat dipahami sebagai konteks mendasar yang menciptakan konflik atau ketidaksesuaian tujuan, termasuk perubahan sosial budaya, ekonomi, atau politik, dan juga kelangkaan yang sering terjadi. memicu persaingan atas sumber daya sosial, ekonomi, atau politik. Berdasarkan rekomendasi dalam studi baseline, studi ini menggunakan “tindakan toleransi dalam sebuah kontinum” (Rahmawati et al., 2021) dan juga konsep “toleransi sosial dan toleransi politik” (Bloom dan Bagno-Moldavsky, hal.

625 -626) untuk memastikan setiap orang memiliki titik acuan yang sama dalam memahami toleransi.

Toleransi sosial adalah kesediaan seseorang dan “kesiapan untuk hidup berdampingan secara sosial dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang paling tidak disukai atau kelompok yang merupakan ancaman potensial terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi atau budaya mayoritas” (Bloom dan Bagno-Moldavsky, 2015, hlm. 625-626). Sementara toleransi politik didefinisikan sebagai “Penerimaan seseorang atas hak sipil dan politik orang lain terlepas dari seberapa berbeda pandangan mereka” (Bloom dan Bagno-Moldavsky, 2015, hlm. 625-626).

**HIBAH**  
**PENELITIAN DAN PUBLIKASI**  
**DEPARTEMEN ILMU**  
**KOMUNIKASI**

**Research  
Days**  
2022

## **Pejabat Publik Dan Wacana Ujaran Kebencian Bernuansa “Sara” Di Media Sosial**

Widodo Agus Setianto

Situasi sosial politik yang kurang kondusif akibat ekses persaingan politik yang tidak sehat pada dua pemilihan presiden yang lalu telah menimbulkan polarisasi masyarakat dan anomali nilai-nilai sosial. Media sosial menjadi sarana penajaman polemik terkait berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pernyataan pejabat publik yang tidak peka terhadap isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) membuat bangsa ini tidak produktif. Publik terjebak dalam hiruk-pikuk wacana dari pernyataan pejabat publik yang viral di media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang fenomena ujaran kebencian bernuansa SARA yang disampaikan oleh pejabat publik. Konstruksi teoritis menggunakan teori tentang pejabat publik, penggunaan media sosial sebagai media komunikasi massa, dan ujaran kebencian berbasis rasisme. Metode penelitian menggunakan analisis wacana kritis oleh Teun A. van Dijk dengan tiga dimensi analisis wacana; teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema wacana pada struktur makro secara spesifik tidak menunjukkan adanya wacana ujaran kebencian bernuansa SARA. Superstruktur dan mikrostruktur menunjukkan adanya wacana ujaran kebencian bernuansa SARA. Secara paradigmatis makna wacana adalah Ujaran Kebencian bernuansa SARA. Makna wacana merupakan manifestasi dari kognisi sosial dan konteks sosial terkait dengan situasi sosial yang terpolarisasi akibat politik identitas yang berkembang. Kontribusi akademis dari hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa makna wacana tidak selalu seperti yang dimaksudkan pembicara; Makna wacana dapat dimaknai secara berbeda oleh publik berdasarkan cara penyampainya dan konteks politik, sosial dan budaya. Kontribusi praktis dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana introspeksi bagi pejabat publik atau tokoh masyarakat lainnya agar dalam menyampaikan suatu pernyataan yang bersifat publik, memiliki empati dan mempertimbangkan akibat dari pernyataannya dengan memperhatikan aspek sosial., konteks budaya dan politik.

***Organizational Engagement pada Program Kota Cerdas***  
***Studi Kasus Integrasi Smart City ke Dalam Jogja Smart Province (JSP)***

Adam Wijoyo Sukarno

Salah satu tantangan organisasi saat ini adalah beradaptasi pada ekosistem yang selalu berubah. Kemampuan beradaptasi menjadi kunci bagi organisasi agar bisa bertahan dalam lingkungan baru. Pengamatan tentang lingkungan organisasi pada awalnya bertolak dari dua fokus. Grunig (1992) pada awalnya melihat faktor lingkungan sebagai variabel yang mempengaruhi dinamika organisasi. Namun, perdebatan selanjutnya berkembang pada munculnya variabel lain yang dianggap memiliki pengaruh lebih signifikan terhadap praktik adaptasi organisasi. Variabel lingkungan digantikan variabel power-control yang dianggap memiliki pengaruh lebih kuat (Putra, 2008, h. 2.7). Dua pandangan tersebut menghasilkan dua aliran dalam melihat variabel penting bagi adaptasi organisasi.

Pada dasarnya terdapat beberapa pilihan untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan yang baru dan berbeda. Selain mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi, cara lain yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan perubahan teknis dan administratif ke dalam struktur organisasi untuk meningkatkan capaian organisasi dan membangun hubungan antara organisasi dengan publik (Roessner, 1977; Mohammed, 2014, h.485).

Saat ini, transformasi digital menghasilkan beragam fenomena baru. Akibatnya, entitas, termasuk organisasi berlomba masuk ke dalam ekosistem digital melalui inisiatif-inisiatif pengembangan layanan berbasis aplikasi digital. Jogja Smart Province (JSP) merupakan platform digital yang merangkum program kota cerdas dari 4 kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kolaborasi internal Pemda DIY plus masyarakat. Platform ini merupakan pengembangan dari program Digital Governance Service (DGS) yang saat itu memiliki tujuan untuk menjadikan DIY sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Upaya ini dilakukan melalui skema optimalisasi penggunaan teknologi, integrasi data dan kolaborasi antar wilayah.

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih karena kemampuannya dalam menggali data dari berbagai sumber bukti dengan batasan tertentu. Dengan demikian, peneliti dapat mengejar kedalaman dan menghasilkan data yang komprehensif sesuai dengan kerangka penelitian yang telah ditetapkan.

Melalui model *engagement* yang dikembangkan oleh Forrest (2022), riset ini menemukan bahwa terdapat variasi *engagement* pada tiga kelompok yang menjadi target kolaborasi dalam program JSP. Pada kelompok organisasi internal pemda DIY, model formal dipergunakan karena pemerintah daerah menyadari bahwa teknologi dapat melayani strategi organisasi yang lebih luas dan menghasilkan keunggulan kompetitif. Sedangkan pada kelompok organisasi pemda DIY dan pemda kabupaten/ kota model kombinasi antara formal dan informal digunakan untuk menjembatani variasi pemahaman antar bagian pemerintah. Pada kelompok organisasi terakhir yang melibatkan pemda DIY dengan masyarakat, model temporary dipilih untuk merangkum dan mendorong munculnya beragam aplikasi JSP.

**Inovasi Model Bisnis Media Nasional:  
Studi Kasus Konsep Ekonomi Kolaboratif Pikiran Rakyat Media Network (PRMN)**

Zainuddin Muda Z. Monggilo, M. Fadhil P., Renatta Karuna D., & Yogama Wisnu O.

Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) sebagai jaringan media yang dinaungi oleh PT Kolaborasi Mediapreneur Nusantara (KMN) adalah salah satu media jejaring Indonesia yang menerapkan model bisnis yang khas yang disebut dengan konsep ekonomi kolaboratif. Walau baru berusia dua tahun, konsep ini berhasil menyabet rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) sebagai "Media Daring Berjejaring Pertama yang Mengusung Konsep Ekonomi Kolaboratif" di tahun 2021. Melalui konsep ini, PRMN mengklaim sudah berjejaring dan berkolaborasi dengan 210 mitra yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bahkan menurut Perwakilan Dewan Pers Agus Sudibyo, konsep ini merupakan asa baru bagi jurnalisme Indonesia yang bisa menggaet para pembuat konten (*content creator*) yang juga menghiasi wajah media saat ini sebagai calon pencetus media independen berkualitas di masa depan. Lantas, bagaimana sesungguhnya konsep ekonomi kolaboratif ini dirancang dan dilaksanakan? Penelitian ini bermaksud mengeksplorasinya secara lebih mendalam.

Rumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan penelitian umum yaitu bagaimana konsep ekonomi kolaboratif ala PRMN dikembangkan dan dijalankan sebagai inovasi model bisnis media masa kini di tengah era disruptif digital? Sedangkan pertanyaan khusus yaitu bagaimana kontribusi (peluang dan tantangan-SWOT) konsep ekonomi kolaboratif media yang dijalankan terhadap dinamika kondisi internal dan eksternal PRMN? Serta bagaimana konsep ekonomi kolaboratif media ini diposisikan di antara tarik-menarik dimensi ekonomi-politik, sosial dan teknologi media?

Paradigma dari penelitian ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan untuk mendekati rumusan masalah adalah studi kasus dengan desain kasus tunggal (*single case design*). Data penelitian primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada pengelola media PRMN dan dilengkapi dengan data sekunder yang relevan seperti artikel penelitian terdahulu dan artikel pemberitaan.

Data sekunder yang telah terkumpul terdiri dari dua kategori data utama yaitu: (1) data media PRMN, (2) publikasi yang relevan dengan topik penelitian: artikel jurnal, berita daring, situs web/blog, dan laporan riset/kajian/analisis. Setelahnya, pengumpulan data primer didapatkan dari wawancara dengan Managing Editor PRMN, Yusuf Wijanarko. Hasil wawancara dituliskan dalam transkrip verbatim yang diketahui dan disetujui seluruh isi dan tujuan penggunaannya oleh informan.

Dari data-data yang terkumpul, ditemukan sejumlah poin kunci yang sifatnya elaboratif untuk publikasi hasil penelitian, di antaranya: (1) model bisnis PRMN berupaya menjaring dan bermitra dengan sebanyak mungkin pembuat konten dengan harapan tidak hanya sebagai salah satu sumber pendapatan media utamanya, tetapi juga untuk menyejahterakan pembuat konten itu sendiri yang tergabung sebagai media rekanan/subsidiaries—hal ini yang kemudian dimaknai sebagai konsep ekonomi kolaboratif, (2) PRMN menyadari persoalan kualitas konten yang tergerus karena kebiasaan mengejar klik, sehingga salah satu upayanya adalah melalui *monitoring* secara berkala oleh media utama terhadap media mitra, (3) PRMN menyadari belum ada model bisnis yang sepenuhnya ampuh untuk melepaskan diri dari algoritma *platform* yang mendatangkan

pengiklan, namun untuk jangka waktu tertentu, model bisnis ekonomi kolaboratif yang sedang dianut ini masih cukup menguntungkan.

## **Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi di Indonesia**

Lisa Lindawati

Teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan teknologi digital digadang-gadang sebagai *strategic tools* untuk menciptakan produk sekaligus pasar yang berpihak pada prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Dalam konteks ekonomi, salah satu prinsip keberlanjutan menekankan pada berkembangnya ‘*free knowledge*’ yang menciptakan keterbukaan akses, kesetaraan, dan keberadilan dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Hal ini didorong oleh perkembangan masyarakat informasi yang menciptakan ‘*free flow of information*’. Keterbukaan ini memberikan akses bagi siapa saja untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan bertransaksi. Namun di sisi lain, sejarah menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat informasi didorong oleh revolusi industri yang berpijak pada kepentingan kapital. Informasi dianggap sebagai sumber daya baru yang dapat dikomodifikasi dan diprivatisasi. Hal ini dicirikan adanya kecenderungan penguasaan informasi oleh segelintir orang maupun kelompok. Penguasaan ini berimplikasi pada kemampuan kelompok tersebut dalam melakukan monetisasi atas sumber daya informasi yang mereka kuasai. Ekosistem digital yang dikuasai oleh duopoly antara Alphabet dan Meta menjadikan keduanya raja yang mampu mempengaruhi pergerakan masyarakat global. Di sisi lain, ekosistem digital melahirkan peluang-peluang ekonomi baru yang dimanfaatkan oleh banyak kalangan. Konektivitas yang dibawa oleh teknologi digital melahirkan model bisnis baru yang berbasis pada kolaborasi. Konsep *sharing economy* menguat dengan perkembangan banyak platform yang mempertemukan *supply-demand* dengan kepemilikan aset yang terdistribusi. Berkaca dari dua kecenderungan paradoksial tersebut, penelitian ini mencoba mengeksplorasi kecenderungan yang terjadi di Indonesia.

Dalam mengeksplorasi kecenderungan tersebut, penelitian ini mencoba membandingkan antara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan tingkat distribusi produktivitas di berbagai wilayah. Penggunaan TIK dilihat dari data penetrasi internet, indeks literasi digital, dan juga indeks pembangunan TIK. Distribusi produktivitas dilihat dari data laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, rasio gini, serta indeks pembangunan ekonomi inklusif. Dari sebaran data di masing-masing provinsi, peneliti mencoba untuk melihat kecenderungan secara nasional dan juga mendalami beberapa wilayah yang menarik. Dari hasil desk study dapat dilihat bahwa ada korelasi positif antara tingkat penggunaan internet dengan laju pertumbuhan ekonomi dan produktivitas di berbagai wilayah. Provinsi dengan angka penetrasi internet dan literasi yang tinggi memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta angka kemiskinan yang cenderung rendah. Namun, tingginya penggunaan internet belum berkorelasi positif dengan distribusi pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ada korelasi yang signifikan antara tingkat penggunaan internet dengan rasio gini dan indeks pembangunan ekonomi inklusif. Selain itu, ada anomali di beberapa provinsi dengan kecenderungan berbeda. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingginya penggunaan dan literasi digital tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan serta distribusi pendapatan. DIY masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi serta produktivitas yang rendah.

Penelitian ini menunjukkan peluang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada prinsip keberlanjutan, kesejahteraan ini tidak boleh dimiliki oleh sebagian masyarakat saja melainkan harus dapat dirasakan oleh semua kalangan. Berdasar desk study yang telah dilakukan, penggunaan TIK belum menjamin terjadinya distribusi ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada intervensi

dari para pemegang kebijakan untuk mendorong ekosistem digital yang lebih sehat. Penelitian ini merupakan preliminary study yang masih membutuhkan proses panjang untuk mendalami objek. Perlu penelitian empiris yang dapat menjadi basis dalam merumuskan rancangan bangun ekosistem digital yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** *ICT, sustainable economy, information society, sharing economy*

## Kajian Literatur Game Industri Gim Independen Tiongkok, Jepang dan Kanada

Jusuf Ariz Wahyuono

Dalam beberapa tahun terakhir, industri gim telah menjadi salah satu industri hiburan dengan pendapatan terbesar di dunia. Namun jika dibandingkan dengan industri musik dan film, penelitian terkait industri gim ini masih relatif terbatas, khususnya terkait dengan industri gim independen. Pengembang gim independen merupakan studio pengembang gim dalam skala kecil dan menengah, dengan modal terbatas dan jumlah pegawai kurang dari 10 orang. Peneliti bertujuan untuk mengamati perkembangan industri gim di tiga negara, Tiongkok, Jepang, dan Kanada. Tiga negara ini dipilih dengan alasan bahwa perkembangan industri gim ini masuk dalam peringkat 10 besar dengan pendapatan terbanyak dan ketersediaan literatur terkait gim independen. Dalam kajian ini, peneliti mengamati tiga negara berdasarkan pada kriteria yaitu, sejarah/konteks, Kendala/permasalahan, penanganan (peran pemerintah atau komunitas).

Berdasarkan pengamatan peneliti, sejarah masing-masing negara sangat beragam dan menentukan intervensi pemerintah atau peran komunitas dalam industri.

Permasalahan industri gim Tiongkok berangkat dari sensitivitas negara terkait isu sosial dan politik tertentu. Dalam industri gim, pemerintah mengontrol konten gim yang di produksi dan beredar di masyarakat. Hal ini berdampak pada kemampuan studio pengembang gim independen untuk memproduksi dan mendistribusikan produk mereka. Dalam kasus ini, peran pemerintah lebih terlihat sebagai penegas kebijakan yang ketat. Walau begitu, di tengah ekosistem yang ketat, kehadiran distributor gim multinasional, Steam, di Tiongkok yang lepas dari regulasi dinilai sangat membantu peredaran gim independen Tiongkok menembus pasar internasional.

Selain itu, kontribusi komunitas dapat dilihat dari peran komunitas organisasi gim independen masih kerap mengadakan gelaran acara untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama untuk pengembang gim independen (seperti CIGA, WePlay Expo, Taipei Game Show). Untuk peran pemerintah, hal ini dapat dilihat di negara bagian Hongkong. Pemerintah Hongkong menginisiasi berbagai program pendanaan dan inkubasi untuk perusahaan rintisan di bidang gim.

Pada industri gim independen Jepang permasalahan utama diantaranya minimnya bantuan pendanaan dari pemerintah terhadap praktik wirausaha, adanya stigma buruk terhadap profesi pengembang gim independent sebagai profesi tidak prospektif, pengembang gim independen Jepang sangat lemah dalam kemampuan penguasaan bahasa Inggris sehingga lingkup pasar terbatas, dan adanya perbedaan kultur digital dalam konteks penggunaan media sosial populer yang dapat digunakan sebagai sarana promosi gim.

Sementara di industri gim Kanada, kendalanya diantaranya adalah masih sulitnya akses program bantuan pendanaan dari pemerintah, masih adanya praktik marginalisasi golongan yang dilakukan oleh beberapa komunitas pengembang gim, dan adanya perbedaan signifikan pada aspek kemampuan bisnis dasar antara studio pengembang independen pemula dengan studio pengembang independen yang beranggotakan veteran dari perusahaan gim AAA.

Dalam hal pengembangan industri, pemerintah federal Kanada membuat berbagai program untuk mendorong pertumbuhan gim independen, seperti, *Canada Media Fund's Experimental Stream, Scientific Research & Experimental Development (SR&ED) Tax Credit, National Research Council's Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP)*, dan *CanExport SME*. Selain itu,

beberapa pemerintah provinsi setempat mempunyai program spesifik dalam pengembangan komunitas pengembang gim independen. Kemajuan dari industri ini pun tidak dapat terlepas dari aktifnya komunitas gim independen, seperti *Weird Ghost*, *Dame Making Games*, dan *Pixelles*.

**Dari Multiverse dan Multinarasi Menuju Komodifikasi Ekstrem:  
Analisis Naratif Film-film Spider-man Marvel Cinematic Universe dan Sony's Spider-man  
Universe dalam Perspektif Ekonomi Politik Komunikasi**

Wisnu Martha Adiputra

Riset ini meneliti sebelas film yang menghadirkan karakter Spider-Man dan narasinya. Film Spider-Man adalah bagian dari film bergenre superhero yang dalam sepuluh tahun terakhir merajai box-office untuk film, bahkan untuk industri media hiburan secara umum. Cara produksi film yang relatif baru muncul pada era film bergenre superhero adalah kehadiran multinarasi, yaitu produksi banyak narasi namun dalam satu kisah besar, yang dalam kasus ini disebut Marvel Cinematic Universe.

Dalam perkembangannya kemudian Marvel dan Sony kemudian bekerja sama untuk memproduksi Spider-Man instalasi ketiga. Kerjasama tersebut memperkuat Marvel Cinematic Universe dan turut memunculkan Sony's Spider-Man Universe. Uniknya, Sony's Spider-Man Universe tidak menggunakan karakter Spider-Man terakhir, namun menggunakan karakter yang lain. Kerjasama tersebut juga memunculkan konsep multiverse, yang juga berfungsi sebagai teknik bercerita yang semakin mendatangkan keuntungan bagi Marvel dan Sony.

Riset ini menggunakan metode analisis naratif dalam melihat kesebelas film, terutama mendalami karakter dan alur cerita karena karakter adalah komoditas utama yang ditawarkan dalam narasi. Selanjutnya telaah tersebut memunculkan ruang naratif, yaitu ruang imajiner di mana produsen, konten, dan audiens dipertemukan. Selain konten yang berbentuk naratif, respon audiens yang terbagi antara pro, kontra, dan netral atas narasi menjadi pengembangan yang penting bagi narasi itu sendiri.

Perspektif ekonomi politik komunikasi yang digunakan untuk menganalisis riset ini menunjukkan terjadi komodifikasi ekstrem pada karakter Spider-Man dan narasinya dalam kesebelas film yang diteliti. Komodifikasi ekstrem tersebut didapatkan dari: pertama, kehadiran tiga jenis narasi, yaitu narasi utama, narasi sampiran dan narasi bayangan. Kedua, pada narasi utama karakter Spider-Man dipertemukan dalam film ketujuh, yang berada dalam instalasi atau pengembangan ketiga. Kehadiran tersebut kemudian menghasilkan mutinarasi dan implementasi multiverse lebih kuat, terutama karena konsep multiverse diimplementasikan secara langsung di dalam film.

Sebagai kesimpulan ketiga, didapatkan bahwa terjadi komodifikasi ekstrem pada narasi sampiran, sebab walaupun karakter Spider-Man hanya muncul sedikit namun karakter ini mendapatkan fungsi yang penting dalam keseluruhan narasi dan multinarasi. Spider-Man adalah karakter superhero yang relatif berusia muda dibandingkan dengan karakter superhero yang lain. Dengan demikian karakter ini berperan menarik animo penonton berusia muda.

Kesimpulan keempat atau terakhir dari riset ini adalah kehadiran narasi bayangan. Narasi bayangan ini bahkan tidak menampilkan karakter Spider-Man namun hanya musuh-musuh utama Spider-Man di dalam konten awalnya, yaitu komik. Uniknya, karakter tersebut kemudian dikomodifikasi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memberikan karakter anti-hero, bukan sebagai penjahat super. Pengembangan narasi untuk tetap menghadirkan karakter Spider-Man terlihat karena kehadiran nantinya karakter Spider-Man lain yang berbeda dengan versi yang ada

pada Marvel Cinematic Universe. Pada titik ini, terjadi komodifikasi internal dan eksternal sekaligus pada karakter Spider-Man.

Diharapkan melalui riset ini akan didapatkan pemahaman proses bekerjanya tindakan ekonomi politik komunikasi pada narasi atau komoditas industri media, yaitu komodifikasi, juga dua yang lainnya, spasialisasi dan strukturasi. Selanjutnya akan muncul pemahaman bahwa pada dasarnya konten bekerja dalam bingkai industri media yang kepentingan utamanya untuk mendatangkan profit secara langsung. Dalam proses tersebut keberagaman dan kedalaman narasi terkadang diabaikan sehingga audiens seperti kita semestinya tetap kritis terhadap konten media yang sangat populer sekali pun.

## **Jurnalisme di Global South: Tantangan dan Transformasi Digital**

Wisnu Prasetya Utomo

Studi ini memetakan bagaimana proses perubahan ekosistem digital yang berpengaruh terhadap industri media di negara-negara berkembang terlihat dalam karya akademik. Peneliti berargumen bahwa karakter kultural, kondisi sosial, serta sistem ekonomi-politik di tiap negara punya perbedaan masing-masing sehingga ia akan berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa menilai perubahan yang terjadi. Dengan begitu peneliti berharap studi ini bisa memberikan kontribusi untuk kajian-kajian mengenai transformasi digital industri media di masa mendatang khususnya yang terjadi di negara-negara Global South.

Seperti yang sudah disebutkan singkat di latar belakang, meskipun pengaruh teknologi terhadap industri media dan praktik jurnalistik bukan hal baru, berbagai penelitian terkait hal tersebut masih sangat western-centric (Jian dan Liu, 2018). Seperti dijelaskan oleh Benson dan Neveu (2005) hal ini tentu bisa memicu bias karena efek teknologi selalu tidak bisa dilepaskan dari karakteristik sistem ekonomi politik, budaya, dan sejarah di setiap negara. Wajar jika beberapa ilmuwan seperti Thussu dan Nordenstreng (2015) menyebutkan pentingnya memberikan perhatian pada transformasi media yang terjadi di negara seperti China dan negara-negara Asia lainnya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, kajian ini berharap bisa memberikan kontribusi dalam upaya memetakan studi-studi yang sudah ada di *Global South*. Dengan demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Lowrey (2017), ia bisa memberikan sumbangsih bagi pemahaman yang mendalam mengenai ekosistem digital yang terus berkembang dalam industri media.

Untuk melihat hal tersebut, penelitian ini menggunakan *systematic literature review* untuk mengumpulkan sekaligus menganalisis kajian mengenai transformasi digital dalam industri media di *Global South*. Tujuan dari *systematic literature review* adalah peneliti ingin memetakan kajian-kajian dalam isu tersebut. Dengan begitu, sebagaimana dijelaskan oleh Cronin et al (2008) peneliti bisa mengidentifikasi, memberikan catatan secara kritis, serta mensintesis literatur yang ada. Hal ini penting sebagai upaya untuk melakukan refleksi atas studi-studi yang sudah ada, melihat kekuatan dan kelemahannya, serta membantu mengidentifikasi riset-riset atau kajian yang diperlukan di masa depan.

Penelitian ini akan mengidentifikasi kajian-kajian yang relevan mengenai transformasi digital di industri media di negara-negara *Global South* dalam rentang waktu 2015 – 2020. Adapun artikel-artikel yang akan digunakan adalah artikel berbahasa Inggris yang tersimpan dalam database DOAJ (*Directory of Open Access Journal*), SCOPUS, dan Portal Garuda untuk artikel berbahasa Indonesia.

Dari pembacaan atas berbagai literatur yang dianalisis oleh peneliti, pendekatan melihat transformasi digital dalam jurnalisme yang digunakan di antaranya adalah hibridisasi, mediatisasi, dan konvergensi. Sementara itu, aspek-aspek dalam transformasi digital yang paling banyak dilihat berkaitan dengan informasi atau konten, audiens, metode atau praktik jurnalistik, serta model bisnis media.

Beberapa hal tersebut yang memayungi berbagai proses perubahan yang terjadi pada level yang lebih praktis. Misalnya saja seperti *technology-driven* yang di antaranya melahirkan *data journalism*, *virtual journalism*, *mobile journalism*. Lalu berikutnya berkaitan dengan relasi jurnalisme-audiens yang terus mengalami perubahan. Ini menjelaskan fenomena *citizen journalism*, *participatory journalism*, *collaborative journalism*, *network journalism*. Dari sisi model bisnis, ada

banyak inovasi dan perubahan seperti skema *membership*, berlangganan, iklan (*advertorial journalism, brand journalism*).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, studi ini hanya diniatkan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi berbagai literatur yang sudah ada mengenai perkembangan digital jurnalisme khususnya di *Global South*. Karena itu, butuh penelitian-penelitian selanjutnya untuk melihat perubahan dan transformasi digital dalam jurnalisme ini secara lebih komprehensif.

## **“Kekebasan” Dalam Komunikasi Digital**

Nunung Prajarto

Komunikasi digital secara jelas mengubah pola interaksi sosial dari interaksi fisik ke lebih banyak interaksi virtual. Terlepas dari hal-hal positif yang dihadirkan, berbagai persoalan muncul dalam komunikasi secara digital dengan basis teknologinya. Konten negatif dan perilaku penyebaran pesan yang tidak berbasis pada *sensible social interaction* menghadirkan permasalahan tentang kekebasan dalam pola komunikasi digital. Persoalan ini mengemuka utamanya dalam lalu lintas berita dan informasi di dalam media sosial.

Permasalahan yang diobservasi dalam penelitian ini berpusat pada bagaimana dan mengapa kekebasan ini muncul dalam komunikasi digital? Ekplorasi dilakukan terhadap empat jenis group yang kerap dibuat dalam aplikasi WhatsApp dengan menerapkan metode *cyber-ethnography*. Hasil penelitian menunjukkan munculnya beragam kekebasan dalam bentuk dominasi informasi, pembelokan fakta, pembiasan informasi, serta sikap dan perilaku peminggiran pihak lain sebagai ancaman terhadap upaya untuk membangun kualitas komunikasi yang baik dalam interaksi sosial.

## Mengeksplorasi Paradoks Privasi Gen-Z dalam Personalisasi Iklan di Media Digital

Syaifa Tania

Pengungkapan informasi personal dalam praktik akses media digital merupakan sebuah keniscayaan. Dalam bertransaksi digital, pengguna media diwajibkan mengisi sejumlah data diri sebagai basis informasi sebagai bagian dari keseluruhan proses transaksi. Di sisi lain, kehadiran media sosial juga menjadi sumber harta karun informasi untuk melakukan pemetaan profil pengguna media digital seiring kebiasaan pengguna mengunggah informasi kesehariannya secara sukarela. Kondisi ini mengantarkan pada diskusi paradoks privasi yang menempatkan pengguna media digital pada posisi dilematis antara kemudahan memperoleh informasi penawaran komersial dalam bentuk iklan digital yang relevan dengan minatnya dan kesadaran bahwa relevansi penawaran tersebut hadir sebagai wujud hasil olah data informasi pribadi yang dibagikan pengguna saat mengakses media digital.

Studi ini berupaya untuk mengeksplorasi dinamika paradoks privasi yang dihadapi generasi Z dalam praktik personalisasi iklan di media digital. Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh bersisian dengan eksistensi teknologi komunikasi digital, generasi Z menjadi *the true digital natives* yang berada dalam ekosistem digital mapan. Karakteristik ini kontras berbeda dengan seluruh generasi sebelumnya yang cenderung merupakan *digital immigrant* atau *the first digital natives* yang sempat merasakan transisi teknologi analog ke digital. *Personalization-privacy paradox* mendasarkan gagasannya pada kompleksitas dilema yang dihadapi pengguna media digital dalam menikmati kemudahan informasi komersial yang telah dipersonalisasi dan risiko pengungkapan informasi diri. Kompleksitas ini nyata dialami oleh mayoritas responden dalam studi ini yang kemudian memposisikan dirinya sebagai *the privacy pragmatists* yang memperhitungkan rasio potensi keuntungan yang diterima dan risiko dari aktivitas berbagi informasi dirinya tersebut. Praktik menakar rasio ini selaras dengan gagasan *privacy calculus* yang melihat informasi diri sebagai sebuah komoditas ekonomi yang dapat dipertukarkan sehingga pengguna media digital dapat melakukan kalkulasi risiko dan keuntungan (*cost-benefit analysis*). Lebih lanjut, praktik menakar rasio dipengaruhi pula oleh faktor situasional (*context-based perspective*) yang diterjemahkan pada keyakinan generasi Z bahwa selama sebuah aplikasi digital banyak digunakan masyarakat maka mereka meyakini bahwa aplikasi tersebut aman.

Pada akhirnya, paradoks privasi dan personalisasi iklan di media digital merupakan kondisi nyata yang dihadapi oleh generasi Z. Upaya mencari jalan tengah untuk menemukan titik imbang atas dilema tersebut dapat diawali dengan memberikan batasan jelas atas jenis informasi diri yang dapat, perlu, dan penting untuk dibagikan. Pada tingkat lebih tinggi, upaya untuk menemukan ruang dengan kuasa imbang antara pengguna dan *brand*, penyedia layanan komunikasi, serta *platform* media digital diharapkan mampu menjadi rekomendasi langkah untuk mengurai kompleksitas paradoks privasi di media digital.

## Redefinisi Keintiman Di Balik Kisah Extradadic Kaum Urban Indonesia

Dian Arymami

Cinta, relasi dan seks merupakan persoalan yang kompleks. Persoalan yang dianggap personal ini senantiasa berkelindan bersama dinamika sosial dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang menyelami kompleksitas relasi keintiman di luar ‘pasangan sah’. Membongkar kisah keintiman melalui sudut pandang pelaku di berbagai kota Indonesia yang menjalin lebih dari satu relasi keintiman secara diam-diam. Meminjam kacamata Deleuze, menelusuri pengalaman para istri yang memiliki berbagai pasangan lelaki, para suami yang memiliki berbagai pasangan, maupun para perempuan dan laki-laki yang berhubungan dengan pasangan orang lain.

Pada tataran praktis fenomena ini tidak hanya menjadi pemberontakan struktur dan tatanan sosial masyarakat, namun sebentuk hasil perubahan substantif ide relasi keintiman antar manusia; kepingan wajah keintiman masyarakat urban Indonesia.

Pemadatan penelitian mengenai relasi extradadic melalui subjektivitas pelaku dalam buku ini disusun menjadi 4 bagian utama.

**Bagian 1. Cinta dan Laku Asmara** memaparkan mengenai ide dan konsep dasar keintiman, studi-studi keintiman, serta keintiman sebagai sebuah praktik kultural. Relasi keintiman berjalan seiring dengan pengembangan ide, sistem sosial dan budaya, yang meletakan relasi keintiman sebagai sebuah hal yang senantiasa mengalami pergeseran.

**Bagian 2. Subyektifitas Keintiman dan Masyarakat** memaparkan mengenai interkoneksi diri dengan masyarakat. Cara pandang dan perilaku manusia tidak terlepas dari dinamika sosial yang melingkupinya, demikian persoalan subjektivitas keintiman tidak dapat dilepaskan dari konteks perkembangan masyarakat kekinian. Jembatan antara ranah personal dan sosial didekati dengan pendekatan psikososial. Pemikiran Deleuze dan Guattari dikenalkan sebagai alternatif pembacaan praktik relasi keintiman extradadic.

**Bagian 3. Praktik Relasi Extradadic** mengeksplorasi pengalaman pelaku relasi extradadic untuk mengungkapkan bagaimana kompleksitas relasi extradadic dalam lanskap relasi romantik selama ini dilakukan. Paparan pengalaman ini bergerak dari dinamika narasi praktik menuju narasi psikis para pelaku relasi extradadic. Pengalaman praktik relasi yang memaksa dekonstruksi struktur makna relasi dan diri dalam menciptakan bentuk ‘baru’ keintiman.

**Bagian 4. Membongkar Keintiman** mengulas lebih lanjut praktik relasi keintiman extradadic pada tataran dekonstruksi dan rekonstruksi diri. Pembahasan dalam bagian ini memberikan tekanan terhadap tahapan dekonstruksi nilai personal dan personalitas yang berlangsung secara bawah sadar. Dalam proses ini, konteks sosial dan budaya melingkupi bergeraknya arus hasrat yang berperan dalam mendorong subyek merekonstruksi diri; mengakibatkan proses yang berbeda antar gender. Lebih lanjut bagian ini menggambarkan bentuk relasi keintiman ‘baru’ yang berkembang di tengah praktik relasi extradadic.

Redefinisi keintiman melalui relasi extradyadic merupakan praktik relasi yang bersifat substitutif, tidak historis, dan tidak representatif. Fenomena relasi extradyadic telah menjadi bagian dari perkembangan peradaban deteritorialisasi. Pergeseran keintiman dalam relasi romantik yang dapat dibaca melalui relasi extradyadic mengerucut pada sebentuk relasi singular, dimana konsep cinta sebagai penyatuhan dua pihak tidak lagi dominan, namun bergeser pada konsep cinta yang utuh dalam masing-masing individu. Praktik relasi keintiman hubungan romantik menjadi relasi dua orang yang masing-masing bermonolog dengan makna dan rasa sendiri. Pada tataran yang lebih lanjut, ada pembebasan manusia dari jejaring struktur tidak menggambarkan lebih dari nihilisme sebagai titik sentral eksistensi manusia yang dipenuhi oleh multiplitas makna tanpa arti.

## **Komunikasi, Gender, dan Inklusi Sosial: Teori, Kajian, Metode Riset**

Novi Kurnia

Kesetaraan gender dan inklusi sosial (GIS) merupakan pendekatan teoritis maupun praktis dalam menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak sama dalam menjalani segala aspek kehidupan termasuk dalam berkomunikasi. Apalagi komunikasi merupakan faktor pembentuk kepribadian dan kebudayaan, juga memediasi dan atau melegitimasi berbagai konstruksi yang tumbuh dalam masyarakat.

Perbedaan jenis kelamin dan gender serta identitas kultural lainnya sedikit banyaknya dipengaruhi oleh beragam bentuk komunikasi baik dalam konteks komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, maupun dalam konteks komunikasi termediasi melalui media massa maupun media baru. Beragam bentuk komunikasi ini memegang peranan penting dalam meneguhkan identitas gender yang stereotip atau menawarkan representasi identitas baru.

Buku berjudul *Komunikasi, Gender, dan Inklusi Sosial: Teori, Kajian, dan Metode Riset* ini akan mengajak pembacanya untuk mempelajari dan mengkritisi konsep-konsep terkait gender dan inklusi sosial agar bisa memahami relasi antara kelompok dengan identitas yang berbeda dalam berbagai konteks komunikasi, memahami berbagai pertarungan wacana identitas yang berbeda di media dan ruang publik.

Buku ini berargumen bahwa ilmuwan, peneliti dan pembelajar komunikasi perlu mempertajam penggunaan perspektif gender dan inklusi sosial dalam membaca fenomena komunikasi. Hal ini dikarenakan kesetaraan gender dan inklusi sosial tidak hanya merupakan persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat, namun juga dalam berkomunikasi. Perempuan dan kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas, LGBTQ, maupun kelompok marginal lainnya masih terpinggirkan baik dalam berbagai konteks komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, maupun dalam konteks komunikasi termediasi melalui media massa maupun media baru.

Kontribusi buku ini ditunjukkan dari lima (5) komponen materi yang dikembangkan dalam sebelas (11) bab yang tak hanya berisikan teori tapi juga tinjauan pustaka yang relevan dengan kajian komunikasi, gender dan inklusi sosial. Pertama, menguasai landasan filosofis dan teoritis konseptual tentang perspektif gender dan inklusi sosial dalam ilmu komunikasi serta memiliki tanggung jawab dan etika profesional dalam membahas isu-isu tentang komunikasi, gender dan inklusi sosial. Kedua, menguasai pengetahuan mengenai teori-teori komunikasi tentang gender dan inklusi sosial. Ketiga, memiliki keterampilan umum dalam mengidentifikasi dan memformulasikan permasalahan komunikasi, gender dan inklusi sosial. Keempat, memiliki keterampilan khusus memahami fenomena komunikasi dengan perspektif gender dan inklusi sosial. Kelima, mampu mengembangkan diri dengan merancang dan melaksanakan penelitian tentang komunikasi dengan mengaplikasikan perspektif gender dan inklusi sosial.

Penulisan buku ini disusun berdasarkan metode desk-review yang tak hanya melibatkan pengumpulan data melalui tinjauan pustaka terhadap publikasi akademis (buku, artikel jurnal, maupun laporan penelitian) dengan tema yang relevan, melainkan juga melihat berbagai teks komunikasi, regulasi komunikasi, dan dokumen lain yang relevan.

Dalam pustaka yang relatif terbatas mengenai komunikasi, gender dan inklusi sosial, buku ini berkontribusi mengisi celah pustaka komunikasi Indonesia yang lebih banyak memfokuskan pada komunikasi dan gender tapi belum melihat persoalan yang dihadapi kelompok rentan lainnya: penyandang disabilitas, LGBT, maupun kelompok minoritas lainnya.

Dengan begitu, sumbangan terbesar buku ini adalah menawarkan perspektif gender dan inklusi sosial sebagai salah satu alat analisis yang penting dalam kajian komunikasi agar perkembangan ilmu komunikasi semakin kritis dan menjawab persoalan sosial di masa mendatang. Oleh karena itu, target pembaca buku ini adalah ilmuwan, peneliti dan pembelajar komunikasi yang tertarik untuk membongkar berbagai persoalan ketidakadilan gender dan identitas kultural lainnya dalam berbagai fenomena komunikasi.

## **Diri yang Bermain Peran: *Idol-roleplaying* dan Identitas Diri Penggemar K-Pop dalam Twitter**

Mashita Phitaloka Frandia

Fenomena *idol-roleplaying* dalam komunitas penggemar K-pop merupakan hal yang marak ditemukan pada media sosial Twitter di kalangan kaum muda Indonesia. *Idol-roleplaying* merujuk pada aktivitas di mana pengguna atau *role-players* membuat akun dengan nama dan identitas idola K-pop favorit mereka. Fenomena ini memicu pertanyaan terkait identitas diri yang ditampilkan di bawah selubung identitas idola, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama *role-players* menggunakan akun roleplay tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini signifikan dilakukan untuk mempelajari fenomena *idol-roleplaying* dan identitas diri para penggemar, utamanya dalam konteks budaya kaum muda Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode etnografi virtual, dengan melibatkan delapan *role-players* sebagai informan. Temuan penelitian ini menyorot performativitas dan permainan identitas yang dilakukan oleh para *role-players*.

## **Politik Kebijakan Media di Indonesia Pasca-Reformasi (1998-2022)**

Rahayu

Buku ini menjelaskan politik kebijakan media di Indonesia pasca-reformasi, dari mulai tahun 1998 s.d. 2022. Penulis berargumen bahwa proses kebijakan media jauh dari kata netral, proses ini diliputi oleh persaingan kepentingan dan negosiasi politis antar berbagai kelompok kepentingan. Kebijakan yang lahir dari hasil negosiasi tidak berpihak pada kepentingan publik dan menjadi penghambat utama tercapainya cita-cita reformasi media. Buku ini mengandung dua unsur paparan, pertama, pembahasan teori atau konsep-konsep yang menjelaskan kerangka ideal kebijakan media dan kasus-kasus yang mengungkap atau merefleksi politik kebijakan media yang pernah terjadi.

Dalam penyusunan buku ini, penulis melakukan studi literatur, analisis dokumen, termasuk dokumen hukum, analisis berita, dan wawancara ke sejumlah pemangku kepentingan yang relevan. Sebagian besar dari isi buku ini diambil dari disertasi penulis (2018) dan ditambah dengan data yang lebih up to date.

Buku ini memuat sepuluh bab yang meliputi: (1) pengantar kebijakan media, (2) reformasi dan perubahan substansi kebijakan, (3) relasi politik aktor berkepentingan, (4) proses kebijakan dan intervensi politik, (5) politisasi independensi regulator media, (6) politik digitalisasi penyiaran, (7) bias kebijakan kepemilikan media, (8) kebijakan konten dan jaminan diversitas media, (9) media layanan publik, dan (10) pergeseran paradigma kebijakan, ke mana arah kita.

Pada bab 1 hingga bab 4, penulis memberikan penjelasan tentang teori dan konsep tentang karakteristik kebijakan media, keterkaitan antara konteks dengan kebijakan media, aktor-aktor yang berkepentingan atas kebijakan, serta tahapan proses kebijakan dan bentuk-bentuk intervensi terhadapnya. Penjelasan di sini termasuk penulis mengontraskan antara penjelasan teori dengan praktik-praktik kebijakan di Indonesia.

Pada bab 5 hingga bab 9, penulis memaparkan beberapa kasus yang menunjukkan politik kebijakan media di Indonesia. Kasus pertama yang diungkap adalah independensi regulator media, yang mengalami degradasi kewenangan akibat kebijakan yang tidak berpihak pada regulator ini. Pemerintah pada akhirnya menjadi regulator utama yang mendominasi pengaturan media. Kasus kedua adalah digitalisasi penyiaran, yang menunjukkan betapa pemerintah (dalam hal ini kominfo) terkesan memaksakan kehendak dalam memberlakukan kebijakan digitalisasi dan ASO, meski target kebijakan belum sepenuhnya siap mengadopsinya. Kondisi lapangan pada akhirnya membuka mata Kominfo untuk menunda ASO di sejumlah lokasi. Kasus ketiga adalah kebijakan kepemilikan media. Kebijakan kepemilikan yang bias pada media-media besar tidak mengubah struktur pasar media di

Indonesia. Kepemilikan oleh orang lokal dan pengelolaan media oleh kaum marginal tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya dalam kebijakan.

Kasus keempat adalah kebijakan konten dan diversitas media. Dalam kasus ini penulis menunjukkan liberalisasi media telah mendorong lahirnya media-media di Indonesia. Namun banyaknya media dan konten yang diproduksi tidak berbanding lurus dengan keragaman sudut pandang atau perspektif. Kebijakan media yang memberikan jaminan diversitas konten telah dimanipulasi oleh kelompok-kelompok kapitalis media. Kasus kelima tentang media layanan publik. Meski lembaga penyiaran publik pada awalnya digadang-gadang mampu

melayani kebutuhan publik akan penyiaran dan menjadi penyeimbang media komersial, namun perkembangannya terhambat karena kebijakan yang kurang jelas.

Buku ini ditutup dengan pembahasan tentang perubahan lingkungan kebijakan dan pergeseran paradigma kebijakan. Di sini penulis mendiskusikan posisi dan arah ke depan kebijakan media di Indonesia.

## Komunikasi Autopoiesis

Hermin Indah Wahyuni

Buku komunikasi autopoiesis dirancang sebagai upaya untuk menawarkan perspektif *grand theory* sistem sosial yang dominan yaitu pendekatan sistem paling akhir dalam ilmu sosial yang ditawarkan oleh Niklas Luhmann, seorang sosiolog Jerman klasik modern. Hal ini menjadi penting terkait dengan karakter ilmu komunikasi yang merupakan sebuah disiplin yang tidak disiplin dan diwarnai oleh banyak akar keilmuan. Karena merupakan ilmu yang bersifat terbuka maka para scholar dan pengkaji ilmu komunikasi perlu terus mencari, mempertanyakan, dan mencari terobosan-terobosan pemikiran yang menjadikan ilmu ini semakin relevan dan kuat.

Buku ini terdiri dari 5 bab yang merupakan upaya untuk mengenalkan pokok-pokok pemikiran Niklas Luhmann yang ditarik pada konteks ilmu komunikasi. Pada bagian pendahuluan dideskripsikan secara singkat mengenai siapa Niklas Luhmann dan logika besar *General System theory* Niklas Luhmann. Pada bagian ini juga diuraikan prinsip-prinsip yang akan menjadi pintu masuk mengapa penting mengintegrasikan pemikiran Luhmann bagi kajian komunikasi. Pada bab 2 diuraikan mengenai komunikasi sebagai sistem, yang menguraikan cara pandang baru dalam mengurai komunikasi bukan dalam pandang cara transmisi, tetapi lebih pada mengenalkan cara pandang sistemik yang menempatkan komunikasi sebagai input dalam perkembangan sistem sosial dalam masyarakat modern. Secara spesifik komunikasi sebagai sistem yang terdiri dari 3 elemen seleksi informasi, seleksi ujaran, dan seleksi pemahaman. Dan yang menarik, Luhmann memberikan penekanan bahwa tujuan berkomunikasi bukan hanya untuk mencapai kesepakatan, tetapi untuk merangsang sistem sosial untuk berubah dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Satu perspektif yang akan sangat berkontribusi pada perkembangan ilmu komunikasi. Bab 3 membahas mengenai komunikasi autopoiesis. Konsep Autopoiesis menjadi kunci dalam pemikiran *grand theory* sistem sosial Niklas Luhmann. Bab ini membahas mengenai konsep autopoiesis, logika dasar konsep autopoiesis, dan bagaimana pemanfaatan logika autopoiesis dalam pemaknaan dan interpretasinya pada fenomena-fenomena ilmu sosial. Saat konsep autopoiesis dipadukan dengan konsep komunikasi, maka pembaca diharapkan dapat mendapat pemahaman mengenai konsep komunikasi autopoiesis yang menjadi tawaran kebaruan dalam mengeksplorasi fenomena komunikasi. Bab 4 membahas mengenai refleksi komunikasi autopoiesis yang mengemuka. Setidaknya terdapat dua karya yang mengemuka dan sangat relevan dalam kajian komunikasi. Pertama pembahasan mengenai proses konstruksi realitas oleh media. Karya ini membahas mengenai bagaimana media menjadi sistem yang memiliki kode spesifiknya sendiri dan sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Sebuah refleksi yang akan banyak bermanfaat bagi para pembelajar komunikasi dan media. Selanjutnya akan dibahas mengenai komunikasi ekologi, yang juga ditandai oleh pendekatan sistemik dalam membaca tantangan rusaknya lingkungan oleh masyarakat modern. Bab 5 adalah bagian akhir dari buku ini merupakan post script dan refleksi makna penting pendekatan komunikasi autopoiesis dan kontribusinya dalam pertumbuhan ilmu komunikasi. Karakter ilmu komunikasi yang senantiasa dinamis dan terus memberontak membutuhkan perspektif baru yang akan mendorong eksplorasi pada bidang kajian baru. Komunikasi autopoiesis merupakan sebuah tawaran cara pendekatan yang diharapkan mampu melahirkan kebaruan cara pandang dalam bidang kajian komunikasi

Demikianlah, buku komunikasi autopoiesis ini diharapkan dapat menginspirasi pembelajar komunikasi untuk semakin mempertajam kemampuan para periset komunikasi dalam mengeksplorasi berbagai fenomena yang ada dalam masyarakat modern. Karakter sistem theory

yang bersifat komprehensif sekaligus mendekati permasalahan secara utuh merupakan satu kekuatan yang membedakan dari pendekatan lainnya. Karakter komunikasi autopoesis yang menempatkan komunikasi sebagai penentu dalam mencapai solusi dalam problem masyarakat modern memiliki kekuatan reflektif yang dapat ditawarkan oleh pengkaji media dan komunikasi.

**Sinopsis Menilik Komik dalam Kacamata Masyarakat Simulasi Baudrillard:  
Analisis Semiotika “Shingeki no Kyoujin”**

Ardian Indro Yuwono

Penggunaan internet oleh masyarakat modern telah memindahkan aktivitas bersosial manusia ke ruang maya. Internet memudahkan individu untuk berkumpul serta berserikat dengan kawan sehobi ataupun sepemikiran. Tidak hanya memperpendek jarak fisik antar individu, manusia juga mampu membentuk citra baru sehingga menciptakan realitas dunia mayanya yang lantas mengaburkan batas nyata-maya. Fenomena dewasa ini selaras dengan konsep “hiperrealitas” yang dikemukakan Jean Baudrillard karena telah tercipta model nyata tanpa asal-muasal dan tumpah-tindih tanda dalam bermacam simulasi (*simulacra*) yang masyarakat lihat sebagai “kenyataan” dibanding realitas itu sendiri.

Penulis melihat adanya kesamaan antara kehidupan masyarakat modern yang terkungkung kecanggihan teknologi ini dengan masyarakat di balik tembok dalam manga *best seller* dunia, *Shingeki no Kyojin* karangan Hajime Isayama. Berbekal analisis semiotika Roland Barthes, tulisan ini mengkaji teks dalam tahap denotatif dan konotatif.

Dalam *Shingeki no Kyojin*, terdapat bangsa Eldia menjadi adidaya dengan kekuatan titan sehingga menindas bangsa-bangsa lain seperti Marley. Kemudian, sesama bangsa Eldia saling berperang dengan kekuatan titan masing-masing. Keputusan Raja Karl Fritz untuk menarik bangsa Eldia ke Pulau Paradis serta menemboki wilayah kekuasaan Eldia terakhir mengubah percaturan dunia. Cuci otak yang dilakukan Karl Fritz memanfaatkan kekuatan Titan Pendiri dilengkapi propaganda dan represi yang dilakukan oleh kerajaan lantas menciptakan realitas semu dalam kehidupan di balik tembok seperti miskonsepsi bahwa mereka adalah umat manusia terakhir yang harus berlindung dari titan pemangsa manusia.

Pada saat bersamaan, bangsa Marley mengambil alih kuasa dengan memanfaatkan kekuatan titan yang tertinggal di wilayah mereka. Bangsa Marley melakukan segregasi serta propaganda terhadap keturunan Eldia yang tersisa di wilayah mereka—sementara mereka juga direkrut menjadi tentara. Keturunan Eldia yang tersisa dibuat membenci darah dan saudaranya sendiri sebagaimana iblis yang harus dilawan.

Penulis memandang bahwa masyarakat kapital modern ini tak begitu berbeda jauh dengan masyarakat Pulau Paradis. Keduanya adalah masyarakat *simulacra* yang terjebak hiperrealitas. Merujuk pada Baudrillard, kemiripan ini didasari pada terjadinya sengkarut kode, simbol, dan makna sehingga masyarakat melihat jebakan simulasi, citra nirasar-usul, sebagai sesuatu yang dapat diterima seperti apa yang disuguhkan sebagai realitas. Teknologi media menjadi biang kerok penipuan ini baik media massa maupun baru (dalam hal ini internet).

Media memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk citraan (terutama komersil) sebuah benda sehingga menyimulasikan hiperrealitas di atas realitas sesungguhnya dalam masyarakat kapital. Pembentukan citraan ini juga dapat dilekatkan pada individu maupun kelompok masyarakat sehingga terjadi simulasi.

Kehidupan di “balik tembok” juga terjadi di kehidupan dunia maya masyarakat kapital dengan makin meruncingnya konflik identitas sebab algoritma internet yang memudahkan individu dengan pemikiran, minat, dan ideologi yang sama berkumpul dalam satu wadah.

Pengelompokan ini dimanfaatkan oleh pihak berkepentingan untuk melancarkan praktik politiknya. Sayang, hal ini kerap kali tak disadari oleh anggota kelompok tersebut.

Sengkarut makna yang disebabkan simulasi media dalam masyarakat kapital sangat mirip dengan kehidupan di balik tembok Pulau Paradis. Layaknya horor teror titan, media mengkondisikan manusia dalam simulasi sekaligus menakut-nakuti manusia dengan segala pembingkaianya terhadap realitas. Praktisnya teknologi menciptakan ketergantungan sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa sedang dikontrol simulasi-simulasi. Masyarakat harus dibangunkan dari keadaan ini mengingat perkembangan teknologi makin membawa masyarakat ke dunia maya.

**Informasi Kesehatan di Media Digital**  
**(Studi pada Konten Media Digital tentang Stunting di Indonesia)**

Lidwina Mutia Sadasri

Stunting telah menjadi fokus utama dalam isu kesehatan publik dan ditunjukkan melalui peningkatan liputan berita. Pada berita yang diunggah pada 11 Januari 2022 di situs berita Kompas.com, dinyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Hal tersebut berarti target turun dari angka stunting yang pada tahun 2021 masih berada pada angka 24,4%. Pada artikel berita tersebut juga dinyatakan bahwa Jokowi menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pelaksana percepatan penurunan angka stunting nasional.

Berita terkini yang dilansir CNN Indonesia pada tanggal 24 Maret 2022, Jokowi kembali menyerukan permintaan kepada Pemda untuk bekerja keras menurunkan angka stunting. Ia menyampaikan instruksi tersebut saat kunjungan kerja di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Dua artikel berita tersebut menunjukkan potensi pemberitaan yang mampu menyampaikan informasi pada publik dan dapat membantu pemahaman publik terkait isu stunting dengan cara melaporkan berita secara selektif.

Praktik *framing* yang dilakukan oleh media komunikasi, secara khusus saat ini media digital yang makin gencar diakses pengguna Indonesia, pada muaranya dapat memberi pengaruh pada dukungan kebijakan dan juga stigma yang muncul dengan adanya pemberitaan tersebut. Terlebih lagi, berita dikonsumsi pada media sosial yang sarat dengan komentar pada artikel berita. Interaksi yang muncul dalam komentar artikel berita maupun video pemberitaan yang diunggah menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk menggali pemahaman publik akan isu tersebut.

Peran media menjadi sangat signifikan dalam pengarusutamaan isu stunting yang dapat dilihat melalui perspektif komunikasi kesehatan. Terlebih lagi, Kementerian Sekretariat Negara juga sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pemetaan media akan isu tersebut. Hal tersebut ditunjukkan melalui laporan Media Monitoring tentang stunting pada Bulan Juli tahun 2020 (TP2AK, 2020). Dalam laporan tersebut, Kementerian Sekretariat Negara RI memaparkan tentang cuplikan berita yang meliput tentang isu stunting dan menghasilkan temuan bahwa selama periode Bulan Juli 2020, isu mengenai stunting tidak terlalu mendominasi kolom pemberitaan media karena “kalah” dengan isu pandemi Covid-19. Sebanyak 104 artikel pemberitaan tentang isu stunting dengan 77 artikel mengulas level nasional dan 26 artikel mengulas di level daerah. Totality pemberitaan menunjukkan 60 artikel dengan nada berita positif, 29 bersifat netral dan 15 artikel bernada negatif.

Meski demikian, salah satu hal yang muncul dan menjadi kegelisahan adalah adanya gap antara informasi yang disampaikan ke publik melalui media dengan pemahaman publik yang juga ditunjukkan melalui pesan yang ada di media sosial. Gap pemahaman tersebut yang kemudian menjadi objek kajian yang akan diteliti melalui interaksi yang muncul dalam artikel dengan pisau analisis konsep komunikasi kesehatan, media digital, serta mainstreaming isu.

Penelitian ini menerapkan studi atas konten dengan terlebih dahulu menyeleksi artikel atau unggahan di media digital tentang stunting, mengkajinya menggunakan aspek pemahaman publik

tentang isu stunting, framing, serta aspek dalam media sebagai platform yang mewadahi konten stunting. Secara teknis, pengumpulan data di media akan dilakukan dengan dasar 10 besar portal berita menurut Alexa tahun 2021. Isu stunting pada portal berita tersebut dibatasi pada periode bulan Januari – Juni 2022. Konten yang dihimpun dari sejumlah portal berita mengindikasikan bahwa tidak semua konten relevan dengan stunting. Pada Pikiran-rakyat.com, berita berisi data jumlah anak stunting di Indonesia dan langkah yang dilakukan pemerintah terkait turunnya angka stunting. Sedangkan pada Liputan6.com, terdapat 92 berita dengan 80 di antaranya relevan. Dari 12 berita yang tidak relevan dengan topik stunting umumnya karena sekadar disebutkan sebagai bagian dari pidato, kebijakan, atau kunjungan pemerintah yang tidak berkaitan dengan isu stunting. Beberapa berita lain yang tidak relevan karena berisi informasi tentang event stunting sebagai tema. Didalamnya juga terdapat berita yang merupakan hasil kurasi atau potongan dari berita serupa. Pada Okezone.com, terdapat 132 artikel berita dengan keyword stunting. Sejumlah 74 berita yang relevan dan 58 berita yang tidak relevan. Mayoritas berita melaporkan terkait tips dan trik mencegah stunting, program pemerintah terkait stunting, dan perkembangan stunting di daerah timur (khususnya NTT). Beberapa diantaranya tidak relevan karena tidak memberikan catatan terkait stunting sama sekali. Pada Detik.com, Terdapat 256 berita dengan keyword stunting. Berita yang tidak relevan umumnya melaporkan isi pidato dengan menyebutkan kata stunting atau kebijakan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan stunting, misal minyak goreng. Pada Merdeka.com, terdapat 103 berita dengan isu stunting. Mayoritas berita tidak relevan. Yang relevan umumnya tentang kebijakan pemerintah secara umum terkait stunting, untuk kasus stunting secara detail kurang diberitakan. Pada Jawapos.com, terdapat 317 berita dengan keyword stunting. Mayoritas berita relevan karena Jawapos banyak memberitakan kasus stunting di setiap daerah dari Jawa sampai luar Jawa. Kebijakan pemerintah secara umum tentang stunting jarang diberitakan.

## **Media dalam Seni Kontemporer**

Irham Nur Anshari

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi minimnya kajian seputar seni kontemporer dalam kajian media secara umum. Dalam tradisi ilmu komunikasi, bahkan seni kontemporer kerap tidak dipandang sebagai sebuah media. Padahal, tradisi klasik seni dari rupa, musik, tari, tiba-tiba bertemu dengan beragam temuan teknologi baru dalam berekspresi. Generasi seniman yang lebih muda lebih latah berekspresi melalui perangkat teknologi, mulai dari memotret, membuat film, mendesain, hingga membuat pameran secara daring. Seni kontemporer menawarkan bentuk-bentuk seni baru yang tidak sekedar melestarikan seni tradisional yang dianggap tidak lagi memiliki gagasan yang kontekstual. Di sisi lain, ia menolak sentralitas “barat” dalam seni modern dengan menawarkan perspektif lokal hingga poskolonial. Karya-karya dalam seni kontemporer menekankan persoalan hari ini, personal, dalam medium-medium yang juga diakrabi seniman dalam kehidupan sehari-hari. Pilihan medium inilah yang memunculkan beragam media baru dalam sejarah seni, mulai dari foto, video, instalasi hingga internet. Luaran dari penelitian ini adalah buku yang membahas media dalam seni kontemporer dalam beberapa bagian. Bagian pertama terkait dengan pengantar dan pengenalan konteks akan membahas: sejarah seni kontemporer (bab 2), pameran & kuratorial (bab 3), industri & museum (bab 4). Bagian berikutnya akan masuk secara khusus pada pembahasan media dalam tiga bentuk seni kontemporer, yakni: seni foto (bab 5), seni video (bab 6), dan seni internet (bab 7). Terakhir, buku ini akan ditutup dengan membahas praktik bermedia lainnya sebagai penunjang praktik seni kontemporer, yakni seputar penulisan seni kontemporer (bab 8). Harapannya, luaran penelitian ini dapat mendokumentasikan beberapa data yang teoritis, konseptual, serta informatif dari berbagai sumber guna meneropong persoalan media dalam seni kontemporer.

**Kata kunci:** Media, Seni Kontemporer, Seni Video, Seni Fotografi, Seni Internet

***The Opportunity and Challenge of Higher Education  
for Creating Talent Management Ecosystem of Research and Innovation in Indonesia***

Acniah Damayanti, Lisa Lindawati, Dinda Hermiranti Putri, Nadia Intan Fajarlie

In the light of demographic dividend, Indonesia is still left behind in terms of innovation capacity, according to international indexes. The abundant provision of talents in research and innovation will not be well-capitalized if there is an absence of systematic talent management. Previous research suggested that post-middle education or higher education have strategic roles in research and innovation talent construction. This study examined opportunities and challenges of higher education institutions in Indonesia in creating a talent management ecosystem of research and innovation. This study used desk study, focus group discussion and in-depth interview, to entangled the opportunities and challenges of higher education institution from the perspectives of researchers and students in higher education institutions as well as Indonesian law-maker on the matter at hand.

This study found that besides a large number of potential talents, Indonesia already had a roadmap for research talent management and policy to support stronger relation between higher education and industry, which is potential to support research talent capitalization. In the higher education end, it has already provided curriculum to encourage research and innovation as well as many formal and informal mentorship programs which are believed to also offer opportunities to strengthen the function of higher education institutions as one of the agents in the talent management ecosystem. Some challenges however still hinder higher education institutions in doing so. Poor institutionalization of talent management attempts, the lack of recognition and appreciation for researchers, the sense of inferiority among scientists, the lack of policy support for researchers to express their freedom in leveraging their expertise, ineffective research capitalization, complicated research bureaucracy, the lack of cross-disciplinary networks, and the absence of integrated research database still need to be addressed to optimize the role of higher education in supporting the research and innovation talent management ecosystem in Indonesia.

This research proposed four aspects that needed to improve to create a good talent management ecosystem of research and innovation within higher education ecosystem. Firstly, improving research governance so as researchers were not trapped in tangled bureaucracy. Secondly, involving organizations and scientist and professor association in managing research and innovation talents. Thirdly, disseminating research findings and promote research activities to attracts students and people in general. Fourthly, providing space and accommodations for students to conduct research. And lastly, providing an integrated research database. In doing so, Indonesian policy makers along with higher education institutions need to initiate a strategic roadmap not only to address educational content innovation, but also to encourage educational technology and organizational innovation in shaping a holistic talent management ecosystem.

## **Youth and Privacy: Giving Meaning and Negotiating Privacy in Social Commerce**

Dewa Ayu Diah Agendari

As youth has been experiencing using social media for years, social commerce easily finds its way to youth lives. Social commerce offers attractiveness for both the users and sellers. It is simple to navigate, attached with the existing social media apps and therefore do not need additional space and account which may become barriers in accessing the platforms, and provide personalization by tracing and analyzing users' data.

Nevertheless, the rise of social commerce exacerbate the potential arbitrary use of users' data, especially youth. Extensive body of research argues that youth possess little understanding towards the imperative of protecting the privacy online. In addition, despite perceive privacy as important, youth hardly take any action to protect their privacy. Youth easily trade personal information for convenience without the ability to project the risks and consequences. At the other sides of the spectrum, scholars also claims that privacy paradox does not exist because attitudes and behaviors towards privacy is incomparable. Youth may have opinion towards privacy and do not act according to their opinion because behavior is really context-dependent whereas attitude covers broader value.

This research aims to fill in the gap between the discussion of the privacy paradox, especially in the context of social commerce. Rather than discussing whether youth resembles the privacy paradox or not, this research looks at how youth give meaning towards privacy and what are the reasons they do so. To put the research in context, this study specifically examines the social commerce landscape.

On interpreting privacy, in general participants know that keeping personal data private is important and over exposing personal data on social media and commerce can be risky. However, they are not sure if revealing certain data in their social commerce profile may bring disadvantages, especially because they trust the social media giant(s) and have never encountered bad experiences. Participants also trust the platforms in handling their data.

When it comes to attitudes toward privacy, all participant agree that privacy and control towards privacy is important. Nevertheless, the degree of importance is hardly to be defined as important lies in wide spectrum. Participants also define risks and harmful as a direct treat which take something tangible over them. However, none of the participants mentioned about the arbitrary use of data by social commerce platforms as risks and disadvantages.

Participants show that despite they value privacy and know that they have control over the privacy setting, they hardly change the default privacy setting. There are various reasons for not changing the privacy setting, such as the lack of concern towards the default privacy setting, the urge to use the apps rather than spending time checking the privacy setting, let alone read the privacy policy. There are several reasons which underlies the actions, such as convenience, trust, the availability of their data, the idea of risks and harmful consequences, and different concerns towards privacy and personal information.

The finding of this study is expected to contribute to the discussion of social commerce, youth, and privacy. In addition, although this research is not intended to generalize youth in Indonesia, but could be used as a starting point for the implementation of digital literacy campaign. Indonesia

has just ratified the PDP Law. However, one of the main critics of PDP Law is the notion of self-management privacy model. Modelling after GDPR, the law empower users with more control towards their privacy in online world. This model assumes that users are fully aware and comprehend about their behavior online. Nevertheless, the characteristics of the internet makes it impossible to being fully conscious about our actions. Therefore, solely relying on self-management privacy model may only benefit the platform.

**HIBAH**  
**PENELITIAN DAN PUBLIKASI**  
**DEPARTEMEN ILMU**  
**HUBUNGAN**  
**INTERNASIONAL**

**Research  
Days**  
2022

## I-SAY: Illuminate Sustainability Axis in Yogyakarta

Suci Lestari Yuana

I-SAY aims at 'Excavating the Future' (Hajer, et al, 2020) of sustainability in Yogyakarta. This means to recoup and reassess circular practices (especially in waste, construction and urban social living) lost to modernization but living as part of the Javanese heritage, to demonstrate how bridging past and present narratives can help conceptualize a sustainable future that re-evaluates shared notions of positive human-nature relationship and the cultural heritage of the region. In the current discussion of ecological urbanism.

In his recent book, Hajer, et al (2020) call on ecological urbanism that combine environmental conditions and social quality in examining the neighbourhood for the future. In his book, Hajer et al (2020) acknowledge that there is bias towards the Global North while many future neighbourhoods will be built in the Global South. I-SAY project is an attempt to contribute into that gap and also to add cultural nuances into the ecological urbanism approach. Cultural urbanism views urban heritages as an arena for redefining or re-codifying the desired image of the future (Ilchenko, 2020). In this sense, I-SAY will contribute to ecological urbanism discussion by reconstructing the urban heritage as 'mining resources' for envisioning the sustainable futures in urban development.

Yogyakarta provides a unique case study to understand forms of climate and nature resilience in a context deeply intertwined with cultural and socio-political history. Yogyakarta represents a strong Global South context that refers to regions with colonial history and specific socio-economic characteristic, e.g., ill-functioning institutions that protect the privilege of a few while the large population lies on clientelist system that reproduce social exclusion (Ghosh et al, 2020). As the only province in Indonesia led by a Sultan as the governor, the urban development of the city of Yogyakarta is a melting pot between Sultanate value-led planning and Western industrial modernisation model inspired from the Dutch colonial period (Lazuardi, 2020). This development has overlooked and weakened the agricultural values and tradition that historically practiced by the indigenous community of Yogyakarta. Yet, there were many grassroots and community initiatives in ecological resiliences, social solidarity, and sustainable living that came from the people of Yogyakarta (CWTS UGM, 2021; Fatimah et al, 2020; Kurniawan et al, 2021)

I-SAY attempts to exercise decolonization research that would entail a strong criticism of modernity to develop alternative bases for thought and action, and to illuminate marginalized worldview. This project will begin from examining 'the cosmological axis' planning which developed by the Sultanate government. The cosmology axis represents an imaginary line of nature-human interplay of power connecting the Volcano Merapi Mountain, the Sultan Palace (Keraton) and the Southern Sea (Indian Ocean) (KNIU, 2019). Currently, the government focus on restoring cultural artefact and heritage in the imaginary lines area (Pemprov Yogyakarta, 2019). With high influence by their colonial past, I-SAY will critically reassess sustainability narratives to circularity in Yogyakarta and will co-and re-create what provides restorative

wellbeing benefits within rooted values and social practices demonstrating ways to find more balanced and inclusive pathways to sustainability.

I-SAY will engage with decolonisation approach (Ghosh et al, 2020) engaging actors in co-creating activities to facilitate a rediscover of the ways in which circular economy values and narratives have already existed in socio-cultural practices of Yogyakarta, and why a binary interpretation that confronts tradition vs modernisation has overshadowed existing circular historically rooted values. In re-interpreting and integrating circular economy I-SAY will combine active participatory research and ecological and cultural social practice approaches in studying and testing implementation of circular economy at community, public and private organizational levels.

## ***Transnasionalisme dan Olahraga dalam Politik Global***

Siti Daulah Khoiriati

Penelitian ini, yang dipublikasikan dalam bentuk buku, mengidentifikasi aspek transnasionalisme dalam olahraga (*sports game*) internasional. Pertandingan olahraga internasional seperti Olimpiade merupakan aktivitas transnasional antar actor non-negara namun merepresentasikan Negara. Semangatnya adalah menciptakan perdamaian, melalui Olimpiade, dengan persaingan yang sehat dalam pertandingan berbagai cabang olahraga. Kajian ini, menyoroti berbagai permasalahan terkait relasi transnasional, penelaahan terhadap kemunculan aktor non-negara dalam olahraga, perannya dalam event olahraga internasional, persaingan dengan negara, persoalan-persoalan dalam event olahraga internasional dan penyelesaiannya. Riset ini, menguak berbagai persoalan dalam olahraga dan politik global, yang melibatkan aktor-aktor transnasional, berupa organisasi maupun individu. Analisis mengenai relasi antara aktor transnasional dengan Negara, diarahkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana interaksi berlangsung dalam kontestasi otoritas di bidang olahraga. Menganalisis berbagai kasus dalam olahraga, jawaban terhadap pertanyaan tersebut diurai satu persatu guna memberikan gambaran yang komprehensif bagaimana olahraga menjadi bagian penting dalam hubungan internasional.

Buku ini berisi kumpulan hasil riset kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam kelas “Transnasionalisme dalam Politik Global” tahun 2021. Terdiri dari lima bagian, dimulai dengan pendahuluan. Selanjutnya, bagian pertama, membahas kemunculan aktor transnasional di bidang olahraga pada level internasional, berupa institusi atau organisasi antar pemerintah (Inter-Governmental Organization/IGO). Bagian ini terdiri dari tiga bab. (1) “The Development of Transnational Sports Organizations: The Case of World Rugby Union” (2) “Analisis Transnasionalisme dalam Pembentukan Badminton World Federation (BWF)” (3) “The 2015 FIFA Corruption Scandal: Its Impacts on the Regional Football Organization’ Transnational Relations.”

Bagian kedua, dengan tema “International Sports Organization (ISO) as Transnational Actor vs. State: the Phenomenon of Loss of Control.” Terdiri dari empat bab: dimulai bab (4) “The Power Contestation between UEFA and Ukraine in Europe.” (5) “Olympic Council of Asia vs. Israel: Tatanan Sportivitas Transnasional atau Kontestasi Nasionalisme?” (6) “Pengaruh Implementasi Regulasi FIFA terhadap Kedaulatan Brasil dalam Piala Dunia 2014 melalui Perspektif Transnasionalisme” (7) “The Banning of Russian National Sport Team: State-sponsored Doping Scandal.” Bagian ketiga dengan tema transnasionalisasi pertandingan olah raga, mengaji proses difusi (*diffusion*) dari satu cabang olahraga yang semula bersifat lokal atau nasional di suatu negara menjadi transnasional atau global. Terdiri dari empat bab. dimulai bab delapan (8) “The Transnationalization of Skateboarding in the 2020 Tokyo Olympics” (9) “Transnasionalisasi Olahraga Polo Kontemporer” (10) “Difusi Olahraga basket secara global oleh YMCA” (11) “Menuju Panggung Permainan Digital: Analisis Legitimasi leSF dalam Meregulasi eSports,”

Bagian keempat dengan tema peran aktor individu dalam olahraga dalam kerangka politik global. Terdiri dari tiga bab. dimulai Bab (13) “Kobe Bryant dan perannya dalam menjembatani hubungan AS-China” (14) “Ilie Nastase dan Anti Diplomasi: Peran Selebritas Olahraga dalam Meningkatkan Citra Rumania” (15) “The Salah Effect: Sepakbola, Liverpool, dan Islamofobia” Buku ini memberikan refleksi terhadap kajian mengenai hubungan transnasional dalam ilmu hubungan internasional yang telah berkembang luas meliputi berbagai isu, termasuk pertandingan olahraga

internasional. Melalui buku ini, diharapkan akan memperkaya pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan transnasional melalui berbagai studi kasus yang dihasilkan dari penelitian empiris.

## **Rethinking of Local Election in the Unitary State: A Study of Indonesia's Politics**

Siti Mutiah Setiawati

The election has very much associated with democracy. As Indonesia is constitutionally democratic, the country is also committed to holding the election regularly. However, as Indonesia is a unitary state, identifying local elections with democratization may be questionable. This article is a research-based article on Indonesia's politics today. A thorough observation of the local elections shows that from the perspective of economics, the local election is identical to wasting financial and time energy. While from the standpoint of politics, in the long run, it may put the country at risk of disintegration. Given the weaknesses of a local election, the main question is why the Government institutionalizes local polls. The result of the research, among others, is that the local election as a means of recruiting local government leaders is worth dismantling and recommended to be replaced by a tight selection of administrative requirements.

(Key words; local election, Unitary State, Indonesia, Democracy, Decentralization)

**The Indonesia Investment Authority:  
a developing country's approach of a sovereign investment?**

Raras Cahyafitri

This paper addresses the political economy behind the establishment of the Indonesia Investment Authority (INA), which is labelled as the country's first-ever sovereign wealth fund (SWF). It shares the general view that domestic dynamics often contribute largely to the establishment of SWFs elsewhere. However, the paper also argues that the mismatch between the national development interest and the flows of international investment, especially in the infrastructure development, have influenced the government of Indonesia to push for an SWF despite the absence of excess funds. Both domestic and international dynamics have contributed to INA's structure that the government of Indonesia chose to adapt, i.e. an SWF with a mandate of supporting domestic development. Records of malfeasance in several SWFs have raised a red flag that domestic mandates will undermine public investments. However, the failure to expand funding sources for national projects has made INA as an appealing instrument for state-led efforts to catalyse development. Without disregarding that no SWFs are perfectly similar, this paper demonstrates that INA is an example of a developing country's approach in defining and managing sovereign investment and financing.

**Keywords:** Sovereign Wealth Fund, Indonesia Investment Authority, state-led development, public investment, infrastructure development

**Bahan Bacaan Mata Kuliah MRHI Lanjutan:**  
**Metode Perbandingan dalam Studi Hubungan Internasional**

Muhammad Rum

Kegiatan perkuliahan Metode Riset Hubungan Internasional (MRHI) atau *Research Methods in International Relations* (RMIR untuk kelas IUP) pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, diadakan secara bertahap. Bagian pertama, yaitu bagian Dasar/Basic, diselenggarakan untuk mahasiswa semester tiga. Pada bagian pertama tersebut, mahasiswa diperkenalkan dengan logika penelitian dalam studi ilmu Hubungan Internasional. Harapannya, para mahasiswa memahami bagaimana merancang rencana penelitian yang jelas alur pemikirannya, memiliki koherensi antara satu tahap ke tahapan lainnya, dan logis antara subyek yang diteliti dengan alat analisisnya. Kemudian bagian kedua, yaitu Lanjutan/Advanced, diajarkan untuk mahasiswa semester kelima. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diperkenalkan ragam metode penelitian atau alat analisis. Setelah mempelajari alat-alat analisis yang beragam, mahasiswa diminta untuk mempraktikkan bagaimana mempergunakan metode tertentu. Di akhir masa studi di Departemen, para mahasiswa didorong untuk mempergunakan metode penelitian yang paling sesuai untuk skripsinya nanti pada mata kuliah Studi Independen (*Independent Study* untuk IUP).

Saat ini, kelas MRHI Lanjutan memiliki varian alat analisis yaitu process tracing, metode perbandingan, studi kasus, analisis wacana, etnografi, statistika, *social network analysis* (SNA), dan statistika literatur melalui NVivo. Penulisan naskah bahan ajar ini merupakan prakarsa dari para pengampu mata kuliah MRHI Lanjutan. Para pengampu merasakan pentingnya memberikan bahan ajar yang komprehensif mencakup metode-metode yang digunakan dalam penelitian di dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional.

Khusus untuk bab ini, penulis bermaksud untuk memperkenalkan para mahasiswa dengan metode perbandingan dengan mengulas beberapa penelitian terdahulu yang mempergunakan metode perbandingan politik. Dengan tujuan memperkuat kapasitas penelitian, para pengampu beserta para peserta didik tengah berupaya mengurasi pluralitas dan kekayaan metode dalam studi hubungan internasional. Akan tetapi dalam proses kegiatan belajar-mengajar, kita sering dihadapkan dengan banyaknya sumber yang berserak. Walau pun ketersediaan sumber pembelajaran yang kaya itu baik bagi pengembangan keilmuan, seyogianya sebuah naskah pengantar dapat memberikan panduan sistematis kepada para peserta didik tentang mana-mana saja sumber yang dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang metode perbandingan politik.

Ada dua pertanyaan pengantar untuk memandu para mahasiswa memahami metode ini. Pertama, apa itu metode perbandingan dalam studi hubungan internasional? Kedua, bagaimana contoh-contoh penelitian terdahulu mengaplikasikan metode perbandingan? Penulisan bahan ajar ini dilakukan melalui tinjauan atas literatur-literatur perbandingan politik dan perbandingan politik luar negeri yang telah secara jamak digunakan dalam studi hubungan internasional. Bahan ajar juga akan memberikan ulasan tentang aplikasi metode ini dalam beberapa riset mutakhir yang terpilih.

**Etnografi dalam Studi Hubungan Internasional:  
Membedamkan Diri dalam Politik Sehari-hari**

Diah Kusumaningrum

Dapatkah fenomena antarnegara, lintas negara, dan global didekati melalui etnografi? Bab ini berargumen bahwa, terlepas dari skeptisme di kalangan ilmuwan politik dan Hubungan Internasional (HI), proses *immersion* dan prosedur menegakkan sensibility dalam etnografi sangat berpeluang menghadirkan pemahaman yang *fine-grained* akan relasi kuasa sehari-hari serta interaksi agensi-struktur – termasuk di dalamnya, struktur gender, kelas, agama, bahasa, dan sebagainya – yang luput ditangkap metode penelitian lain. Kuncinya ada pada komitmen peneliti melaporkan *researcher's call*, melakukan triangulasi, serta mendorong penjelasan kausal.

**HIBAH**

**PENELITIAN DAN PUBLIKASI**

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI**

**Research  
Days**  
2022

**Globalisasi dan Emansipasi Politik:  
Penelitian tentang Dialektika Demokrasi dalam Pergerakan Politik Nasional di Indonesia**

Lambang Trijono

Globalisasi membawa kekuatan ekonomi politik kapitalisme global. Sementara itu globalisasi juga membawa kekuatan politik demokrasi. Apakah globalisasi menguatkan atau memperlemah politik nasional bergantung dialektika demokrasi berlangsung. Perkembangan globalisasi mengurangi peran negara dan memperluas peran aktor non-negara dan menggeser tanggungjawab kebijakan ke atas pada aktor di tingkat internasional. Demikian itu memperluas berlakunya norma politik internasional dalam politik hubungan antar negara bangsa. Bagaimana kebijakan pemerintah menghadapi globalisasi itu mendapat respon dari masyarakat di dalam negeri. Sebagian berpendapat globalisasi telah mengurangi kedaulatan bangsa negara. Sebagian lain berpendapat memperbaiki politik negara bangsa menambah kemampuan negara bangsa dalam menjalankan demokrasi dan prinsip universal hak asasi manusia. Demikian itu memunculkan pergerakan politik baru dalam politik nasional. Sebagian bersifat resistensi fundamental membangkitkan nasionalisme, sebagian lain emansipasi politik terbebas dari dominasi dalam dialektika demokrasi melakukan penguatan politik nasional.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada perkembangan globalisasi dan pergerakan politik dalam politik nasional menghadapi globalisasi. Perhatian ditujukan pada dialektika demokrasi dan emansipasi politik berlangsung. Penelitian menemukan bahwa perkembangan masyarakat nasional sejauh ini meski ekonomi mengalami pertumbuhan dan politik semakin terbuka menuju demokrasi tingkat kesejahteraan begitu lambat meningkat dan ketimpangan sosial ekonomi semakin melebar disertai oligarkhi semakin menguat. Perkembangan globalisasi menimbulkan tendensi krisis di masyarakat nasional ketika politik nasional tidak diperkuat. Tekanan krisis global sekarang menambah semakin menguat tendensi krisis di masyarakat. Demikian itu mendorong pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan energi mengeluarkan subsidi untuk mengatasi sehingga pengeluaran negara bertambah. Menimbulkan tekanan pada anggaran dan dengan itu pertumbuhan ekonomi melambat dan inflasi meningkat dan resesi ekonomi menghantui masyarakat.

Politik nasional perlu mengatasi tendensi krisis ini dengan lebih memperhatikan akses penduduk dalam mengkapitalisasi perkembangan globalisasi. Akumulasi kapital dari perkembangan kapitalisme dalam bekerja sama dengan luar hasilnya perlu dibagi secara adil dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk terpinggirkan. Globalisasi dan demokrasi disini bisa saling mendukung ketika hasil dari akumulasi kapital dibagi secara luas dan sistem politik didesain lebih demokratis. Sebaliknya, bila tidak, memunculkan kesenjangan dan pemimpin populis muncul dalam politik demokrasi. Politik populis bisa membawa perubahan transformasi ketika disertai prinsip transformasi dalam melakukan perubahan. Penguatan kebebasan hak otonomi aktor disertai prinsip transformasi akan membawa perubahan. Penyatuan berbagai segmen dalam pergerakan sangat diperlukan. Pergerakan demokrasi dari berbagai isu, tingkatan, disatukan dalam politik kewargaan. Kemunculan transformasi dalam politik sagasitas demikian itu tidak banyak kita temukan namun sedikit keberadaan di Indonesia akan cukup berarti bagi berlangsungnya transformasi.

Globalisasi memunculkan tendensi krisis di masyarakat ketika politik nasional tidak diperkuat menghadapinya. Tekanan krisis global sekarang ini menambah tendensi krisis berlangsung di masyarakat. Penetrasi kapitalisme global menimbulkan antagonism dan dalam pada itu pergerakan demokrasi dalam dialektiknya perlu dilakukan memperkuat politik nasional. Berbagai pergerakan demokrasi perlu melakukan penyatuan dalam politik kewargaan demokratis dalam mendapatkan kebebasan hak otonomi kontrol dan tanggung jawab atas dunia kehidupan. Kemunculan aktor populis dalam hal ini membawa perubahan transformasi ketika pergerakan disertai prinsip transformasi. Praksis pergerakan dalam interstitial-metalepsis secara dialektik membuka jalan perubahan. Politik sagasitas demikian itu membawa prospek bagi berlangsungnya perubahan transformasi.\*\*\*

**The Human-Spirits Relationship in the Syncretism of Theravada Buddhism:  
A Study of Danghyang in Indonesia, Neak Ta in Cambodia and Nat in Myanmar**

Fuji Riang Prastowo

This sociological study of religion attempts to explain the relationship between human and spirits in the syncretism of Theravada Buddhism tradition with case studies in Indonesia, Cambodia, and Myanmar. In these countries, before the influence of Indian Dharmic Religion, people used to practice Theravada Buddhism side by side with animistic practices by worshipping various spirits, namely ancestral spirits, guardian spirits, or god-like spirits. In Indochina, for the most part, Theravada Buddhists are used to performing rituals of delegating merit (*Pattidana*) to non-physical beings to the house of spirits they have at home or in the corners of the village. While in Indonesia, the spirit house is manifested in the village Pundhen which is usually a spring with a large Banyan tree.

To understand the sociological aspect, this study uses the theory of correlational theology from Paul Tillich as the search for common ground in reflection of the syncretic folk belief of worshipping Danghyang among Javanese people in Indonesia, Neak Ta among Khmer people in Cambodia, and Nat among Burmese people in Myanmar. Using qualitative descriptive study, primary data sources of this study come from the Tipitaka, the Buddhist Sermon of Paritta Sutta and field observations, while secondary sources come from scientific articles and media data. Field Observations are in Khmer Society (Phnom Penh and Siem Reap, 2019), Burmese Society (Yangon, 2020), and Javanese Society (Temanggung and Kulonprogo, 2021).

The results of this study are in the exploration of doctrinal concept from religious texts and the acculturation practices between the folk belief with the view of wholeness theology in Theravada Buddhism cosmology, of which doctrinal values on the harmonious relationship between humans and non-physical beings such as deity, spirits and ghost. Humans live side by side in harmony with other creatures in this world according to the law of attachment and reciprocity or *Paticcasamuppada*, consisting of 31 realms of existence. There are two main arguments why syncretism occurs in Theravada Buddhism. First, there is no worship of Supreme Beings such as God or Mahadeva, causing flexibility in religion practices. Second, the parallel relationship between humans and nature in Buddhist cosmology makes the relationship between humans and spirits a natural thing. In the context of the three countries, these spirits articulate three relations such as the relationship between guardian spirits and the people, the relationship between the deceased spirits and the living, the relationship between spirits and the society environment, as in line with spiritual ecology.

**Representasi Komoditas Fashion dalam Pameran *Designer of Dreams Representation of Fashion Commodity in Desainer of Dreams Exhibition***

Elok Santi Jesica

Fashion merupakan konsep yang erat dengan industri pakaian. Konsep ini dimaknai berbeda-beda pada masing-masing merek dagang tergantung pada konteksnya. Christian Dior yang merupakan merek dengan menggunakan nama desainernya meleburkan figur pendirinya yang memiliki serangkaian kedekatan pengalaman dengan karya seni sebagai dasar dalam membangun citra fashion dengan justifikasi selera. Citra ini meluas hingga proses pemasaran dan peningkatan keterhubungan konsumen dengan komoditasnya melalui pameran bertajuk Designer of Dreams di museum Brooklyn, New York yang diilustrasikan sebagai jabat tangan antara pusat fashion dunia (Paris) dan ibu kota fashion dunia (New York). Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kembali diskursus Christian Dior dan lokasi geografis untuk melihat sistem representasi pameran Designer of Dreams yang menyajikan serangkaian jejaring makna bagi konsumen. Dilakukan dengan mengumpulkan data dalam jejaring internet dan pendekatan metodologi visual kritis penelitian ini menemukan bahwa konsep fashion pada Christian Dior disusun dengan menekankan kedekatan tokohnya dengan seni serta mengalpakan kaitan tokohnya dengan narasi perang maupun proses produksi terkait negara-negara di luar Prancis dan Amerika. Penelitian ini juga menemukan bahwa asosiasi merek dan lokasi geografis tertentu memiliki implikasi pada praktik konsumsi dan pemaknaan pada ruang, termasuk yang terjadi pada pameran Designer of Dreams.

**Kata kunci:** fashion, representasi, diskursus, konsumsi, ruang

## **Network Analysis of Knowledge Sharing on Data Sovereignty in Indonesia**

Sidiq Hari Madya

The waves of digitalization generate a massive amount of data which increasingly affect many aspects of human life. Frequently described in metaphors such as ‘the new oil’, ‘the new currency’, ‘the new capital’, and ‘the new asset’, data are increasingly believed to become the most valuable resource in the current global economy. This new way of seeing data raises a global concern over reformulation of data governance. In the wake of this trend, some countries have come up with the idea of regulating data and controlling data flows via national jurisdictions. This idea has often been described by the term ‘data sovereignty’. The widely adoption of ‘data sovereignty’ concept can be seen from the growing discussions, debates, and knowledge disseminations in a form of conference, seminar, public lecture, and public dialogue that specifically addressed ‘data sovereignty’ issues. In Indonesia, a series of such discussions has been organized in many cities involving data stakeholders and experts across the fields. This study examined the network of experts engaging with data sovereignty issues in Indonesian context. Two specific questions addressed: how experts sharing their knowledge about data sovereignty distributed in the network of knowledge sharing? who are the key players in the fields? and how this network formation is related to data issues emerged in Indonesia? Using publicly available and accessible data on the internet, this study identified a ‘series’ of public events or discussions from 2015 to 2021 that conditioned knowledge sharing about data sovereignty in Indonesia. Social network analysis was employed to examine the network formation presenting the distribution of actors and issues in the debates. This study found that knowledge sharing on data sovereignty in Indonesia were concentrated in a cluster of actors whose expertise are primarily related to Computer Science, Engineering, and Information-Technology (CEIT), with additional contributions from Management, Business, and Law (MBL). Classified according to the field, people in commercial, government, and academic dominated the presentation of knowledge, leaving behind others including that of civil society organizations. In term of issues, personal data protection and regulation were the most prominent themes setting the debates. It is argued that inequality of actors’ position in the network conditioned the narrow issues and conceptions of data sovereignty in which its direction is designed to making of rules and regulations that primarily serve the interest of industries and governments. More engagements are needed especially from civil societies whose interests are to promote individuals’ rights as data subjects in Indonesia’s data sovereignty agenda.

## **Elite-Power or the Power of Elite Populist Moment in Comtemporary Indonesian Democracy**

Frans Vikki Djalong

Current scholarship on Indonesian democracy is increasingly attentive to populism as political phenomenon. By defining Indonesian democracy as populist politics, some scholars further argue that democratic practice is in rapid decline and the ruling goverment turns into authoritarian regime. While we agree at certain points of their conclusion, our article takes rather different lens to capture such characteristics. Drawn upon Hegemony Analysis, we explore two populist articulations in 2014 dan 2019 election to illustrate our argument on to what extent Indonesian democracy stagnates and the ruling power turns to authoritarianism. In order to cast clearer light on this issue, we also take comparative review on populist politics as taking place in other parts of the world. It is evident that in populist politics centered on the question of how the people is constructed as defining signifier of mobilizing and consolidating broad base support in election and policy making.

In contrast to the arguments proposed by Hadiz (2016), Mietzner (2020) and also Hatherell & Welsh (2019), ‘populism’ that has characterized two successive elections, has been evident in two competing articulations, the Islamist and Nasionalist politics. The Nasionalist force articulates Jokowi as signifier of the people in need of responsive government and responsive leadership, while the Islamist force articulates Ummah as downtrodden moslems. The Islamist and nationalist articulations of the people took place in the process as they crystalized in the question of economic justice relating to developmentalism and multiculturalism, with direct implication on their distinctive interpretation of Indonesian nationalism.

Neoliberal developmentalism and liberal multiculturalism stand as two discursive matrix to which construction of political identity and policy projection are enacted in public debate during election period and in post-election policy-making. The enactment of ‘people’ in the narratives ranges from identity-groups who are the “victims” of both economic injustice and cultural subjugation. The victim-people in the narrative articulates the discontents to have fair inclusion into the existing developmentalist-multiculturalist governance. Central message of the articulations is not the fact that the governance is entirely dysfunctional and consequently in need of fundamental reform or different model system should be installed, but the opposite, it has not fully functioned as expected.

Populist moment, as it has characterized one decade of Indonesian politics, is the crucial moment for the elite survival, consolidation and expansion. The articulation of Ummah and Jokowi has been intensively deceptive, weapon of mass distraction that only meet political realism of the elite power. It is through the delicate construction of the figurative people, the establishment escapes the fundamental questions regarding neoliberal developmentalism and liberal multiculturalism. The two elections are not so much about debate on the fundamental shift in neoliberal policy projection but the opposite, deceptive reassurance that the power elite will be more responsive as effective government, without substantive popular representation. These two populist articulation have failed as democratic project but succeeded as elite proxy wars.

## **The Dynamic Meaning of Subculture among DIY Indonesian Musicians**

Oki Rahadianto Sutopo

In this chapter, I continue and critically contextualize the subculture vs post-subculture debates using my long-term study of DIY Indonesian musicians by investigating the dynamic meaning of music subculture across their different career stages and its interlinkages with the changing socio-historical and cultural context. As I will suggest, the meaning of “subculture” in the everyday lives of Indonesian musicians does not rigorously conform to the Centre for Contemporary Cultural Studies’ (CCCS) thesis of resistance and class (Clarke, Hall, Jefferson and Roberts 1976), nor to the fluidity of identity thesis as proposed by post-subcultural scholars (Muggleton and Weinzierl 2003). Using a biographical approach (Plummer, 2001), I highlight how DIY Indonesian musicians reflexively interpret and reinterpret the practical and symbolic meanings of their participation in music subcultures based on the temporal and spatial situatedness of their lived experiences. This research followed a change towards empirical work (see Bennett 2003; Hodkinson 2012), rather than relying heavily on the polished theoretical discussions as suggested by the Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS).

The life stories of four DIY musicians reveal the ambiguous character of subcultural careers amidst everyday political-economic realities in Indonesia. It also contributes to the new knowledge in the subculture studies at the global level by contextualizing the concept of subculture based on the subjectivity of DIY Indonesian musicians in their specific temporal and spatial-situations. During the amateur stage, DIY Indonesian musicians interpret music subculture as a space to accumulate valuable forms of material and symbolic skills suitable to build and develop into professional stage. During the professional stage, DIY Indonesian musicians interpret music subculture as a space to maintain sustainability of their music career under uncertain and risky conditions of the culture industry. The narratives of DIY Indonesian musicians above unveil the everyday politics of the post-Reform era which I described as the politics of ‘survival of the fittest’ with ambiguous qualities.

## Tiga Bentuk Kekerasan yang dihadapi Siswa Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19

Muhamad Supraja

Riset ini menemukan tiga bentuk kekerasan yang dialami siswa sekolah dasar selama masa pandemic Covid-19, yaitu: pertama, Kekerasan domestik. Yaitu kekerasan yang dialami siswa sekolah dasar di rumah, aktor pelakunya biasanya keluarga terdekat, seperti bapak, ibu, atau anggota keluarga terdekat lainnya. Kekerasan bentuk yang pertama ini dibeberapa tempat terjadi akibat tekanan ekonomi, temperamen/ emosi orang tua yang cenderung tak terkendali. Di Kalangan keluarga miskin kekerasan semacam ini sering kali terjadi. Kedua, Kekerasan Teknologi, aktornya adalah gadget, teknologi, yang dapat berfungsi apabila berbagai persyaratannya terpenuhi, seperti kepemilikan terhadap gadget, jaringan internet yang memadai, gadget berspek tertentu yang kompatibel untuk proses belajar mengajar, dsb. Selain itu, teknologi di satu sisi memudahkan aktivitas seseorang, namun pada saat yang lain ia dapat mengendalikan ataupun mendehumanisasi manusia. Ketiga, kekerasan yang dilakukan guru atau pihak sekolah terhadap para siswanya. Gejala tersebut dapat terjadi karena guru acapkali mendapat berbagai bentuk tekanan dari birokrasi/organisasi, atasannya, atau bisa juga akibat rendahnya sikap empati terhadap kondisi siswa di masa covid-19, namun dalam kenyataannya guru sering sekali bertindak arogan terhadap siswa yang seharusnya mendapat pengayoman dan support yang kuat dari guru.

Riset ini memanfaatkan sejumlah teori yang relevan, seperti berasal dari gagasan Bourdieu tentang pedagogi demokratik di sekolah, kemudian juga gagasan dehumanisasi manusia dihadapan teknologi (gadget) yang berasal dari sejumlah pemikir seperti Illich, dsb. Selain itu teori sebagaimana telah dikemukakan di atas, riset ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara baik langsung maupun tidak langsung terhadap orang tua siswa.

Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada data yang diolah dari lima informan dengan ragam variasi sosial (profesi) dan juga demografi yang dimilikinya, menunjukkan bahwa sekolah gagal mengimplementasikan pedagogi Pendidikan yang demokratis, karena disadari bahwa sebenarnya sekolah lebih mengembangkan aspek akademis (olah intelektual), sering kali melupakan pentingnya mengakomodasi hak siswa untuk berkomunikasi, atau bermain dengan sesamanya (dengan mengindahkan aturan yang berlaku, seperti menjaga jarak, bermasker, cuci tangan, dsb) sehingga banyak siswa yang merasa bosan, dan mengalami perasaan tertekan.

Meski demikian penelitian ini tidak menemukan tindakan fatalis yang dilakukan orang tua terhadap anak, sebagaimana yang terjadi di beberapa tempat tertentu. Namun tentu saja, sebagaimana terjadi di banyak negara, para informan juga berharap agar putera-puteri mereka dapat segera kembali lagi ke sekolah, karena di sekolah bukan hanya tempat belajar bagi mereka, namun juga tempat mereka bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesamanya.

## **Strategi Meningkatkan Employability Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia**

M. Falikul Isbah, Wahyu Kustiningsih, Gregorius Ragil Wibawanto, Odam Asdi Artosa

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat desakan yang semakin kencang terhadap dunia pendidikan tinggi untuk menghasilkan output lulusan dengan kualitas dan kapasitas yang lebih sesuai dengan dunia kerja yang selalu berubah. Desakan tersebut termanifestasikan dalam konsep “kelayakan kerja (employability)” atau “kesiapan-kerja (work-readiness)“.

Kajian mengenai ‘kelayakan kerja’ (*employability*) di kalangan lulusan perguruan tinggi bisa dipetakan ke dalam dua sorotan utama. Pertama, kajian yang menginvestigasi tidak stabilnya transisi dari perguruan tinggi ke dunia kerja. Kedua, kajian yang memberi perhatian pada upaya-upaya yang dilakukan universitas untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa dan lulusan untuk kelayakan kerja.

Berdasarkan studi literatur, terdapat berbagai strategi yang dapat dilakukan oleh universitas untuk meningkatkan kelayakan kerja, antara lain: kemitraan dengan industri melalui skema university-industry partnerships (Mgaiwa, 2021; Prikshat dkk., 2019); pengembangan kurikulum secara regular dengan melibatkan stakeholder penting dan relevan (Mgaiwa, 2021; Prikshat dkk., 2019; Rowe, 2017); penyesuaian program akademik dengan rencana pengembangan pemerintah (Mgaiwa, 2021; Prikshat dkk., 2019); penguatan sistem jaminan mutu/*Quality Assurance Systems* (Mgaiwa, 2021; Prikshat dkk., 2019); pengembangan program *work-integrated learning* (Jackson, 2014); magang atau internship (Clarke, 2018); pengembangan program kewirausahaan (Laalo dkk., 2019); dan pengembangan sektor kreatif untuk mahasiswa menimba pengalaman kerja (Allen dkk., 2013; Bridgstock, 2011).

Temuan pertama riset ini adalah adaptasi kurikulum dengan cara membuat mata kuliah kewirausahaan. Dalam taraf yang paling sederhana, mata kuliah ini menyajikan pengetahuan dan skill mengenai pembuatan produk, pengemasan dan pemasaran. Dari FGD yang kami lakukan bersama alumni dan mahasiswa dari delapan kampus yang kami teliti, tampak bahwa mata kuliah ini membantu para alumni untuk mengeksplorasi pekerjaan transisi sebelum mencapai pekerjaan impian. Sebagian besar mata kuliah ini dilekatkan pada fakultas ekonomi, pusat pengembangan karir di level universitas, atau dikelola sendiri oleh Prodi atau fakultas dengan dosen pengampu dari luar.

Kedua, semua PT yang kami teliti memiliki unit pengembang karir, namun posisinya di dalam tata kelembagaan berbeda-beda sehingga berimplikasi pada kapasitas dan peran mereka. Kebanyakan pusat pengembangan karir di level universitas lebih banyak berfokus pada ‘tracer study’ lulusan sebagai tuntutan akreditasi universitas dibanding pengembangan program-program peningkatan kemampuan mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja. Tampilan pusat pengembangan karir di level universitas masih mengutamakan kegiatan ‘job fair’ dan info lowongan kerja daripada peningkatan program-program mahasiswa untuk memasuki dunia kerja.

Ketiga, Jejaring (*networking*) merupakan salah satu cara untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di luar institusi. Jejaring dapat berbentuk komunikasi dan kemitraan formal maupun interaksi dan *engagement* yang lebih informal. Dalam riset ini, kami menemukan beberapa bentuk jejaring, yakni 1) tracer study yang dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan akreditasi dan upaya pencarian peluang kemitraan; 2) penyelenggaraan acara pengembangan kapasitas dalam bentuk seminar atau talkshow sebagai bagian dari peningkatan kapasitas atau penyebaran inspirasi

positive sekaligus arena pengembangan jaringan; dan 3) program kerjasama dengan sektor industri dan pemerintahan untuk kegiatan magang bagi mahasiswa. Ketiga aktivitas jejaring tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperluas arena belajar bagi mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja sekaligus membuka peluang-peluang kerja dan wirausaha.

Studi ini menemukan tiga ragam strategi yang telah ditempuh oleh PT dalam upaya mereka meningkatkan *employability* lulusan mereka. Kapasitas kelembagaan, SDM, jejaring, dan konteks lokalitas turut mempengaruhi pilihan dan dinamika strategi yang ditempuh.

## **Rekognisi dan Kompleksitas Ulayat di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, Papua Barat**

Arie Sujito<sup>1,\*</sup>, Gregorius Ragil Wibawanto<sup>2</sup>, Odam Asdi Artosa<sup>3</sup>

Dinamika ulayat telah menjadi diskursus dalam kajian-kajian antropologi, sosiologi, bahkan studi pembangunan (lihat Purcell, 1998; Sillitoe, 1998; Snipp, 1992). Di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak, ulayat merupakan bagian dari hukum adat yang dimiliki, dan secara komunal dikelola oleh masyarakat adat. Dalam sudut pandang yang lebih luas, ulayat dimaknai sebagai hak untuk mengatur dan mengurus wilayah adat, seperti: hutan, laut, sungai, pegunungan, dan lain-lain (Von Benda-Beckmann & Von Benda-Beckmann, 2011). Pengelolaan ini diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang ke penerusnya. Oleh karena itu, ulayat tidak hanya persoalan mengenai batas-batas wilayah, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat adat menjadikannya sebagai tempat tinggal sekaligus ruang untuk menyambung penghidupan mereka. Di konteks ini, pembangunan kerap memunculkan friksi-friksi di tengah masyarakat.

Friksi seperti ini juga pernah terjadi di beberapa daerah. Salah satu studi yang dilakukan oleh Tjoanda (2020), mengenai ulayat dan masyarakat adat di Maluku, memberikan ilustrasi terkait dinamika kepemilikan ulayat yang dikalahkan oleh kepentingan negara. Alih-alih memberikan rekognisi pada masyarakat adat, temuan Tjoanda (2020) menunjukkan bagaimana kebijakan pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan hilangnya wilayah pesisir dan laut yang termasuk bagian dari ulayat masyarakat adat Halong, Ambon. Benturan kepentingan negara melalui kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai leluhur masyarakat hukum adat tampaknya tidak peka terhadap penghidupan berkelanjutan yang sudah diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat adat.

Berdasarkan uraian di atas, studi ini berangkat dari nihilnya pendekatan pembangunan yang memberikan rekognisi masyarakat adat terhadap ulayat sebagai representasi penghidupan di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak. Oleh karena itu, setidaknya ada dua tujuan utama yang hendak dieksplorasi dalam artikel ini. Pertama, menggambarkan dinamika rekognisi masyarakat adat terhadap ulayat di tengah kompleksitas pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak. Kedua, memetakan kompleksitas ulayat sebagai simbol penghidupan dan entitas lokal di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak.

Artikel ini mengisi kekosongan cara pandang neo-developmentalisme yang cenderung melakukan eksklusi terhadap masyarakat adat atas hak kepemilikan ulayat (lihat Zhouri, 2010). Alih-alih melihat pembangunan sebagai bencana, artikel ini berupaya mendudukan pembangunan dan masyarakat adat dalam satu arena yang harmonis dengan menonjolkan rekognisi atas kompleksitas ulayat di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak. Meskipun dalam temuan riset terdapat narasi historis tentang disharmoni antara pembangunan dan hak ulayat, rupanya hal ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat adat untuk memperoleh rekognisi atas hak ulayat yang mereka miliki. Isu mengenai masyarakat adat (*indigenous people*) telah banyak menjadi topik dalam diskusi akademik, khususnya studi-studi antropologi dan sosiologi (lihat Purcell, 1998; Sillitoe, 1998; Snipp, 1992). Namun, studi ini menawarkan perspektif baru yang memposisikan masyarakat adat sebagai entitas lokal yang memiliki rekognisi dan kuasa atas akses terhadap ulayat. Secara umum, hasil dan pembahasan ini akan dibagi ke dalam empat bagian: pertama, pengantar untuk memberikan gambaran terkait konteks sosial, ekonomi, dan politik yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak; kedua, pembahasan mengenai relasi kelembagaan adat di masing-masing kabupaten; ketiga, dinamika pembangunan dan perubahan sosial yang menceritakan pengalaman adat, strategi untuk mendapatkan rekognisi, dan tantangan-tantangan yang dihasilkan; dan keempat,

menyoroti bagaimana masyarakat adat memperoleh rekognisi di tengah kompleksitas ulayat yang ada.

Artikel ini mencoba untuk memetakan lanskap kompleksitas adat, dan pola pembangunan yang ada di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni secara umum. Hasil pembacaan artikel ini menunjukan bahwa beberapa tantangan kompleksitas adat dan relasi kuasa di pemerintahan pada level lokal, provinsi, dan nasional dapat dikelola melalui mekanisme sosial berbasis pengembangan wilayah yang partisipatif dan kolaboratif.

Pengembangan wilayah tersebut dapat ditempuh melalui perencanaan inklusif yang memuat tahapan pra jangka pendek, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam artikel ini tawaran pemahaman masyarakat adat dapat berkontribusi dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan dengan perspektif kritis agar tercipta proses peningkatan taraf hidup yang inklusif, plural, dan menghormati nilai-nilai adat.

**HIBAH**

**PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (PkM)**

**Research  
Days**  
2022

## **Knowledge Sharing Pariwisata Halal Untuk Pemberdayaan Kampung-Kampung Wisata di Kota Yogyakarta**

Dra. Siti Daulah Khoiriati, M.A.<sup>1</sup>, Prof. Dr. Suharko<sup>2</sup>, Tunggul Wicaksono, M.A.<sup>3</sup>, Ayu Kartikasari, M.Sc.<sup>3</sup>, Dr. Mohammed Baattour, M.Sc.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Hubungan Internasional

<sup>2</sup>Departemen Sosiologi

<sup>3</sup>ASEAN Studies Center

<sup>4</sup>Department of Management, University of Sharjah

Kajian mengenai pengembangan pariwisata halal di Indonesia mencakup ketiga variabel berikut: destinasi, organisasi, dan implementasi. Pariwisata halal menjadi jalan tengah untuk meningkatkan keuntungan yang didapat dari potensi jumlah kunjungan yang masif.

Program advokasi dari hilirisasi hibah ini fokus terhadap diseminasi informasi dari aktor-aktor terkait yang telah berpengalaman di industri pariwisata halal. Diversifikasi pariwisata dalam bentuk pariwisata halal diharapkan membuka peluang bisnis baru dengan tujuan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat sekitar. Selain itu, pariwisata halal dimanfaatkan untuk memperkenalkan aspek budaya dan spiritualitas nasional. Enam kampung wisata akan dijadikan kelompok sasaran yang dipilih berdasarkan inisiasi pariwisata halal yang telah dilakukan yaitu: Kauman, Tamansari, Purbayan, Brontokusuman, Pakualaman, dan Rejowinangun.

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi penyelenggaraan *Focus Group Discussion* dengan pengelola kampung wisata pada 18 Juni 2022 di Balai RW 18 RT 64 Karanganyar, Brontokusuman, Yogyakarta. Dari hasil diskusi terdapat beberapa temuan yang perlu diatasi, diantaranya ialah: 1) segmentasi baik dalam interpretasi konsep dan implementasi Pariwisata Halal yang disebabkan oleh ketiadaan kebijakan formal dalam bentuk peraturan daerah mengenai pariwisata halal; 2) urgensi akan eksplorasi dan identifikasi karakteristik dan keunikan kampung wisata; 3) pengembangan paket wisata klaster yang menawarkan opsi beragam berdasarkan preferensi pribadi wisatawan; 4) perlunya akses masyarakat akan sertifikasi halal dan sinergi antara akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media untuk menjamin diseminasi informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat.

Dari temuan di atas, tim kemudian menyelenggarakan kegiatan *bootcamp* yang dilaksanakan pada 27-28 Agustus 2022 di Kampung Sawah Durimanis dan diikuti oleh 12 orang dari pengelola kampung wisata dan 6 orang dari fasilitator. Kegiatan *bootcamp* berisi materi-materi sebagai berikut:

1. Pengembangan Pariwisata Halal: Studi Kasus Negara-Negara ASEAN
2. Dimensi, Prinsip, dan Universalitas Pariwisata Halal
3. Isu-Isu Mutakhir: Bisnis Makanan Halal
4. Isu-Isu Mutakhir: Bisnis Penginapan Syariah
5. Integrasi Paket Wisata dan Strategi Pemasaran
6. Inisiasi Komunitas Pariwisata Halal

Dari kegiatan *bootcamp* ditemukan beberapa poin menarik, **pertama**, pariwisata halal kini dipandang sebagai strategi branding untuk mengembangkan destinasi lokal dalam pasar global.

Pariwisata halal merupakan *extended service* yang memungkinkan untuk mengembangkan suatu daerah wisata yang sudah ada dengan melakukan *upgrading* fasilitas wisata yang *moslem-friendly*. Kampung-kampung wisata di kota Yogyakarta dapat dikatakan cukup siap untuk mengembangkan wisata halal.

**Kedua**, perlu adanya pengembangan destinasi wisata dengan metode penceritaan (*storytelling*) pada praktik pariwisata halal yang umumnya terbatas pada aktivitas ziarah kubur. Berlandaskan hal tersebut, wisata religi bisa lebih dikembangkan dengan fokus kepada aktivitas unik di masjid maupun pesantren. Selain itu, wisata dengan metode penceritaan juga dapat menjembatani benturan-benturan budaya kedaerahan dengan nilai-nilai Islam.

**Ketiga**, dalam pengembangan bisnis penginapan syariah, selain memastikan standar yang memenuhi syarat pariwisata halal, pengelola bisnis penginapan perlu bekerjasama dengan perusahaan *service provider* atau *travel agent* dalam menerapkan layanan pesan kamar dengan metode daring dan luring. Pengimplementasian Sapta Pesona diperlukan bentuk komitmen, baik dari pengelola destinasi wisata maupun konsumen, untuk menjaga dan mengembangkan potensi wisata.

**Keempat**, penanggulangan masalah sertifikasi halal untuk Rumah Potong Hewan (RPH) yang dipenuhi dengan juru sembelih halal menjadi penting karena RPH merupakan pintu masuk bisnis makanan halal untuk memastikan terpenuhinya konsep pariwisata halal, terutama bisnis makanan dan minuman yang menjual bahan utama daging. Penjaminan produk halal bisa diupayakan melalui *self-declare*.

Melalui FGD dan kegiatan *bootcamp*, tim peneliti melihat bahwa pada umumnya keenam kampung wisata yang menjadi target hilirisasi memiliki potensi dan kesiapan yang cukup untuk mengembangkan konsep wisata halal, meskipun masih terdapat tantangan yang harus ditanggulangi. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengembangkan pariwisata halal di kampung wisata kota Yogyakarta: 1) perlu adanya kebijakan atau dasar hukum yang dapat memayungi, mendukung serta mengatur aktivitas pariwisata halal; 2) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang konsisten mengenai pariwisata halal dibutuhkan sebagai tindak lanjut kepada masyarakat; 3) perlunya pembentukan komunitas pariwisata halal; 4) integrasi antar kampung wisata dalam mengembangkan pariwisata halal, yang perlu diakomodasi oleh lembaga pemerintah. Dimana luaran yang diharapkan dapat berupa paket wisata halal; 5) perlunya dukungan dari pemangku kepentingan heksa helix, yakni pemerintah, akademisi, penggiat pariwisata dan pebisnis yang sinergis.

# **HIBAH PENELITIAN**

## **MAHASISWA S-1**

**Research  
Days**  
2022

## **Inovasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam Penanganan Anak Yatim/Piatu Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Blora Jawa Tengah**

Annisa Salsabila<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Pandemi Covid-19 yang sudah ada hampir dua tahun sejak ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020 lalu sebagai pandemi/wabah dunia telah memakan banyak korban jiwa. Namun demikian, kebijakan pemerintah dalam merespon Covid-19 dinilai masih belum menuju kearah kebijakan yang inklusif. Tidak adanya rumusan mengenai kondisi kerentanan dan marginalisasi suatu kelompok menjadikan kebijakan ini cenderung melihat kondisi kelompok sasaran pada sisi satu kategori atau kelompok saja. Adanya kekurangan yang masih terlihat di berbagai kebijakan tentunya membutuhkan pembaruan yang mampu mengatasi persoalan tanpa mengesampingkan kebijakan yang sudah ada sebelumnya.

Berangkat dari permasalahan sosial tersebut, pemerintah meresponnya dengan mengelurarkan kebijakan program ATENSI. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Anak merupakan inovasi kebijakan dari program Asistensi Rehabilitasi Sosial yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Program ini memberikan layanan Rehabilitasi Sosial kepada anak yang kehilangan orang tua akibat Covid-19. Kabupaten Blora menjadi lokasi dalam penelitian ini karena berdasarkan data dari Dinsos PPPA terdapat 160 lebih anak yatim/piatu yang kehilangan orang tua karena Covid-19. Selain itu, Kabupaten Blora juga sudah memiliki arah kebijakan dalam perlindungan anak yatim/piatu akibat Covid-19 melalui kebijakan “Aku Sedulurmu”. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini akan melihat bagaimana proses inovasi sosial program ATENSI dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut.

Inovasi kebijakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan kerangka konsep inovasi sosial, perlindungan anak, dan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Blora terdapat anak yatim/piatu akibat Covid-19. Proses inovasi sosial dalam program ATENSI ini secara keseluruhan mampu mengatasi masalah inklusivitas dengan target kelompok sasaran yang lebih menyeluruh serta mampu menyatakan value program dengan jelas. Kondisi mental anak yatim/piatu setelah tidak ada orang tua terdapat perubahan dan trauma seperti sering menangis, sering menyendiri, menjadi bandel dll. Kondisi finansial keluarga juga mengalami penurunan karena kehilangan satu sumber pendapatan. Implementasi kebijakan ATENSI berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, meskipun terdapat beberapa kendala seperti SDM yang terbatas, koordinasi yang kurang efektif, dan adanya pembatasan untuk melakukan pertemuan karena meningkatnya kasus Covid-19.

Di sisi lain, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti jenis bantuan yang diberikan hanya bantuan material saja, belum ada pendampingan psikososial dan peningkatan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan anak yatim/piatu. Hal ini tentunya menyebabkan bantuan yang diberikan kurang terdapat nilai keberlanjutannya, karena bantuan uang tidak bersifat jangka panjang. Dalam hal ini program ATENSI tahun 2021 yang telah berjalan dapat menjadi evaluasi untuk pembuatan kebijakan sosial selanjutnya yang lebih baik.

The background of the page features a repeating pattern of light blue and white stylized flowers and leaves, creating a delicate, organic texture.

# Research Days

2022

**Pemberian Ulasan Pasca pembelian Produk Makanan dan Minuman  
(Studi Kasus Praktik Customer Brand Advocacy pada Akun Finstagram)**

Gabriel Possenti Bisma Bagaskara

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Banyak orang melakukan aktivitas *Electronic Word of Mouth* (eWOM) di media sosial. Dari sekian banyak media sosial yang ada, terdapat individu yang memilih melakukan eWOM di akun Instagram palsu atau *fake-Instagram* (*finstagram*). Hal tersebut merupakan fenomena yang unik. Namun, belum terdapat penelitian yang membahas mengenai aktivitas eWOM pada akun *finstagram*. Di sisi lain, *finstagram* sejauh ini hanya diteliti sebagai media alter ego, pengungkapan diri, dan media untuk melakukan voyeurisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi dan proses individu dalam menentukan media, topik, dan menyajikan konten bermuatan *Customer Brand Advocacy* (CBA) mengenai produk makanan dan minuman di *finstagram*. Penelitian dilakukan untuk memperkaya kajian Ilmu Komunikasi pada bidang komunikasi pemasaran dan media baru, khususnya mengenai aktivitas CBA dan eWOM serta penggunaan *finstagram*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Peneliti tidak berusaha untuk melawan konsep yang sudah ada, melainkan untuk memaparkan konsep yang sudah ada dalam fenomena yang belum pernah diteliti. Peneliti menggunakan dua orang informan sebagai subjek penelitian: laki-laki berusia 22 tahun bernama Aufar dan perempuan berusia 20 tahun bernama Abigail. Objek dalam penelitian ini adalah aktivitas mengulas makanan dan minuman, proses penyebaran CBA pada *finstagram*, serta motivasinya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung dan wawancara.

Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa *finstagram* mampu menjadi wadah untuk menyebarkan informasi pemasaran berjenis *earned media*. Hal menarik yang peneliti temukan adalah aktivitas mengulas makanan/minuman yang dilakukan Aufar dan Abigail di *finstagram* merupakan cara mereka untuk mengekspresikan diri, menampilkan diri yang lain, dan mengungkapkan jati diri yang sesungguhnya. Aufar dan Abigail melakukan ulasan makanan/minuman di *finstagram* karena keduanya suka berbagi dan berbicara. Peneliti juga menemukan bahwa motivasi yang mendorong Aufar dan Abigail melakukan ulasan makanan/minuman di *finstagram* disebabkan oleh konstruksi sosial kedekatan hubungan dan pengaruh informasional serta konstruksi personal altruisme. *Finstagram* merupakan media alternatif, sehingga aktivitas bermedia informan didorong oleh motivasi untuk mencari sesuatu yang tidak mampu didapatkan ketika menggunakan media sosial lain.

Dilihat dari analisis mengenai ciri-ciri seorang advokat, peneliti menyimpulkan Aufar dan Abigail termasuk sebagai advokat. Keduanya memiliki gaya komunikasi yang bertenaga, eksplisit, dan antusias; proaktif; dan bertindak seperti *salesperson* dari jenama yang diulas. Meski termasuk advokat, Aufar tidak melakukan aktivitas CBA di *finstagram* karena jenama makanan yang paling ia percaya, Nasi Kuning 354, tidak ia ulas di *finstagram*. Sementara itu, Abigail melakukan aktivitas CBA di *finstagram* terhadap jenama Hangry. Motivasi Abigail melakukan CBA didorong oleh faktor relasional *Brand Trust*, *Customer Satisfaction*, *Customer-based Brand Equity*, *Affective Commitment*, dan *Normative Commitment*. Hangry mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Abigail dibandingkan jenama lain yang ia ulas. Jenama makanan/minuman lain hanya diulas sekali oleh

Abigail, sementara *Hangry* ia ulas setidaknya tiga kali. Ulasan Abigail terhadap *Hangry* mengandung rekomendasi yang kuat, pujian, ajakan untuk membeli, dan informasi mengenai promo produk *Hangry*.

## **Strategi Resiliensi Pengemudi Ojek Difabel Selama Pandemi COVID-19**

Gratha Ayunisa Agsyanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Penyandang difabel yang merupakan golongan kelompok marginal harus dihadapkan pada kondisi Pandemi COVID-19 yang penuh risiko. Hal ini menjadikan individu tersebut sangat rentan mendapatkan ketidaksetaraan, terhambat mencapai kesejahteraan, hingga dapat mengalami ketimpangan sosial. Terdapat tuntutan bagi penyandang difabel untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi lebih pada kondisi sulit yang harus dihadapi sebagai pengemudi ojek dengan kondisi fisiknya selama Pandemi COVID-19. Dari latar belakang permasalahan tersebut pun dirumuskan pertanyaan penelitian ‘Bagaimana strategi resiliensi pengemudi ojek difabel selama Pandemi COVID-19?’.

Konsep strategi resiliensi digunakan untuk membantu memberikan pemahaman pada temuan penelitian. Strategi resiliensi dianalisis dari tindakan sosial yang diambil oleh pengemudi ojek difabel. Tindakan tersebut pun dianalisis berdasarkan motif dari subjek untuk mengambil pilihan rasional instrumental dan rasional nilai. Kedua konsep ini digunakan untuk menjustifikasi bentuk strategi yang dilakukan oleh pengemudi ojek difabel selama Pandemi COVID-19. Selanjutnya, Konsep strategi resiliensi difokuskan pada resiliensi oleh individu dan resiliensi sosial. Penggunaan konsep tersebut menunjukkan relevansi dengan hasil temuan lapangan. Resiliensi pada individu ditunjukkan melalui karakteristik pada masing-masing pengemudi ojek difabel dalam bentuk strategi coping dan perilaku adaptasi positif. Konsep resiliensi sosial juga digunakan dalam menganalisis peranan komunitas Difabike dalam mendukung strategi resiliensi anggotanya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Komunitas Difabike menjadi kelompok dari pengemudi ojek difabel di Kota Yogyakarta yang dipilih sebagai subjek penelitian. Temuan lapangan pun kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik hingga didapatkan tema yang dapat dituliskan secara runtut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dampak dari Pandemi COVID-19 dan strategi resiliensi pengemudi ojek difabel. Dampak dari Pandemi COVID-19 yang ditunjukkan adalah risiko ekonomi dari pekerjaan yang tidak lagi menghasilkan dan masalah ekonomi dari adanya keharusan menanggung kebutuhan keluarga. Selain itu, terdapat risiko sosial yang ditunjukkan dari adanya stres dan perasaan bingung, serta kekhawatiran mendapat stigma dari masyarakat.

Bentuk tindakan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 kemudian diidentifikasi sebagai strategi resiliensi. Tindakan pengemudi ojek difabel yang menjadi bentuk dari strategi resiliensi pada masing-masing individu. Beberapa tindakan tersebut pun berupa, antara lain: (1) Manajemen stres dan perasaan bingung, (2) Pengelolaan finansial, (3) Diversifikasi kerja, (4) Memanfaatkan dukungan sosial, dan (5) Memanfaatkan kesempatan baru untuk mengembangkan relasi.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa strategi resiliensi turut didukung dari adanya peran komunitas Difabike. Resiliensi sosial menjadi sebuah konsep yang linier dengan temuan pada peran komunitas Difabike dalam mendukung strategi resiliensi pengemudi ojek difabel. Penelitian ini merefleksikan aspek-aspek yang mampu mendorong resiliensi sosial. Komunitas Difabike secara eksplisit menunjukkan peran dalam kepemilikan aspek jaringan sosial dan aspek pengetahuan, keterampilan, dan pembelajaran dalam mendorong resiliensi sosial. Sistem operasional dari

komunitas Difabike secara implisit pun mendorong pada aspek keberagaman dan ekonomi inovatif. Kaitan peranan komunitas Difabike, baik secara eksplisit maupun implisit dengan resiliensi sosial pun terdapat pada implikasinya terhadap eksistensi komunitas. Terdapat pula refleksi dari temuan yang menunjukkan bahwa peran komunitas Difabike belum sepenuhnya mampu berkontribusi dalam memenuhi aspek resiliensi sosial. Aspek infrastruktur komunitas, keterlibatan pemerintah, serta aspek hubungan manusia-lingkungan tidak dimunculkan dari keterlibatan komunitas Difabike selama Pandemi COVID-19.

## **Perubahan Implementasi Program Bina Keluarga Lansia Khusnul Khotimah Dusun Munggur Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Di Masa Pandemi Covid-19**

Hasna Nur Afifah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Kerentanan yang dialami lansia di usia senjanya menjadi diskusi penting di ranah pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan hal tersebut dengan menghadirkan kebijakan/program yang berbasis pada lansia salah satunya Program Bina Keluarga Lansia. Namun, bencana pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 membawa implikasi di berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali terhadap implementasi Program Bina Keluarga Lansia. Dari latar belakang fenomena tersebut penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi dalam implementasi Program Bina Keluarga Lansia terkhusus di kelompok BKL Khusnul Khotimah. Oleh sebab itu penelitian ini berjudul **Perubahan Implementasi Program Bina Keluarga Lansia Khusnul Khotimah Dusun Munggur, Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul Di Masa Pandemi Covid-19**.

Konsep implementasi Edwards III dan konsep perubahan implementasi di masa pandemi Covid-19 akan membantu peneliti menjelaskan dan pemaparkan permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat suatu rumusan permasalahan yaitu bagaimana perubahan implementasi Program Bina Keluarga Lansia Khusnul Khotimah Dusun Munggur, Srimartani, Piyungan, Kabupaten Bantul di Masa Pandemi Covid-19? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mendeskripsikan secara lebih mendalam perubahan seperti apa yang terjadi dalam implementasi Program Bina Keluarga Lansia di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kelompok Bina Keluarga Lansia. Teknik pengumpulan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive yang ditentukan berdasarkan statusnya dalam Program Bina Keluarga Lansia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka yang kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan teknik thematic analysis sehingga mendapatkan data temuan yang sesuai realita di lapangan.

Melalui jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, tersebut penelitian ini mampu menarik beberapa kesimpulan yang mengacu pada rumusan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Beberapa kesimpulan tersebut diantaranya Program Bina Keluarga Lansia Khusnul Khotimah memberikan dampak yang langsung bisa dirasakan kelompok lanjut usia yang dapat dilihat dari implementasi program di masa pandemi Covid-19 meliputi kegiatan pengajian rutin, senam sehat, kerja bakti, dan sekolah, lansia. Akan tetapi, semenjak kemunculan pandemi Covid-19 implementasi Program BKL Khusnul Khotimah sempat terhenti dan berjalan kembali dengan memberlakukan adaptasi melalui adopsi teknologi. Namun semenjak kemunculan pandemi Covid-19 implementasi Program BKL Khusnul Khotimah sempat terhenti dan berjalan kembali dengan memberlakukan adaptasi melalui adopsi teknologi digital dalam salah satu kegiatan yaitu Sekolah Lansia. Adopsi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat gadget menggunakan WhatsApp sebagai media utama implementasi kegiatan sekolah lansia dalam BKL Khusnul Khotimah di masa pandemi Covid-19. Adopsi teknologi digital tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini

Berdasarkan hasil analisis perubahan implementasi yang terjadi di BKL Khusnul Khotimah di satu sisi menunjukkan adanya keberlanjutan program di masa pandemi Covid-19. Namun, di sisi

yang lain program yang berlanjut tersebut memberlakukan perubahan implementasi melalui upaya inovatif dengan adopsi teknologi digital tetapi peneliti menangkap bahwa sayangnya perubahan implementasi tersebut belum mempertimbangkan perspektif, kondisi, dan kebutuhan lansia di masa pandemi Covid-19 dalam hal kemampuan, akses, dan familiaritas lansia dalam teknologi digital.

## **Pembingkaian Berita Bencana di Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Bencana Banjir NTT di Kompas.com dan Pos-Kupang.com)**

M. Fadhil Pramudya P.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Ilmu Komunikasi UGM

Sepanjang tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia menyebut bahwa banjir mendominasi bencana di Indonesia dengan 660 kejadian. Dengan melihat bencana sebagai sebuah event besar yang tidak bisa dilewatkan, media menjadikan bencana sebagai berita yang memiliki nilai penting bagi khalayak, tak terkecuali bagi media nasional dan media lokal daerah. Bencana banjir yang melanda provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membuat Kompas.com dan Pos-Kupang.com sebagai media yang cukup masif dalam meliput peristiwa tersebut. Dalam situasi bencana, media akan menonjolkan aspek tertentu dalam berita, termasuk dalam pemilihan kata, penggunaan visual berita, hingga narasumber yang sesuai dengan sudut pandang media tersebut. Berangkat dari penjabaran tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Pembingkaian Berita Bencana di Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Bencana Banjir NTT di Kompas.com dan Pos-Kupang.com)”.

Peneliti memilih dua media tersebut dengan berbagai pertimbangan. Kompas.com sebagai media nasional merupakan salah satu pionir hadirnya media online di Indonesia, yang berdiri pada 14 September 1995. Kompas.com juga menjadi media terpopuler yang paling banyak dikunjungi pada April 2021, yang mana merupakan periode terjadinya bencana banjir NTT, berdasarkan situs pemeringkatan website SimilarWeb. Sementara itu, Pos-Kupang.com merupakan media lokal NTT dan berada dalam jaringan media atau grup yang sama dengan Kompas.com, yakni Kompas Gramedia Group. Selain itu, kedua media tersebut tercatat sudah terverifikasi administratif dan faktual oleh Dewan Pers.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Pan dan Kosicki, yakni berdasarkan pada empat dimensi struktur, yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retoris. Untuk melihat lebih jauh pembingkaian yang dilakukan oleh kedua media tersebut, peneliti juga menggunakan konsep prinsip jurnalisme bencana berdasarkan Seeds Technical Service Knowledge-Links, yakni prinsip akurasi, prinsip lingkungan dan pembangunan, prinsip keseimbangan, dan prinsip tindak lanjut. Konsep tersebut digunakan setelah peneliti melakukan analisis framing berdasarkan model Pan dan Kosicki.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan oleh kedua media pada struktur sintaksis dan tematik. Sementara itu, untuk struktur skrip dan struktur retoris, kedua media memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya, pada masing-masing tujuh berita yang dipilih, seluruhnya menerapkan prinsip akurasi. Sementara itu, dari tujuh berita tersebut, berita Kompas.com juga menerapkan prinsip lingkungan dan pembangunan serta prinsip tindak lanjut. Untuk Pos-Kupang.com, dari tujuh berita yang dipilih, terdapat satu berita yang menerapkan prinsip keseimbangan dan tiga berita yang menerapkan prinsip tindak lanjut.

Penelitian ini juga memunculkan diskusi lebih lanjut. Di antaranya adalah bagaimana praktik jurnalisme bencana oleh Kompas.com dan Pos-Kupang, peran kedua media dalam meliput bencana banjir NTT, dan penerapan prinsip akurasi yang muncul dalam berita yang dipilih pada kedua media tersebut. Namun, penelitian ini melihat bahwa informasi bencana yang dipraktikkan kedua media memunculkan wacana yang menganggap banjir sebagai peristiwa tunggal tanpa pemahaman lebih lanjut bagaimana krisis iklim juga turut mempengaruhi banjir. Pemberitaan kedua media masih cenderung berfokus pada dampak yang dirasakan oleh manusia dan kerusakan infrastruktur yang

muncul pascabencana, misalnya siapa saja yang menjadi korban bencana, berapa jumlah korban bencana, dan apa yang dihancurkan akibat bencana.

**Keterlibatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Wilayah Rawan Banjir Pesisir**

**(Studi tentang Implementasi Program Mas Dana [Masyarakat Sadar Bencana] oleh PT Pertamina Integrated Terminal Semarang di Kelurahan Kemijen)**

Nepo Erbianto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Dalam perkembangannya, kondisi alam menunjukkan dinamika alamiah yang sulit terprediksi dan sering kali di luar dugaan sehingga dipandang perlu membangun sistem penanggulangan bencana yang ilmiah dan komprehensif. Penggunaan pendekatan reaktif-struktural belum sepenuhnya mengatasi masalah secara utuh sehingga masih menyisakan persoalan serius. Tanggungjawab mengatasi persoalan pelik tersebut tidak hanya mengandalkan Pemerintah Kota Semarang dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semata, tetapi juga memerlukan usaha keras dan kerja sama termasuk melibatkan sektor bisnis seperti perusahaan. Bencana merupakan isu yang berkembang secara masif selama satu dekade terakhir sehingga tidak heran menjadi perhatian banyak pihak, salah satunya PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Semarang. Perusahaan tersebut menginisiasi program Mas Dana di Kelurahan Kemijen dalam upaya pengurangan risiko terhadap bencana.

Secara empiris, hadirnya program Mas Dana di Kelurahan Kemijen sangat terkait dengan masalah banjir pesisir. Acapkali bencana banjir pesisir tidak bisa diprediksi kapan terjadi sehingga menyiapkan sumber daya yang sigap dan proaktif merupakan solusi alternatif. Tujuan inilah yang ingin dicapai oleh program Mas Dana. Sebelum bencana banjir pesisir tiba, masyarakat sudah dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam menghindari dan mengurangi risiko bencana. Respons positif terhadap keberadaan program Mas Dana dapat menjadi energi bagi banyak pihak untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*) mampu menarik beberapa kesimpulan yang mengacu kepada rumusan masalah. Program Mas Dana binaan PT Pertamina Integrated Terminal Semarang berdasarkan aktivitas-aktivitasnya termasuk ke dalam program pemberdayaan masyarakat, meskipun pada akhirnya PT Pertamina Integrated Terminal Semarang memandang perlu ada pemberian *charity*. Pemberian *charity* tersebut dilakukan secara selektif ketika dalam kondisi “darurat”. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi program Mas Dana binaan PT Pertamina Integrated Terminal Semarang belum optimal. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian diantara tiga elemen kesesuaian implementasi program gagasan David C. Korten. Meski pada pelaksanaan program PT Pertamina Integrated Terminal Semarang sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan *Community Development Officer* (CDO) sebagai pendamping program sudah maksimal dalam menjalankan tugas beserta fungsinya, tetapi ada ketidaksesuaian antara syarat yang diputuskan oleh organisasi pelaksana dengan apa yang dilakukan oleh kelompok penerima manfaat sehingga masyarakat Kemijen belum maksimal memanfaatkan output program. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh adanya kegagalan komunikasi dan koordinasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain sehingga menjadi penghambat implementasi program Mas Dana.

Implementasi program CSR oleh perusahaan merefleksikan sejauh mana keterlibatan perusahaan tersebut terhadap upaya menukseskan tujuan program. Implementasi program Mas Dana menunjukkan bahwa PT Pertamina Integrated Terminal Semarang berperan serta dalam

upaya mengurangi risiko bencana di Kelurahan Kemijen melalui tiga hubungan keterlibatan, yaitu: pertama, *charity* dan *philanthropy*, dalam bentuk bantuan ketika banjir pesisir melanda, bantuan sumber daya peralatan penunjang PRB; kedua, kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti institusi lokal—KSB dan SIBAT, Pemerintah Kelurahan Kemijen, BPBD Kota Semarang. Sinergitas di antara pemangku kepentingan yang terlibat menunjukkan tanggung jawabnya secara bermakna, bukan hanya sekadar omong kosong belaka; dan ketiga, adversarial, keterlibatan perusahaan dalam bentuk program Mas Dana merupakan respon untuk membina relasi harmonis dengan masyarakat diwilayah sekitar.

## **Strategi dan Peran HopeHelps dalam Advokasi Kekerasan Seksual di Ranah Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah**

Nourma Dewi Fatmawati

Departemen Sosiologi

Kekerasan seksual merupakan salah satu fenomena sosial yang dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, yang bahkan dapat terjadi yang dianggap sebagai ruang aman. Mirisnya, kasus tertinggi pelecehan seksual berasal dari perguruan tinggi (Sihombing dalam Ishak, 2020). Perguruan tinggi menyumbang tingginya angka statistik kekerasan seksual yakni di tahun 2020 saja terdapat 2.400 kasus kemudian terdapat peningkatan di tahun selanjutnya yaitu 2021 dalam kurun waktu Bulan Januari hingga Juli terjadi peningkatan yakni dengan jumlah 2.500 kasus (kemendikbud.go.id., 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini membahas tentang strategi advokasi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pemaparan dalam penelitian ini berupa strategi yang dilakukan dan dibangun oleh HopeHelps selama advokasi kekerasan seksual beserta dinamika jejaring sosial. HopeHelps sendiri merupakan satuan tugas (satgas) pengada layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia. HopeHelps memiliki nilai-nilai yang diusung yakni bersifat sukarela, bertanggung jawab, tidak diskriminatif, berperspektif korban.

Melalui penelitian ini ditemukan sebuah poin-poin menarik yang mampu menjawab rumusan masalah yang didesain sebelumnya. Diketahui kemudian bahwa sebelum melakukan pendampingan kasus, para pendamping yang terlibat telah melewati proses pelatihan yang disebut *Grand Training* HopeHelps (GTH). Setiap kasus kekerasan seksual yang masuk akan diterima pertama kali ke *hotline* HopeHelps *local chapter* (LC). Dari sini kemudian mereka melakukan berbagai strategi dan bekerja sama dengan berbagai lembaga hukum dan atau psikologi untuk membantu penanganan kasus. Selain itu, para pendamping juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kampus untuk proses penyelesaian level universitas, yang hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan korban. Kemudian apabila LC membutuhkan saran dan diskusi lebih lanjut mengenai kasus, maka akan melakukan proses eskalasi ke HopeHelps Pusat atau network melalui grup sebagai wadah koordinasi dan komunikasi bersama untuk penyelesaian kasus yang sedang dihadapi.

Kepengurusan sehari-hari HopeHelps dilakukan dengan memperluas jejaring yang kemudian terkoneksi dan terintegrasi dengan banyak lembaga hukum, lembaga psikologi, koalisi, dan lain-lain. Adapun koordinasi dan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu melakukan kegiatan lain berupa kampanye di media sosial. Media sosial dimanfaatkan sebagai ajang untuk merepresentasikan ekspresi, eksistensi, dan citra diri organisasi. Dengan kata lain, media sosial digunakan untuk mengakomodir berbagai kepentingan organisasi. Hal ini yang sejatinya juga berfungsi untuk memperluas jejaring dan modal sosial serta proses advokasi kasus.

## **Asosiasi Usia Melahirkan Ibu dan Kemampuan Kognitif Anak pada Usia 8-9 Tahun**

Pitaloka Ainun Yasmin

Departemen Sosiologi

Usia 8-9 tahun merupakan usia yang krusial bagi pertumbuhan anak. Pada usia ini, anak memiliki pemikiran yang terorganisir dan rasional. Bukti pada penelitian kesehatan masyarakat menunjukkan bila determinan yang berasosiasi dengan perkembangan kognitif anak adalah usia melahirkan ibu. Perbedaan usia melahirkan antar ibu berimplikasi pada perbedaan kemampuan kognitif anak. Sayangnya, bahasan serupa menggunakan perspektif ilmu sosial-humaniora belum banyak dilakukan. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini hendak mengkaji asosiasi antara usia melahirkan ibu dan kemampuan kognitif anak usia 8-9 tahun dan perbedaan kemampuan kognitif anak antara ibu melahirkan di usia remaja dan ibu melahirkan di usia dewasa. Berdasarkan studi terdahulu, ibu berusia remaja (<20 tahun) dan ibu berusia dewasa sangat lanjut (>45 tahun) cenderung memiliki anak dengan kemampuan kognitif rendah. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui *Indonesia Family Life Survey (IFLS 5)*, mewakili seluruh Indonesia dengan cakupan 13 provinsi dan 83% penduduk. Penelitian ini merupakan kajian kuantitatif interdisipliner antara bidang kedokteran dan sosiologi. Bahasan ini menggunakan teori utilitarianisme dan pertukaran sebagai pisau analisis.

Berdasarkan analisis data panel IFLS 5 dapat diketahui bila terdapat perbedaan peluang masing-masing variabel saat berasosiasi dengan skor kemampuan kognitif anak. Dengan mengontrol variabel lain, anak perempuan memiliki skor kognitif lebih rendah 0,14 poin daripada anak laki-laki. Selain itu, peningkatan 1 tahun usia ibu (khususnya, ibu berusia >45 tahun) saat melahirkan berasosiasi dengan penurunan skor kognitif anak sebesar 0,003 poin. Anak yang tinggal di pedesaan memiliki skor lebih rendah 0,5 poin daripada anak yang tinggal di perkotaan. Ibu berpendidikan menengah berperan dalam peningkatan skor kemampuan kognitif anak sebanyak 0,2 poin. Sementara itu, ibu berpendidikan tinggi berperan dalam peningkatan skor kemampuan kognitif anak sebesar 0,73 poin. Terakhir, ibu yang tidak dapat menggunakan internet memiliki anak dengan skor kemampuan kognitif lebih rendah 0,24 poin daripada ibu yang mampu menggunakan internet. Keseluruhan analisis ini hanya menjelaskan 4% varian dari keseluruhan faktor yang berasosiasi dengan kemampuan kognitif anak. Berdasarkan perbandingan usia, ibu dalam kelompok usia *Advanced Maternal Age* (35-45 tahun) memiliki skor anak lebih tinggi 0,271 poin daripada ibu dari kelompok usia *Childbirth at Young* (<20 tahun). Sedangkan, skor kemampuan kognitif anak dari ibu kelompok usia *Very Advanced Maternal Age* (>45 tahun) lebih rendah sebesar 0,362 poin dari ibu dari kelompok *Advanced Maternal Age* (35-44 tahun). Ini artinya, semakin dewasa usia ibu, maka semakin tinggi skor kemampuan kognitif anak. Namun angka ini akan menurun bila ibu berusia terlalu dewasa. Secara Sosiologis, ibu dengan keuntungan sosial-ekonomi sedikit (usia muda, pendidikan rendah, hingga akses informasi yang kurang) berimplikasi pada perkembangan kognitif anak yang rendah. Kemudian, perkembangan kognitif anak yang rendah berimplikasi pada keuntungan sosial-ekonomis yang sedikit. Sebaliknya, anak dengan kemampuan kognitif lebih baik tentu memiliki keuntungan sosial-ekonomis yang lebih besar. Hal tersebut menciptakan siklus permasalahan kompleks lintas generasi. Dalam hal ini, ibu memiliki peran penting karena umumnya menjadi caregiver anak serta memiliki intensitas interaksi lebih besar dibandingkan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang komprehensif, khususnya pada ibu guna menyelesaikan permasalahan ini.

The background of the page features a repeating pattern of light blue and white stylized flowers and leaves, creating a delicate, organic texture.

# Research Days

2022

**Fandom dan Partisipasi Politik: Studi Kasus Fandom ARMY Indonesia  
dalam Aksi Tolak Omnibus Law Indonesia di Twitter**

Rahajeng Maharani Putri

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Dunia kini dilanda oleh budaya populer dari Korea Selatan yang disebut sebagai Korean Pop atau K-Pop. Dalam *fandom* K-Pop sendiri, ada kecenderungan bahwa *fandom* K-Pop mendapat caci maki dan stereotipe negatif dari publik. Mereka sering dicap sekumpulan orang yang dangkal, sehingga digolongkan sebagai massa yang pasif karena tidak dapat mengkritisi suatu isu. Padahal, *fandom* K-Pop ini aktif dan memiliki kekuatan yang besar dalam melakukan berbagai aksi. Hal ini dapat dilihat dari *fandom* K-Pop yang membuat *prank* di kampanye pencalonan presiden Donald Trump di Tulsa, ikut berdonasi dalam #BlackLivesMatter hingga turut dalam aksi tolak *Omnibus Law* Indonesia di Twitter.

Berdasarkan data milik *Social Network Analysis* (SNA) Drone Emprit, *fandom* K-Pop yang dinilai dangkal dan apatis ternyata mengisi kluster percakapan yang kontra dengan *Omnibus Law* Indonesia. Berangkat dari keunikan inilah, tulisan ini akan melihat partisipasi politik yang dilakukan *fandom* ARMY Indonesia di ranah politik dengan mengambil kasus penolakan *Omnibus Law* Indonesia di Twitter. Berdasarkan hal tersebut, muncul pokok pertanyaan utama yaitu bagaimana partisipasi politik *fandom* ARMY Indonesia dalam aksi tolak *Omnibus Law* Indonesia di Twitter.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan menggunakan kacamata kajian budaya partisipasi (*participatory culture*) dalam mendeskripsikan partisipasi yang *fandom* ARMY Indonesia lakukan dalam menolak *Omnibus Law* Indonesia di media sosial Twitter. Penelitian ini kemudian mampu menarik beberapa kesimpulan yang mengacu kepada rumusan masalah yang dibangun sebelumnya.

Penelitian ini melihat bahwa aksi tolak *Omnibus Law* Indonesia ini dilakukan di dua level, yaitu level komunitas dan level individu. Pertama adalah level komunitas, di mana pergerakan ARMY Indonesia dilihat melalui akun autobase @indomyfess. Banyak aksi yang dilakukan ARMY Indonesia untuk menolak *Omnibus Law* Indonesia, di antaranya adalah menaikkan tagar penolakan *Omnibus Law* Indonesia, meniadakan aktivitas budaya *fandom* untuk sementara, saling mengedukasi seputar *Omnibus Law* Indonesia, menyebarkan infografis terkait dampak yang ditimbulkan jika *Omnibus Law* Indonesia tetap disahkan, hingga menyebarkan tautan petisi untuk ditandatangani oleh ARMY Indonesia lainnya.

Kedua adalah level individu, di mana peneliti mengambil empat orang yang tergabung dalam *fandom* ARMY Indonesia. Mereka berempat turut melakukan berbagai aksi penolakan, di antaranya menaikkan tagar dan mengajak untuk menaikkan tagar, menandatangani petisi dan menyebarkan petisi, mengunggah twit protes terhadap adanya *Omnibus Law* Indonesia, mengunggah twit seputar *Omnibus Law* Indonesia dengan tujuan mengedukasi, melakukan diskusi, menyebarkan dan membagikan informasi seputar *Omnibus Law* Indonesia, menghentikan aktivitas *fandom* untuk sementara, dan juga mengikuti perkembangan *Omnibus Law* Indonesia.

Aksi tolak *Omnibus Law* Indonesia oleh ARMY Indonesia di Twitter ini kemudian tidak hanya menunjukkan bahwa *fandom* K-Pop seperti ARMY Indonesia sebagai kumpulan massa yang aktif, namun juga menunjukkan bahwa mereka dapat membantu mendukung pembelajaran kewarganegaraan dan mengembangkan sumber daya dan praktik yang dapat dengan cepat memobilisasi banyak orang di media sosial. Lewat aksi ini, ARMY Indonesia yang awalnya hanya mencari kesenangan lewat BTS sebagai idola mereka dapat mengangkat isu-isu humanis, kemudian menggunakan keterampilan digital mereka untuk membuat hubungan sosial dengan membicarakan dan menggaungkan isu tersebut.

**Kesiapan Digital Mahasiswa untuk Beradaptasi dengan Kehumasan Digital**  
**(Survei Kesiapan dan Kecakapan Digital Mahasiswa Anggota Perhumas Muda Indonesia)**

Rizki Dwi Wibawa

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Praktik kehumasan digital menuntut pelaku praktik kehumasan baik di level profesional maupun mahasiswa untuk siap dan mampu beradaptasi dengan kecakapan ‘baru’: kecakapan digital. Berbagai organisasi dan firma Humas Indonesia saat ini telah mengadopsi teknologi digital dalam praktiknya seperti mahadata (*big data*), kecerdasan buatan, dan media sosial. Adopsi ini mengharuskan praktisi Humas dan mahasiswa untuk mengikuti perkembangan tren dunia dan tidak boleh gagap teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan kesiapan dan kecakapan digital mahasiswa anggota Perhumas Muda Indonesia.

Peneliti memilih Perhumas Muda Indonesia dengan sejumlah pertimbangan karena organisasi ini menjadi wadah bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan akademik dan profesional di bidang Humas. Selain itu, praktisi Humas profesional di tingkat daerah dan nasional ikut terlibat dalam berbagai kegiatan Perhumas Muda Indonesia. Melalui Perhumas Muda Indonesia, anggotanya mendapatkan pengetahuan dan kesempatan praktik secara langsung berbagai aktivitas kehumasan digital dengan bimbingan profesional.

Untuk menangkap fenomena kesiapan dan kecakapan digital, penelitian ini menggunakan metode survei daring dengan 79 responden yang merupakan anggota Perhumas Muda Indonesia di Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, Malang, Medan, Palembang, dan Denpasar. Rentang waktu pengisian survei ini adalah 28 Februari - 10 April 2022. Lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara dengan tujuh partisipan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai faktor yang memengaruhi mahasiswa anggota Perhumas Muda Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital.

Kesiapan digital mahasiswa anggota Perhumas Muda Indonesia tergolong pada level yang kurang siap dengan nilai rata-rata 2,45 khususnya pada aspek penunjang yaitu edukasi dan aksesibilitas. Kedua aspek tersebut belum siap untuk menunjang pengembangan pengetahuan dan keterampilan kehumasan digital mahasiswa anggota Perhumas Muda Indonesia. Meskipun demikian, mahasiswa anggota Perhumas Muda Indonesia memiliki kesiapan digital pada tataran individu yang mumpuni untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kehumasan digital secara mandiri.

Kecakapan digital mahasiswa anggota Perhumas Muda Indonesia tergolong pada level yang cakap digital dengan nilai rata-rata 3,27. Berbekal kecakapan tersebut, mahasiswa anggota Perhumas Muda Indonesia mampu melakukan praktik kehumasan digital: proses perancangan program kehumasan, pemilihan media dan target, pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi dan komunikasi dengan *stakeholder*, dan penyelesaian kendala digital.

Berdasar pada hasil wawancara, mahasiswa anggota Perhumas Muda Indonesia mampu meningkatkan keterampilan digitalnya berdasar pada dua faktor yaitu: signifikansi teknologi digital (*perceived usefulness*) dan ketersediaan waktu. Mahasiswa anggota Perhumas Muda Indonesia

melihat signifikansi dan urgensi teknologi digital bagi pekerjaan mereka yang mengharuskan partisipan untuk cakap digital. Selain itu, Pembelajaran daring akibat COVID-19 menyebabkan durasi pembelajaran semakin singkat dan partisipan memiliki waktu yang banyak untuk mengeksplor teknologi digital.

Peneliti juga menemukan bahwa Perhumas Muda Indonesia belum berdampak signifikan pada pengembangan kecakapan digital anggotanya yang menjadi informan dalam penelitian ini. Sejumlah faktor yang menyebabkan tidak signifikannya peran Perhumas Muda Indonesia adalah tidak aktifnya kepengurusan di sejumlah cabang Perhumas Muda Indonesia, anggota Perhumas Muda Indonesia yang belum memiliki perhatian dan pemahaman tentang isu digital, dan adanya pengawasan dari pengurus Perhumas mengenai tema diskusi di tingkat cabang Perhumas Muda Indonesia.

**HIBAH**

**PENELITIAN MAHASISWA**

**S2**

**Research  
Days**  
2022

**Digital Activism dalam Melawan Infodemic:  
KawalCOVID19 sebagai Media Penyedia Informasi pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia**

Agne Yasa

Departemen Ilmu Komunikasi

Persoalan infodemic yaitu informasi yang berlebihan dan tidak dapat dilacak kebenarannya muncul saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Situasi diperkeruh oleh komunikasi publik pemerintah yang tidak memadai dan kurangnya transparansi pemerintah. Akibatnya, ada gap informasi tentang COVID-19 yang membuat masyarakat tidak memahami risiko dari COVID-19 seperti tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga memperparah kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia.

Situasi ini mendorong lahirnya aktivisme di bidang informasi dalam bentuk media warga hingga kampanye konten digital oleh komunitas. Salah satunya adalah KawalCOVID19 yang memiliki keunikan karena konsisten hadir sejak awal pandemi dan berbasis relawan yang tersebar di berbagai negara. KawalCOVID19 memanfaatkan website dan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mendorong kebijakan berbasis data untuk penanganan pandemi yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan pertanyaan riset ini adalah: Bagaimana komunitas KawalCOVID19 melawan infodemic melalui media digital (website dan media sosial) pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia? Konsep *digital activism* digunakan untuk mengetahui bentuk aktivisme yang dilakukan oleh KawalCOVID19 melalui metode kualitatif dengan studi kasus tunggal.

Temuannya, KawalCOVID19 melakukan *digital activism* dalam melawan infodemic melalui beberapa upaya yaitu pengumpulan, verifikasi, dan analisis data; diseminasi informasi, dan kolaborasi.

Pengumpulan, verifikasi, dan analisis data dilakukan oleh tim data KawalCOVID19 yang berperan untuk memonitor perkembangan isu baik di Indonesia maupun luar negeri, mengumpulkan informasi yang beredar, mengecek akurasinya serta menganalisa. Contohnya, terkait jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19, tim data mengumpulkan informasi dari pemerintah daerah dan pusat, mengecek akurasinya dengan membandingkan data dari daerah hingga pusat, kemudian melakukan analisa yang hasilnya adalah terdapat diskrepansi data daerah versus pusat.

Diseminasi informasi dilakukan dengan menyebarkan informasi lewat website dan media sosial KawalCOVID19 dengan muatan isi informasi seperti data kasus COVID-19, edukasi seperti cara menggunakan masker, dan verifikasi untuk melawan hoaks seperti ivermectin obat COVID-19. Website dan media sosial dipilih karena menjadi sumber penyebaran informasi sekaligus tempat infodemic beredar saat pandemi COVID-19. Selain itu, sesuai dengan keahlian dan kondisi tim KawalCOVID-19 yang tersebar di berbagai negara.

Kemudian, KawalCOVID19 melakukan kolaborasi untuk menggandeng pakar di bidang kesehatan, seperti dokter dan epidemiolog serta penyintas COVID-19 untuk berkontribusi dalam memberikan edukasi tentang COVID-19. Selain itu, kolaborasi juga dilakukan dengan media konvensional dan institusi lain untuk memperluas jangkauan informasi dan edukasi tentang COVID-19.

Namun, KawalCOVID19 mengadapi lima tantangan yaitu persoalan transparansi data, literasi masyarakat, isu politik, komunikasi dan kebijakan yang belum memadai, dan limitasi jangkauan dan relawan.

Praktik aktivisme yang dilakukan KawalCOVID19 masuk dalam kategori *digital gladiatorial activities* dengan bentuk aktivitas *data activism*. KawalCOVID19 melakukan pengumpulan, verifikasi, dan analisis data sebagai basis untuk menyebarkan informasi dan advokasi kebijakan pada pemerintah untuk penanganan pandemi yang lebih baik.

*Digital activism* KawalCOVID19 memberikan sumber media alternatif untuk masyarakat di saat adanya gap informasi dan kebijakan pemerintah yang belum memadai. *Digital activism* mendorong perlawanan pada hoaks dan kebijakan pemerintah yang lebih adekuat. Dalam konteks demokrasi, keberadaan internet, memberi peluang untuk masyarakat terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 yang lebih baik. Namun, di Indonesia, kekuatan media digital masih perlu dukungan dari media konvensional.

## **Penyegelan Batu Satangtung: Dominasi Wacana “Agama” dan Bertahannya Praktik Diskriminasi terhadap Penganut Agama Lokal Sunda Wiwitan**

Dwiki Yulian Reynaldi

Departemen Politik dan Pemerintahan

Penganut Sunda Wiwitan merupakan salah satu pihak dari kelompok agama lokal yang seringkali mendapatkan kekerasan dan perlakuan diskriminatif secara sosial ataupun politik. Konflik terkait sebuah area yang direncanakan oleh para penganut Sunda Wiwitan Cigugur sebagai pemakaman leluhur mereka justru berujung penyegelan yang terjadi pada bulan Juli tahun 2020. Bakal makam tersebut dinilai pemerintah tidak memenuhi persyaratan legal administratif, yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan dinilai berpotensi menyebabkan disharmoni sosial. Alasan lainnya ialah bahwa bakal makam tersebut berpotensi digunakan sebagai “tempat penyembahan” dan menodai ajaran Islam, maka sudah semestinya pembangunan bakal makam tersebut dihentikan. Lantas mengapa praktik diskriminasi berbasiskan agama tersebut senantiasa bertahan?

Peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang Sunda Wiwitan yang selalu erat kaitannya dengan relasi kuasa menguasai, khususnya dengan kelompok “agama”. Berbagai wacana yang terproduksi dari sejarah Panjang tersebut nyatanya berhasil bertahan dan menjadi wacana dominan dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan keseharian. Peristiwa penyegelan tersebut menegaskan bahwa dominasi wacana “agama” terbukti berdampak pada ketiadaan pilihan penganut Sunda Wiwitan Cigugur yang secara sadar atau tidak sadar terarahkan pada nilai dan kepentingan wacana dominan. Kelompok Sunda Wiwitan terjebak pada pusaran algoritma wacana “agama”, sehingga membuat posisi dan kondisi mereka senantiasa kabur. Bertahannya praktik diskriminasi terhadap agama lokal Sunda Wiwitan disebabkan oleh hal berikut: 1) Kuasa wacana “agama” yang masih dominan dan bertahan, dan hal ini berimbang pada normalisasi cara pandang dikotomis dalam memandang agama lokal; 2) Keberadaan kebijakan-kebijakan yang merugikan kelompok agama lokal masih dijadikan rujukan utama dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan; 3) Upaya resistensi yang dilakukan justru turut berkontribusi pada bertahannya stigmatisasi dan diskriminasi, bukan sebaliknya.

## Literasi Digital Calon Pekerja Indonesia dan Self-control dalam Berbagi Konten Digital

Eka Widi Astuti

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Perkembangan transformasi komunikasi digital telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap segala aspek kehidupan manusia saat ini. Sudibyo (2021), menyebutkan bahwa integrasi negara ke dalam lanskap digital pada akhirnya membawa pengaruh konstruktif sekaligus dampak destruktif. Ketersediaan informasi yang berlimpah serta akses yang mudah dan efisien merupakan implikasi positif dari hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi komunikasi digital juga menimbulkan banyak dampak negatif seperti *cybercrime*, *cyber bullying*, hoaks, kebocoran data pribadi, dsb.

Berbagai kebiasaan negatif di atas pun kerap dilakukan oleh para pencari kerja luar negeri melalui berbagai platform komunikasi digital. Banyak informasi peluang kerja kerja luar negeri yang tersebar di media sosial tanpa memunculkan informasi-informasi penting seperti sumber berita/informasi, nama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang menempatkan, kualifikasi calon pekerja, lama kontrak kerja, dsb. Beberapa informasi tersebut bahkan menawarkan peluang kerja pada sektor informal/rumah tangga di negara-negara yang sedang moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mirisnya, informasi-informasi tersebut laris manis oleh tanggapan dan antusiasme para pencari kerja luar negeri. Berdasarkan data Crisis Center Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pengaduan masyarakat terkait penipuan peluang kerja luar negeri menempati posisi ke 17 dari 88 jenis pengaduan selama tahun 2018 s.d 2020 dengan jumlah 149 kasus. Mayoritas modus operandi dari kasus penipuan tersebut adalah melalui konten hoaks peluang kerja luar negeri dengan tagline proses cepat dan gaji besar sebagai iming-iming.

Sebagaimana Bahri (2021), Monggilo (2020), Fitriarti (2019) serta Raharjo et al. (2021) yang menyebut literasi digital sebagai solusi atas berbagai permasalahan hoaks, peneliti juga meyakini bahwa garis pembatas yang memisahkan kedua konsekuensi transformasi digital khususnya dalam ruang lingkup komunikasi adalah kompetensi literasi digital. Dalam upaya pengendalian hoaks, beberapa literatur di atas memposisikan literasi digital pada ranah pembentukan persepsi terhadap kredibilitas informasi/pesan digital. Dua elemen literasi digital yaitu kognitif dan kritikal berperan dalam proses berpikir seseorang sehingga tidak mudah terperdaya oleh konten hoaks (Bahri 2021).

Muara dari kompetensi literasi digital, selain berpengaruh pada persepsi seseorang dalam memahami kredibilitas sebuah informasi (Bahri 2021), juga berpengaruh terhadap kualitas *self-control* seseorang dalam berbagi konten digital (Sabrina 2019). Individu dengan kualitas *self-control* yang rendah akan menganggap bahwa perilaku ‘ikut-ikutan’ membuat, re-create, ataupun menyebarkan berita palsu/hoaks bukanlah sebuah hal besar, karena kaburnya batas antara fakta dan opini pada era *post-truth* (Sabrina 2019). Sejalan dengan pernyataan tersebut, penulis melihat adanya hubungan searah antara tingkat literasi digital CPMI dengan kualitas pemahaman CPMI terhadap kredibilitas informasi dan *self-control* dalam berbagi konten digital, khususnya yang berkaitan dengan informasi peluang kerja luar negeri. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengukur literasi digital CPMI Jawa Barat, dan 2) mengukur pengaruh

kompetensi literasi digital dan pemahaman kredibilitas informasi terhadap *self-control* CPMI dalam berbagi konten digital, khususnya terkait informasi peluang kerja luar negeri.

Penelitian ini akan menguji 3 hipotesis, sebagai berikut:

- H1 : Kompetensi literasi digital dan pemahaman kredibilitas informasi secara simultan mempengaruhi tingkat *self-control* CPMI dalam berbagi konten digital terkait informasi peluang kerja luar negeri
- H2 : Kompetensi literasi digital mempengaruhi tingkat *self-control* CPMI dalam berbagi konten digital terkait informasi peluang kerja luar negeri
- H3 : Pemahaman akan kredibilitas informasi mempengaruhi tingkat *self-control* CPMI dalam berbagi konten digital terkait informasi peluang kerja luar negeri

Penelitian ini berada dalam ranah paradigma positivistik. Sejalan dengan paradigma yang digunakan, maka penulis menggunakan metodologi kuantitatif dengan survei eksplanatif untuk menggali dan menjabarkan fakta serta temuan penelitian. Populasi CPMI Jawa Barat berjumlah 4.084 orang. Jumlah tersebut kemudian dikerucutkan kembali menjadi sampel penelitian dengan menggunakan rumus slovin dan Margin of Error sebanyak 3,5% sehingga diperoleh jumlah sampel sejumlah 699 responden.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama, yaitu: 1) indeks literasi digital CPMI Jawa barat berada pada tingkat kemahiran level 6 dengan kategori *advanced*, serta 2) literasi digital dan pemahaman CPMI terkait kredibilitas informasi, secara simultan dan terpisah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat *self-control* CPMI dalam berbagi informasi digital.

**Digital (platform) inequality:  
Informal food vendors' appropriation of on-demand food delivery services**

Dinda Primazeira

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Many scholarships have been examining food security. The earlier studies were focusing on the supply side of food security, making sure that food products were available without taking accessibility into consideration. In the following years, scopes of the discussions have expanded. Nowadays, food security became a more complex issues and/or phenomenon. In urban context, informal food sector played a very important role in maintaining food security by providing affordable and nutritious food.

The incorporation of technologies into agri-food systems is not a recent phenomenon. Previous studies have identified various roles of information and communication technology (ICT) to the informal food enterprises, showed that there were increasing attempts to understand implications of digital technologies to the urban food system, including the informal food sector. In Indonesia, the emergence of digital platforms transforming the contemporary issues surrounding digital technologies. The initiation of Gojek's ride-hailing service in 2015 started the economic transition to the platform economy. Hereinafter, the technology company on-demand food delivery service infiltrated the market with a new platform-based service that shifted the dynamics of urban food systems: GoFood—in the following years, numbers of similar services appeared. Despite the importance of digital technologies have been researched and confirmed, most studies covering on the utilization of ICT used technological determinism perspective, which perceives ICT as the most powerful tool in social transformation (Kretchmer, 2017). Meanwhile, informal food sector is consisting of various type of vendors.

To capture empirical findings of the informal food vendors' utilization of digital platforms from the digital inequality perspective, this research used interpretative approach that focusing on the utilization of on-demand food delivery services in Bandung. From the analytical process, the digital inequality presented in 1) attitudes towards the services; 2) utilization of other digital platforms; 3) familiarization of the services; and 4) utilization of the services. By the end of the discussion, the results generated in this study indicate the persistence inter-relations between offline and online realms, in which connected by the availability of digital capital and complemented by spatial capital. In conclusion, this research presented empirical findings to develop the building blocks of digital inequality studies in the platform economy.

In sum, the data contribute a clearer understanding of digital inequality, particularly in the emerging platform economy context. In addition, this study also provides new empirical knowledge surrounding the inter-relations between the online and offline entrepreneurial activities.

**Potret Kerja dan Resiliensi Generasi Muda Pekerja Lepas  
pada Sektor Ekonomi Platform Kreatif- Digital**

Devi Yulianita Victorine B.Q

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Berkembangnya industri *platformisasi* yang semakin pesat, pada satu sisi berkontribusi besar terhadap lapangan pekerjaan, namun di sisi lain *platformisasi* menghilangkan jenis kerja tetap dan memunculkan informalisasi baru pada kerja-kerja berbasis platform yang dicirikan sebagai mode fleksibilitas pasar kerja. Implikasi dari sistem pasar kerja fleksibel, pekerja terjebak dalam praktik kerja rentan yang ditandai dengan adanya upah, jam kerja, jaminan sosial, sistem kerja yang tidak pasti dan kerja-kerja temporer (Standing, 2011). Generasi muda terutama di negara-negara berkembang, merupakan salah satu bagian terbesar dari kelas prekariat. Selain itu pekerja di industri kreatif- digital atau pekerja *gig economy* ini juga belum mendapatkan prioritas di mata pemangku kebijakan terkait perlindungan sosial. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana potret kerja pekerja lepas dan bagaimana resiliensi pekerja di sektor ekonomi kreatif-digital?.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat potret kerja dan resiliensi generasi muda pekerja lepas di sektor ekonomi kreatif- digital. Manfaat dari penelitian ini ialah memberikan pemahaman mengenai isu ketenagakerjaan terkait, yang kemudian potensial dalam mendorong kebijakan yang inklusif terhadap pekerja informal utamanya pekerja lepas di sektor ekonomi kreatif- digital.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menggunakan kerangka *decent work* (kerja layak) oleh ILO, kerangka *fair-work* dan teori agensi oleh Antony Giddens.

Hasil penelitian ini terdiri dari tiga hal, pertama, pada sistem platform, platform Fastwork merepresentasikan mode kerja yang fleksibel. Selain itu, sistem kerja yang fleksibel ini berimplikasi pada hubungan kerja yang baru, yang justru mengendalikan para pekerja. Kedua, pada potret kerja, terdapat kondisi kerja yang belum memenuhi prinsip yang terdapat baik dalam konsep kerja layak (*decent work*) maupun konsep kerja adil (*fair work*). Ketiga, pada resiliensi, terdapat upaya pekerja untuk tetap bertahan melalui kolektifitas, namun masih pada tujuan kepentingan individu, bukan pada tataran struktural.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengkaji beberapa platform untuk mengkaji secara lebih luas terkait kondisi kerja layak maupun adil serta hambatan tercapainya kondisi kerja layak maupun adil. Kedua, menarik apabila melihat kepentingan di balik praktik penguasaan pasar oleh pemilik modal terkait industri platform, yang mana ia tidak hanya menjadi sebab perubahan tetapi juga sebagai bagian dari aktor perubahan ekonomi, sosial, politik.

Dari sisi praktis, peneliti memberikan rekomendasi terkait upaya mendorong perbaikan kondisi kerja yang layak maupun adil, antara lain: kepada pemerintah, memperkuat regulasi yang dapat melindungi pekerja di industri digital. Kepada perusahaan platform, mempraktikkan sistem kerja yang dapat melindungi para pekerjanya yang sesuai dengan prinsip kerja layak maupun adil. Kepada pekerja, memperkuat solidaritas sesama pekerja dalam meningkatkan kondisi kerja yang layak dan adil di ranah struktural maupun individual. Kepada masyarakat, memberikan pemahaman tentang kondisi kerja layak, serta turut mendorong perbaikan kondisi kerja layak bagi pekerja.

**Kontestasi antara Negara dan Masyarakat: Kasus Elektrifikasi di Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo**

Mohammad Farid Budiono

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Data dan fakta menunjukkan masih banyak masyarakat terutama di wilayah desa yang belum menerima penyediaan listrik di Indonesia. Tentu, kondisi tersebut seringkali membuka aksi penyediaan listrik kolektif berbasis masyarakat yang dikelola secara mandiri. Salah satu praktik tersebut yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun yakni di Desa Andung Biru, Kabupaten Probolinggo. Berangkat dari ketidakhadiran negara melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai entitas badan usahanya dalam menyediakan listrik di desa tersebut mendorong masyarakat mencari solusi berbasis potensi lokal. Alhasil, melimpahnya air sebagai sumber daya alam ditransformasi oleh masyarakat menjadi pembangkit listrik, yang kemudian dikenal dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Setelah berlangsung lama praktik penyediaan listrik mandiri tersebut berhasil mengubah kondisi desa dari gelap menjadi terang, saat ini tengah memasuki babak baru dalam perjalannya. Listrik yang awalnya disediakan oleh Kelompok Tirta Pijar—sebagai kelompok masyarakat pengelola PLTMH, terjadi perubahan konstelasi aktor penyedia sejak masuknya PLN. Yang mana saat ini terjadi dualistik penyediaan listrik di Desa Andung Biru oleh negara dan masyarakat.

Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini berusaha menelusuri pertanyaan penelitian bagaimana kontestasi yang terjadi antara negara dan masyarakat dalam usaha penyediaan listrik di Desa Andung Biru?. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, studi ini berusaha menggambarkan kontestasi antara negara dan masyarakat secara komprehensif. Dualisme penyediaan kesejahteraan—salah satunya listrik sebagai kebutuhan dasar manusia, sejatinya telah banyak ditelaah oleh berbagai tokoh. Yang mana untuk menajamkan analisis dalam studi ini, peneliti menggunakan beberapa teori antaranya dualisme ekonomi oleh J.H. Boeke, pemikiran E.F. Schumacher terkait dengan penguatan argumen akan fleksibilitas masyarakat sebagai gerakan informal, dan pemikiran Bourdieu dalam menganalisis perilaku kedua aktor negara dan masyarakat tersebut.

Hasil studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kontestasi antara negara dan masyarakat dalam penyediaan listrik di Desa Andung Biru merupakan rentetan peristiwa baik itu gesekan, dialog, hingga munculnya cara baru dalam penyediaan listrik oleh masing-masing aktor. Temuan pertama yakni fenomena tersebut merupakan potret yang pasti terjadi dalam penyediaan listrik mandiri di aras lokal akibat dari adanya regulasi yang membuka potensi terbenturnya aktor negara dan masyarakat. Biasnya monopoli penyediaan listrik oleh PLN terjadi kala berhadapan dengan desa yang telah terlebih dahulu penyediaan listrik dilakukan oleh masyarakat. Seringkali argumentasi atau justifikasi “atas nama negara” dengan merujuk berbagai regulasi mendorong PLN merangsek masuk ke suatu desa. Terjadinya kontestasi aktor yang mana Andung Biru sebagai arena kontestasi menunjukkan pula pertarungan kepentingan antar aktor lokal didasarkan akan dua hal, sumber daya dan kuasa. Pemerintah Desa, mantan Kepala Desa, PLN, dan Kelompok Tirta Pijar saling berseberangan satu sama lain memaknai PLTMH yang telah berjalan selama ini. Alhasil, ketidakpaduan antara pemerintah dan masyarakat lokal menjadi momentum hadirnya PLN dengan pendekatan birokratisnya. Dualistik penyediaan listrik tersebut berimplikasi terhadap Kelompok

Tirta Pijar yang mana ditunjukan dengan munculnya kreativitas baru dalam pengelolaan PLTMH sebagai strategi kontestasi. Setidaknya berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan terdapat tiga bentuk, antaranya perubahan skema pembayaran, restrukturisasi kelompok dengan melakukan penambahan anggota, dan otomatisasi alat untuk masyarakat yang menggunakan dua listrik. Masyarakat sebagai konsumen pun juga mengalami perubahan akibat dari pergeseran penyediaan listrik tersebut yakni terdapat fleksibilitas dalam mengakses listrik didasarkan pada aspek kultural, ekonomi, maupun historikal. Hal ini ditunjukan dengan perilaku masyarakat yang memilih dua penyedia listrik tersebut didasarkan pada kedekatannya dengan pemerintah desa atau Kelompok Tirta Pijar, kemampuan ekonomi dalam memilih diantara kedua penyedia yang memiliki perbedaan harga yang mencolok, serta adanya rasa hutang budi terhadap PLTMH yang mana sedari awal menjadi “penyelamat desa” kala belum adanya PLN.

## **Mekanisme Ketahanan Kala Pandemi: Antara Voluntary Action dan Respon Kebijakan (Studi Hermeneutik Aksi “Canthelan”)**

Martino

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik

Dampak sosial ekonomi pandemi memperburuk risiko bencana terhadap masyarakat rentan karena mengancam kelangsungan hidup. Ketika respon perlindungan sosial untuk pemulihan dampak justru gagal menjamin akses dan kemanfaatan sumber daya secara merata, masyarakat berupaya membangun aksi perlindungan secara otonom di ruang publik. Sebagian masyarakat rentan menginisiasi aksi sukarela guna membantu kapasitas masyarakat yang tak terjangkau alokasi sumber daya bantuan pemerintah. Salah satunya dalam bentuk aksi “Canthelan”. Meski eksistensi aksi sukarela diakui signifikan sebagai mekanisme ketahanan bagi masyarakat rentan, namun kemunculannya dominan dipandang oleh otoritas kekuasaan secara normalitas dan deterministik. Perspektif ini cenderung menyederhanakan dimensi kerentanan dibalik aksi sukarela yang dikontribusikan struktur lingkungan dan relasi kuasa.

Pendekatan interpretatif berpeluang melahirkan pemaknaan secara diskursif terhadap konstruksi kepublikan (*publicness*) aksi kolektif berbasis sukarela yang diorganisasikan di ruang publik. Dalam struktur pemikiran itu, penelitian ini berupaya memahami makna aksi sukarela “Canthelan” dalam menciptakan mekanisme ketahanan dimasa pandemi melalui dimensi kepublikannya. Untuk dapat memahami artikulasi kebermaknaan “Canthelan” sebagai aksi kolektif berbasis kesukarelaan dalam mengelola kepentingan publik yang mendorong mekanisme ketahanan sosial ditengah krisis, penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana aksi “Canthelan” mengelola kepentingan publik sebagai reaksi terhadap krisis? dan bagaimana bagaimana mekanisme “Canthelan” berkontribusi terhadap kapasitas ketahanan sosial masyarakat yang tereksklusi dari respon kebijakan bantuan sosial?

Metode kualitatif dalam pendekatan hermeneutik digunakan terhadap realitas aksi “Canthelan” dalam struktur lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggali interpretasi dan pemaknaan kepublikan aksi sukarela. Berdasarkan analisa, didapati bahwa “Canthelan” tumbuh sebagai reaksi masyarakat diantara himpitan akumulasi kerentanan dan hegemoni kepatuhan pada otoritas kekuasaan. Berbasis kesukarelaan, aksi ini mendayagunakan sumber daya yang terbatas dan mengaktifkan modal sosial menjadi mekanisme saling merawat dan menjaga diantara masyarakat yang tereksklusi melalui penguatan kapasitas secara bersama-sama “Canthelan” tumbuh menjadi aksi kolektif yang dihasilkan oleh agregasi aksi individu yang menyebar melalui kepercayaan umum diatas kepentingan yang sama. Aksi “Canthelan” merupakan bentuk intervensi kreatif yang secara langsung membangun konstruk alternatif terhadap mekanisme dan institusi yang telah mapan. Secara praktis, aksi ini berupaya untuk menutup celah-celah kerentanan yang tak terjangkau oleh kebijakan bantuan sosial yang dikembangkan pemerintah.

Publik yang tereksklusi dari sistem bantuan sosial ditarik kedalam jaringan sosial yang menyediakan ruang penawaran bantuan untuk pemenuhan kebutuhannya secara inklusi. Didalam ruang publik ini masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan diberikan akses kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya bantuan yang telah disediakan secara gratis. Dalam praktiknya, kemanfaatan “Canthelan” tidak hanya bersifat komplementer, namun bahkan

dirasakan dapat mensubstitusi kemanfaatan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat rentan ditengah krisis. Mekanisme “Canthelan” membangun perlawanan secara persuasif terhadap struktur kekuasaan agar mampu menghadirkan pembangunan ketahanan yang menjamin kepentingan publik dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dalam konteks penanganan dampak sosial ekonomi akibat krisis, narasi “canthelan” memfasilitasi representasi kehendak masyarakat terhadap perbaikan kebijakan dan tata kelola perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak bencana.

Dalam praktiknya, kemajuan mekanisme ketahanan yang dikelola secara otonom oleh publik kerap diakui otoritas kekuasaan sebagai bagian dari upaya pembangunan ketahanan. Pengakuan tersebut umumnya lahir karena adanya kesamaan nilai-nilai kearifan kultural yang terlibat dalam mekanisme ketahanan informal dengan tata nilai yang diformalisasi dalam kebijakan pemerintah daerah. Aksi “Canthelan” menjadi bentuk agregasi kepentingan publik yang menginginkan adanya perubahan perlindungan sosial dan pembangunan kesejahteraan yang lebih baik. Sebagai salah satu wujud politik kewargaan yang bersifat persuasif, aksi “Canthelan” berupaya mengartikulasikan kepentingan publik melalui narasi mekanisme ketahanan alternatif yang secara informal dikelola ditengah berbagai keterbatasan. Bersisian dengan fungsi utamanya membantu kapasitas masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dimasa krisis, eksistensi aksi ini membawa narasi yang diarahkan sebagai manifestasi kontestasi atas kebijakan dalam lingkup pembangunan kesejahteraan.

**Strategi Gerakan Guru Tonggo dalam Menghadirkan Pendidikan Alternatif  
pada Masa Pandemi COVID-19 di Klaten, Jawa Tengah**

Ovy Novakarti

Departemen Sosiologi

Kebijakan School from Home (SfH) yang diinisiasi karena pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak besar pada praktik pendidikan di Indonesia. Kebijakan SfH yang berorientasi pada pembelajaran berbasis teknologi memaksa siswa, guru, dan orang tua untuk dapat beradaptasi dengan pembelajaran online. Salah satunya adalah ketimpangan pendidikan yang terjadi pada siswa-siswi sekolah dasar yang mengalami kesulitan belajar di Klaten, Jawa Tengah. Ketimpangan disebabkan oleh hambatan teknologi, ekonomi, dan ketidaksiapan pedagogi oleh sebagian sekolah di tiga kecamatan yang tidak memiliki infrastruktur memadai. Dengan demikian, kebijakan SfH justru mengakibatkan kemunduran pada produksi pengetahuan siswa. Merespons kondisi tersebut, guru-guru honorer di Klaten menginisiasi program Gerakan Guru Tonggo untuk memberikan pendampingan belajar pada siswa yang di tiga kecamatan terpencil yang mengalami kesulitan belajar selama berlangsungnya pembelajaran online.

Berangkat dari permasalahan ketimpangan pendidikan di atas, tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi Gerakan Guru Tonggo yang hadir sebagai bentuk pendidikan alternatif di era pandemi. Fokus kajian diarahkan pada praktik dan strategi pembelajaran bagi siswa-siswi rentan yakni tertinggal, miskin, dan tinggal di daerah terpencil. Oleh karena itu, terdapat dua fokus pertanyaan penelitian, yaitu (1) Bagaimana peran guru dan orang tua dalam menunjang proses pembelajaran siswa selama dilakukan pembelajaran online? (2) Bagaimana program Gerakan Guru Tonggo menghadirkan strategi pembelajaran yang optimal?

Melalui pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus, penelitian ini mampu menarik beberapa kesimpulan yang mengacu pada kedua pertanyaan penelitian yang dikonstrusikan berdasarkan dua kerangka teoretis. Pertama, peran guru dan peran orang tua dibingkai menggunakan konsep pedagogi kritis dan pendidikan estetis. Secara teoretis, melalui konsep pedagogi kritis dapat dijabarkan bahwa program Gerakan Guru Tonggo merupakan ranah perjuangan pendidikan di masa pandemi yang memiliki peran dalam menciptakan cara berpikir kritis selama berlangsungnya pembelajaran online. Selanjutnya, peran orang tua dilihat melalui konsep pedagogi kritis yang ditemui bahwa peran orang tua tidak maksimal dalam mendampingi pembelajaran online karena ketidaksiapan pedagogi. Sedangkan, konsep pendidikan estetis memosisikan peran Gerakan Guru Tonggo sebagai gerakan pendidikan yang menghadirkan etos estetika dalam praktik pembelajaran untuk membebaskan dari belenggu teknologi yang menjadi arus utama pendidikan di masa pandemi. Selanjutnya, dalam konsep pendidikan estetis menempatkan peran orang tua yang belum cukup mampu dalam memfasilitasi, mendukung, dan membangkitkan motivasi belajar siswa selama berlangsungnya pembelajaran online.

Kedua, temuan mengenai strategi pembelajaran dibangun menggunakan teori pedagogi produktif melalui empat dimensi. Pertama, dimensi kualitas intelektual, ditemukan bahwa program ini menerapkan tiga strategi pembelajaran yang meningkatkan pola pikir kritis siswa. Kedua, dimensi keterhubungan, ditemukan bahwa program Gerakan Guru Tonggo memberikan dukungan secara sosial melalui pemberian pendampingan pembelajaran calistung. Ketiga, dimensi lingkungan kelas yang mendukung ditemukan bahwa program ini memberikan ruang belajar yang kondusif dan

terdapat perpustakan kecil yang disediakan guru untuk menunjang pembelajaran. Keempat, dimensi *working with and valuing difference* ditemukan bahwa melalui program ini siswa di Klaten, Jawa Tengah dapat mencapai kesetaraan pendidikan dan menghargai bentuk keragaman yang ada. Keragaman yang dimaksudkan adalah latar belakang sekolah para siswa yang dididik Gerakan Guru Tonggo berasal dari sekolah yang berbeda-beda.

## **Analisa Jaringan Wacana Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia**

Rosalina Woro Subektie

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik

Wacana penghapusan kekerasan seksual menjadi semakin penting di tengah signifikansi peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2020 kekerasan berbasis gender di Indonesia meningkat 8 kali lipat jika dibanding tahun 2002. Kondisi tersebut mendorong Komnas Perempuan dan sejumlah organisasi masyarakat mendesak pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang sudah diusulkan sejak 2012. Butuh satu dekade lamanya untuk akhirnya wacana kebijakan yang mendorong penghapusan kekerasan seksual di Indonesia untuk disahkan. Diskusi terkait isu kekerasan seksual saat ini mayoritas berfokus pada formulasi substansi dan belum banyak yang mencoba melihat keterlibatan aktor dan perkembangan logika institusional di dalamnya. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi perkembangan diskusi yang ada dengan mencoba menjelaskan bagaimana logika institusional yang ada dalam jaringan wacana penghapusan kekerasan seksual sebelum dan sesudah pengesahan UU TPKS.

Logika institusional adalah pola kognisi bersama pada tingkat individu dan masyarakat yang memandu aturan perilaku dan praktik kolektif mereka (Friedland & Alford, 1991; Fong, Wong, & Hong, 2018). Sedangkan metode analisa jaringan wacana adalah baru yang mengkolaborasikan analisa jaringan sosial & analisis isi terhadap informasi tertulis pada artikel di media massa daring. Analisa jaringan Wacana menggambarkan bagaimana jaringan yang berkembang (konsep) & aktor (Leifeld, 2017), mempertanyakan kembali status quo (Stephen, 2003) dan memproblematasi kebijakan (Bacchi, 2000). Menggunakan metode kualitatif yang ditambah penggunaan aplikasi Java Discourse Network Analyzers (DNA) sebagai alat analisis dan Visone sebagai alat visualisasi. Penelitian ini berhasil menganalisa pemberitaan terkait UU TPKS sebanyak 130 berita dalam satu tahun sebelum pengesahan dan satu bulan terakhir setelah pengesahan.

Sebanyak 48 aktor dari 36 organisasi terlibat dalam kebijakan sebelum pengesahannya UU TPKS. Sedangkan setelah pengesahan ada 34 aktor dari 27 organisasi terlibat perang wacana terkait upaya penghapusan kekerasan seksual melalui UU TPKS. Berdasarkan dari paparan di atas, aktor-aktor kebijakan yang terlibat dalam wacana penghapusan kekerasan seksual baik sebelum dan sesudah pengesahan UU TPKS masih didominasi oleh aktor politik (60%). Sedangkan sisanya adalah aktor dari lembaga/kementerian (30%) dan aktor dari organisasi masyarakat (10%). Hal ini berarti mayoritas pembentuk utama wacana yang ada adalah aktor politik.

Logika institusional sebelum pengesahan UU TPKS berkembang dari pemberian landasan pentingnya kemunculan kebijakan (formulatif) untuk menghadirkan peran negara di tengah tingginya kasus kekerasan seksual (seperti konsep: Peningkatan angka kekerasan seksual, kewajiban negara, akomodasi korban, regulasi kurang akomodatif hingga memunculkan regulasi baru) menuju logika institusional yang berorientasi pada implementasi kebijakannya (konsep yang muncul seperti: pembuatan aturan turunan, implementasi akomodasi korban, hingga penindakan dan rehabilitasi). Alur demikian sangatlah sesuai dengan siklus kebijakan Easton, dimana tahap siklus kebijakan berawal dari pendefinisian agenda, pengembangan, pengadopsian, implementasi hingga kemudian dilakukan penilaian efektivitas dan efisiensinya (Faturahman, 2018). Sedangkan narasi logika institusional yang muncul setelah adanya pengesahan UU TPKS jika dicermati secara

keseluruhan memang lebih mengarah pada operasionalisasi dan pendetailan implementasi kebijakan UU TPKS.

Hasil temuan di atas menunjukkan aktor yang terlibat dalam debat kebijakan terdiri dari aktor negara, akademisi hingga masyarakat sipil dengan aktor negara masih menjadi aktor dominan dalam kondisi ini. Aktor-aktor tersebut membawa berbagai logika institusional yang tersampaikan melalui berbagai konsep yang ada dalam klaim masing-masing aktor. Ada dua logika yang mendominasi debat kebijakan penghapusan kekerasan seksual melalui UU TPKS yaitu: logika korban dan logika negara. Selain itu terjadi pergeseran logika institusional yang sifatnya formulatif menjadi lebih teknis.

**Kekerasan berbasis Gender Online dan Aplikasi Pencari Jodoh**  
**(Studi Deskriptif Kualitatif pada Perempuan Pengguna Aplikasi Ta'aruf)**

Tri Kurnia Revul Andina

Departemen Ilmu Komunikasi

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan satu isu yang saat ini masih jamak jadi perbincangan. Hal ini karena penggunaan media digital kian masif dari tahun ke tahun, mengakibatkan kasus KBGO juga turut menyeruak di masyarakat. Pemutakhiran serta inovasi platform digital yang tiada henti harus diikuti pula oleh dampak merugikan, tak terkecuali KBGO. Kenaikan kasus KBGO ini terjadi baik secara global maupun nasional. Di Indonesia, sejumlah lembaga seperti LBH APIK, Rifka Annisa, SAFEnet, dan Komnas Perempuan turut membagikan temuan mereka terkait jumlah kasus dalam dua terakhir, dan selaras dugaan, kasus KBGO naik tiap tahun, bahkan melonjak hingga tiga kali lipat. KBGO sejatinya tidak pandang bulu. Kekerasan ini bisa menimpa siapa saja dan di platform manapun, sehingga klaim platform atas keamanan penuh perlu dipertanyakan. Di saat kasus KBGO masih terus meningkat dan mengintai di tengah masyarakat, muncul tren aplikasi bernuansa Islam, contohnya aplikasi ta'aruf yang tidak jarang mengklaim bahwa aplikasi tersebut sejalan dengan ajaran agama. Selain menghindarkan dari pacaran, aplikasi ini dinilai berisikan orang-orang yang lebih serius mencari pasangan, mempunyai objektif yang jelas, serta mengerti agama. Kehadiran aplikasi bernuansa Islam tentu tidak mengherankan sebab *pasca orde baru*, ekspresi keislaman di Indonesia semakin menguat. Kendati begitu, klaim aplikasi ta'aruf bahwa aplikasinya bebas dari hal-hal buruk pun perlu dilihat secara kritis. Pasalnya, platform digital sesungguhnya merupakan perpanjangan tangan dari hierarki gender yang ada selama ini, yang menyebabkan perempuan terdiskriminasi dan mengalami kekerasan.

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini berfokus untuk menggali pengalaman perempuan pengguna aplikasi Ta'aruf ID yang mengalami KBGO. Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa hal yang krusial yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Pengguna aplikasi Ta'aruf ID sebagian besar mengaku dirinya memakai aplikasi tersebut untuk mencari pasangan menikah. Pengguna berusia 30 tahun ke atas beranggapan mereka semestinya sudah berumah tangga ketika menginjak usia kepala tiga. Sementara itu, bagi pengguna berusia 20-an menggunakan aplikasi tersebut sebab tidak ingin lagi berpacaran. Semua pengguna yang peneliti wawancara juga mengaku bahwa mereka memilih aplikasi Ta'aruf ID karena dirasa lebih aman, lebih Islami, serta berisikan pengguna yang serius dan ingin menikah. Para informan menyebutkan, biasanya pengguna lain akan bersikap ramah terlebih dahulu, lalu saling mengirim pesan melalui fitur *chat*. Setelah mereka semakin dekat, maka pelaku atau pengguna lain akan menjanjikan pernikahan. Dari sinilah KBGO terjadi setelah muncul rasa percaya pada diri perempuan. Kebanyakan KBGO terjadi di fitur percakapan Ta'aruf ID, dan ada juga yang berlanjut hingga ke kontak pribadi. Yang menjadi catatan peneliti ialah, kebanyakan pengguna perempuan tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban KBGO. Mereka juga tetap beranggapan bahwa aplikasi Ta'aruf ID adalah aplikasi yang ideal bagi mereka yang ingin segera menikah. Ada juga yang terkesan menutup-nutupi kejadian buruk yang mereka alami, dan cenderung memuji-muji aplikasi tersebut. Selain itu, lima dari tujuh informan akhirnya menikah dengan sesama pengguna aplikasi Ta'aruf ID setelah lika-liku pencarian jodoh yang mereka lalui, termasuk setelah mengalami KBGO. Kemudian terkait pengklasifikasian, bentuk KBGO terhadap perempuan pengguna aplikasi Ta'aruf ID yang ditemukan dalam penelitian

ini antara lain *online grooming*, *online harassment*, *gender-based bullying*, *sexual objectification*, *sexting* atau *unsolicited pornography*, *malicious distribution*, *financial abuse*, dan *stalking*.

# **HIBAH PENELITIAN**

# **MAHASISWA S-3**

**Research  
Days**  
2022

**Antara Perumahan dan Lahan Pertanian Kota:  
Kontestasi Politik Ruang Kota di Surabaya Barat**

Fikri Disyacitta

Departemen Politik dan Pemerintahan

Naskah ini hendak mengidentifikasi mekanisme akses yang beroperasi dalam dinamika produksi ruang pertanian kota yang berlangsung di Surabaya Barat. Dalam perspektif politik, ruang tidak hanya dipahami sebagai kenampakan fisik semata: ruang membentuk pola kontestasi kuasa sekaligus dibentuk oleh tarik menarik kuasa. Isu pertanian kota menjadi titik masuk yang menarik untuk melihat bagaimana kontestasi atas ruang berlangsung dengan keras. Jika dikaitkan dengan konteks penelitian yang dilakukan di Kota Surabaya, proses alih guna lahan pertanian oleh industri properti terus berlangsung. Dari segi ekonomi, pemanfaatan ruang perkotaan sebagai lahan pertanian juga tidak banyak memberikan sumbangsih bagi produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Surabaya.

Namun menariknya, Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya mempertahankan eksistensi pertanian kota, khususnya di wilayah Barat, dengan motif memanfaatkan lahan tidur demi mencapai ketahanan pangan kota. Program tersebut mendapatkan apresiasi berupa penghargaan Peduli Ketahanan Pangan dalam kategori Bidang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2022. Berangkat dari latar belakang tersebut, naskah ini mencoba untuk menangkap perspektif petani kota di Surabaya Barat, makelar tanah, dan pemerintah kota Surabaya melihat akses sebagai mekanisme produksi ruang urban. Rumusan masalah yang muncul adalah: Bagaimana pola kontestasi ruang dan mekanisme akses yang membentuk produksi ruang pertanian kota di Surabaya Barat?

Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa kontestasi ruang antara pengembang properti, pemerintah kota, dan petani kota tidaklah berkembang menjadi gerakan sosial yang berjuang melakukan *reclaiming* sebagaimana dibayangkan oleh konsep hak atas kota (*right to the city*). Teori akses membantu untuk menjelaskan mengapa kontestasi mampu berjalan secara kompromis: ada peran aktor *intermediary* yakni makelar tanah yang berperan penting dalam mempengaruhi proses produksi ruang kota di Surabaya.

Pola penguasaan lahan pertanian yang terjadi di Surabaya terdiri dari tiga tipologi. Pertama, lahan bekas tanah kas desa (BTKD) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya setelah nomenklatur desa dihapuskan dan diganti menjadi kelurahan. Kedua, lahan tidur yang hak kepemilikannya berada di bawah perusahaan properti seperti Pakuwon, Ciputra, dan Bumi Serpong Damai. Pola ketiga adalah kepemilikan lahan pertanian oleh warga yang jumlahnya semakin lama semakin menipis. Dalam mewujudkan ruang hijau untuk pertanian kota, pemerintah kota membuka kesempatan bagi warga berkartyu tanda penduduk Surabaya dan tercatat sebagai masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat bertani di atas lahan eks-BTKD.

Terkait lahan tidur yang dikuasai oleh perusahaan properti, Pemerintah Kota Surabaya hanya mampu memberikan himbauan agar pengembang ikut berkontribusi dalam mendukung agenda pertanian kota. Di sinilah kemudian jejaring makelar bekerja sebagai *intermediary access*. Makelar yang berafiliasi dengan pengembang maupun yang bekerja untuk pemerintah di tingkat kelurahan maupun kecamatan membantu menegosiasikan kepentingan pemerintah kota,

pengembang, dan petani. Hasilnya, petani kota di Surabaya Barat diizinkan menggarap lahan tidur milik pengembang selama belum dimanfaatkan atau beralih fungsi.

**Relasi Literasi Media Sosial, Kepercayaan dan Kualitas Informasi terhadap Perilaku Komunikasi  
Masyarakat pada Media Sosial Pemerintah Daerah Urban di Indonesia**

Nur Atnan

Departemen Ilmu Komunikasi

Media sosial memberi manfaat bagi pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa kajian sebelumnya bahwa media sosial dapat meningkatkan kualitas demokrasi, mendorong partisipasi publik, memudahkan interaksi dengan publik, menciptakan transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Besarnya manfaat media sosial mendorong Pemerintah Indonesia mewajibkan pemerintah daerah memiliki dan menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dengan publik. Dalam perkembangannya perilaku komunikasi masyarakat berupa interaksi dalam bentuk komentar dan penyampaian aspirasi secara kritis pada media sosial pemerintah daerah urban di Indonesia yakni di Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kota Semarang masih rendah.

Sementara itu, pengelola media sosial pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong keterlibatan publik di media sosial seperti membentuk tim kreatif, menyampaikan konten yang relevan, dan melakukan posting konten secara rutin. Teori dan studi sebelumnya menunjukkan bahwa literasi media sosial, kepercayaan, dan kualitas informasi mempengaruhi perilaku komunikasi masyarakat pada media sosial pemerintah daerah. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis relasi antara literasi media sosial, kepercayaan, dan kualitas informasi terhadap perilaku komunikasi pada media sosial pemerintah daerah dalam konteks wilayah urban di Indonesia.

Dengan menggunakan mixed method jenis *sequential explanatory strategy* yaitu perpaduan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif studi ini menunjukkan bahwa literasi media sosial, kepercayaan, dan kualitas informasi pada media sosial pemerintah daerah sudah baik, namun perilaku komunikasi masyarakat pada media sosial pemerintah daerah belum baik. Studi ini juga menunjukkan bahwa literasi media sosial, kepercayaan, dan kualitas informasi secara bersama-sama memberi pengaruh sebesar 41,2% terhadap perilaku komunikasi. Variabel yang paling dominan mempengaruhi perilaku komunikasi adalah literasi media sosial dan kepercayaan masyarakat, sedangkan kualitas informasi tidak memberi pengaruh yang signifikan.

Literasi media sosial sangat signifikan mempengaruhi perilaku komunikasi pada media sosial pemerintah daerah karena literasi media sosial menonjolkan kemampuan sosial dan kritis selain kemampuan teknis. Dengan kemampuan sosial dan kemampuan teknis ini, maka seseorang akan peduli pada ketimpangan sosial dan terdorong untuk menyuarakannya melalui kanal media sosial yang sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Namun, kemampuan literasi media sosial ini perlu di-support dengan pengetahuan dan pemahaman akan isu-isu publik. Pengetahuan dan pemahaman akan isu-isu publik tersebut akan menjadi amunisi bagi masyarakat saat bersuara menyampaikan ide dan gagasannya melalui media sosial pemerintah daerah.

## Korupsi Politik Kartel Impor Komoditas Pangan Di Indonesia Dalam Setting Kelembagaan

Tonny Timbul Tampubolon

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik

Walaupun regulasi tentang impor komoditas pangan terus diperbaharui dan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)<sup>1</sup> dengan otoritasnya yang didukung oleh Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mestinya dapat membongkar mafia dan kartel pangan. Namun pada faktanya praktik kartel komoditas pangan masih tetap berlangsung. Hingga kini pemerintah masih kesulitan memberantas mafia dan korupsi dalam impor komoditas pangan.

Dalam kartel impor komoditas pangan, politisi dan birokrat dengan hak dan kewajiban serta peran publik yang dimiliki dapat membantu untuk memberikan izin impor kepada perusahaan importir dan afiliasinya untuk mencari keuntungan pribadi. Pemberian izin kuota impor dalam penelitian ini tidak lepas dari penyalahgunaan kekuasaan dan patronase politik dengan pemberian suap kepada politisi dan birokrat oleh pengusaha. Pemberian suap ini terkait dengan alokasi izin impor yang diterima oleh para pengusaha. Ada peran serta hubungan antara aktor (pengusaha, birokrat dan politisi) dan dinamika pengaturan kelembagaan dalam memaksimalkan preferensi dari masing-masing aktor.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana korupsi politik terjadi berlangsung pada kartel impor komoditas pangan dalam setting kelembagaan. Berdasarkan latar belakang dan penjelasan permasalahan di atas maka pertanyaan dasar yang dapat dirumuskan adalah: “**Bagaimana sumber daya dan preferensi aktor melakukan korupsi pada kartel impor komoditas pangan dalam setting kelembagaan?**”. Argumentasi penulis adalah didasarkan pada kenyataan bahwa aktor (birokrat dan politisi) dengan harapan untuk mendapatkan imbalan membangun hubungan dengan pelaku usaha untuk mempengaruhi kebijakan impor pangan dalam melanggengkan praktik kartel. Penelitian ini juga melihat bagaimana aturan dan pengaturan kelembagaan mengatur tindakan individu dan bagaimana aktor individu mencoba mengubah aturan (Nelson, 2017).

Secara tradisional, proteksionisme mengacu pada tindakan dan kebijakan pemerintah untuk membatasi atau menahan perdagangan internasional yang sering dilakukan untuk melindungi produk dalam negeri dan persaingan asing. Jenis proteksionisme adalah tarif impor, kuota, subsidi atau pengurangan pajak bagi produsen lokal. Proteksi yang diyakini sebagai alat untuk mengatasi krisis ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu dan masih menjadi pilihan kebijakan perdagangan yang dianut oleh banyak negara di dunia.

Proteksi komoditas pangan ternyata membawa permasalahan tersendiri, kebijakan proteksi yang dibuat oleh pemerintah dapat berdampak pada kartelisasi. Proteksionisme ini berupa kuota impor atau kebijakan non-tariff. Dalam impor komoditas pangan, khususnya dalam penelitian ini mengangkat kasus kartel impor komoditas yang melibatkan politisi dan birokrat dalam melakukan korupsi. Politisi dan birokrat dengan hak dan kewajiban serta peran publik yang

<sup>1</sup> Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengamanatkan KPPU sebagai institusi yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan secara tertib dan teratur. Sedangkan tugas dan wewenang KPPU diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

dimiliki dapat membantu untuk memberikan izin impor kepada perusahaan importir dan afiliasinya untuk mencari keuntungan pribadi. Korupsi dalam pemberian izin kuota impor dalam penelitian ini tidak lepas dari instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan patronase politik dengan pemberian suap kepada politisi dan birokrat oleh pengusaha. Pemberian suap ini terkait dengan alokasi izin impor yang diterima oleh para pengusaha.

**Narasi Karet ke Narasi Tambang Minyak Artisanal:  
Studi Governmentalitas di Dusun Tue, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan**

Veronica Varbi Sununianti

Departemen Sosiologi

Studi ini menganalisis perubahan sistem hidup masyarakat pedesaan dari agraris ke pertambangan minyak *artisanal* di Dusun Tue, Kab. Muba, Sumsel. Turunnya harga getah karet, tidak tersedianya jaminan sosial, serta peluang kesempatan kerja mengakibatkan sebagian besar masyarakat beralih menjadi penambang minyak. Hal ini terkait erat dengan sejarah perebutan pengelolaan sumber daya alam yang sarat kepentingan ekonomi politik oleh rezim kekuasaan. Governmentalitasnya membentuk dan menargetkan populasi sebagai subjek ekonomi dan kepentingan, khususnya mata pencarian masyarakat Dusun Tue, Sumsel. Bagaimana historisitas rezim kekuasaan melakukan governmentalitas? Bagaimanakah efek governmentalitas rezim-rezim tersebut bagi masyarakat Dusun Tue? Serta Bagaimanakah masyarakat desa membentuk pengetahuan dan teknik pengaturan dirinya untuk bertahan hidupnya? Studi etnografi ini dilakukan selama sekitar tiga bulan *live in* di kediaman keluarga penambang minyak *artisanal* di Dusun Tue, Sumsel. Pengambilan datanya melalui observasi, wawancara mendalam, juga *focus group discussion*.

Historisitas terbentuknya Dusun Tue dijelaskan dalam empat periode, yakni masa awal pembentukan Dusun Tue, masa pertumbuhan, masa pertanian karet, dan masa pertambangan minyak *artisanal*. Dusun berawal dari sistem pemerintahan Pasirah Marga Singa Desa (1740-1770), lalu beralih ke kesatuan teritorial masa penjajahan Belanda, hingga akhirnya Orde Baru menghapuskan sistem marga (UU No 5/1979). Masa pertumbuhan ditandai dari memproduksi tanaman komoditas karet yang dikenalkan Belanda, pembangunan infrastruktur, dan perkebunan skala besar, hingga akhirnya mengalami peningkatan pendapatan. Harga getah karet rentan fluktuasi harga dunia, menghasilkan petani terjerat utang juga mengalami diskriminasi dan tidak diberi bantuan.

Petani karet bersiasat melakukan pekerjaan dan keuangan untuk menyeimbangkan kehidupan antara rumah tangga, sosial, dan lingkungan. Kemiskinan akibat memproduksi tanaman komoditas dan keterjeratan dengan harga pasar dunia mendorong masyarakat menciptakan peluang hidup dan pekerjaannya sendiri dengan menjadi penambang minyak *artisanal* (2013). Mayoritas penduduk beralih menjadi penambang dan berhasil meningkatkan perekonomian juga mereproduksi kegiatan penambangan.

Situs penambangan minyak *artisanal* mengandung sejumlah makna. Pekerjaannya sarat gotong royong mengenai materi, tenaga kerja, juga keberuntungan. Kegiatan produksi penambangan juga terdapat hubungan spiritual, budaya, dan agama. Tambang peluang terbesar pekerjaan yang tersedia dan mereka berupaya mempertahankannya dengan mimesis cara negara mengatur pertambangan, sekaligus upaya melepaskan keterikatan dari pasar dunia.

Berbagai taktik dan strategi dibentuk dalam produksi pertambangan berdasarkan jenis pekerjaan, proses, juga kejadian penambangan. Governmentalitasnya mengenai peningkatan kapasitas diri, relasi sosial, juga spiritual. Penambang aktif dan produktif dalam produksi pertambangan *artisanal* diantara ruang perbatasan formal dan informal. Mereka membangun kesadaran pribadi dan kolektif berdasarkan pengetahuan dan mimesis untuk kelangsungan produksi penambangan.

Pertambangan minyak artisanal turut mendukung pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kriminalitas, peningkatan pendidikan, peningkatan peran perempuan, peningkatan pembangunan infrastruktur desa dan keagamaan. Pertambangan minyak artisanal bukan semata persoalan (izin) pertambangan dan pembangunan ekonomi, tetapi kompleksitas relasi sosial, budaya, dan identitas masyarakat tempatan.

Menjadi petani karet dan penambang minyak nyatanya hanya mimesis dan mengamati perkembangan yang terjadi saat itu untuk bertaktik dan berstrategi membentuk governmentalitas diri. *Governing of the self* penambang sebenarnya sebagai hasil dari *governing others* rezim-rezim berkuasa.

**DISEMINASI HASIL RISET**  
**DOSEN DAN PENELITI**  
**PUSAT KAJIAN**  
**FISIPOL UGM**

**Research  
Days**  
2022

**Young Citizen and Social Assistance Program:  
Their Perception Towards the Effectiveness of Kartu Prakerja as an Employment Benefit to  
Mitigate Covid-19 Socio-economic Impact**

Ario Wicaksono, Ph.D., Assoc. Prof. Riyana Miranti, Jefri Andika Pakpahan, S.I.P., Rizky Dwi Lestari, M.P.A.

*Institute for Policy and Development*

Pandemi Covid 19 telah mempengaruhi berbagai segmen kehidupan dan berdampak signifikan pada populasi terutama kelompok usia produktif di rentang usia 18-40 tahun. Dalam sektor ketenagakerjaan penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 berjumlah 21,32 juta orang (BPS, 2021). Secara keseluruhan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai puncak tertingginya yaitu 9,77 juta orang, dan angka pengangguran ini sejatinya terus bertambah seiring dengan penambahan jumlah angkatan kerja menjadi 138,22 juta orang. Pada tahun 2021, angka pengangguran hanya turun tipis menjadi 9,1 juta orang (CNN, 2021), diproyeksikan akan bertambah kembali dengan situasi ketidakpastian ekonomi. Selain kehilangan pekerjaan, kelompok usia produktif juga rentan terjebak dalam pekerjaan/tempat kerja tidak tetap (Pyoria 2017), kekurangan skill sets dalam era digital (mediaindonesia.com, 2020), hingga mengalami fenomena 'generasi sandwich' (Migliaccio, 2019), yaitu harus menanggung biaya hidup orang tua, diri mereka sendiri, dan anak-anak mereka secara bersamaan.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh kelompok usia produktif diatas harus segera mendapatkan intervensi agar bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia pada 2030 mendatang menjadi tahun emas. Sebagai respon atas situasi tersebut Pemerintah telah mengeluarkan program Kartu Prakerja sebagai pengembangan kompetensi kerja dengan upskilling, re-skilling, pelatihan sekaligus sebagai perlindungan sosial selama pandemi (setkab.go.id, 2020). Namun dalam pelaksanaannya banyak perdebatan yang berkembang seputar efektivitas kebijakan ini (Bachtiar et al., 2020; ICW, 2020; IDEAS, 2020; IGPA dan Forbil Institute, 2020; KPK, 2020), dan selain itu belum banyak penelitian yang berfokus pada pengalaman penerima manfaat dalam kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan penerima program, dan juga persepsi penerima program terhadap inklusifitas ataupun aksesibilitas program.

Sehingga pertanyaan penelitian ini berpusat pada: 1) Seberapa efektif Kartu Prakerja dilihat dari perspektif penerima manfaat? 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Kartu Prakerja dilihat dari perspektif penerima manfaat; 3) Dengan adanya disparitas regional di Indonesia, apakah persepsinya berbeda? Penelitian ini juga menghadirkan pendekatan baru dalam melihat persepsi penerima dari kelompok usia milenial (pemuda) yang disaat bersamaan mengalami fenomena generasi 'sandwich'. Dengan menggunakan metodologi campuran (mix method) kuantitatif-kualitatif, penelitian ini berfokus pada pendekatan studi evaluasi dengan mengidentifikasi persepsi penerima manfaat kelompok usia milenial berbasis survei dan *Policy Dialogue* (*online Focus Group Discussions*) bersama pemangku kebijakan.

Namun dikarenakan penelitian ini masih bersifat on-going, maka pemaparan akan berfokus pada temuan awal dari hasil survei dan berfokus pada Pulau Jawa sebagai studi kasus. Pulau Jawa dipilih dengan pertimbangan sebagai regional dengan penerima manfaat Kartu Prakerja terbesar di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran awal terkait persepsi dan pengalaman para

penerima manfaat. Temuan akan didukung berbagai variabel utama seperti variabel demografis, variabel kepercayaan penerima manfaat terhadap kebijakan ketenagakerjaan, serta pengalaman penerima manfaat. Termasuk dalam hal ini persepsi penerima manfaat terhadap keluaran program, aksesibilitas dan inklusifitas program, kepuasan program, keberlanjutan program, serta tinjauan manfaat.

Temuan awal yang kami dapatkan melalui survei terhadap penerima Kartu Prakerja di Pulau Jawa adalah bahwa perempuan berusia produktif mendominasi penerima manfaat dari program ini dengan persentase 79,21%, berbanding 20,79% penerima laki-laki. Disisi lain, 87,45% penerima manfaat memiliki tanggungan selain untuk diri sendiri (seperti menanggung beban keluarga inti (suami dan anak) hingga orangtua). Temuan ini menunjukkan bahwa pada masa krisis, perempuan yang secara stereotipe dianggap bukan sebagai pencari nafkah utama juga harus ikut memikul beban mencari nafkah untuk menjaga kondisi ekonomi keluarga. Adanya pergeseran peran tersebut menjadikan perempuan memiliki beban ganda yang bertambah terlebih jika ia merupakan bagian dari *sandwich generation*.

Penggunaan insentif yang didapatkan dari Kartu Prakerja oleh penerima didominasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadikan efektivitas Kartu Prakerja sebagai jaring pengaman sosial ketika pandemi dianggap efektif. Namun tujuan lain yang berorientasi pada peningkatan *skill* masih perlu untuk dikaji lebih dalam, meskipun berdasarkan survei ini sebanyak 85,79% penerima Kartu Prakerja di Pulau Jawa merasa bahwa produktivitas mereka meningkat, serta 84,64% diantaranya merasa unggul ataupun kompetitif setelah mendapatkan sertifikat dari Kartu Prakerja. Temuan lain terkait efektivitas Kartu Prakerja melalui survei ini akan disampaikan lebih lanjut kemudian.

**Finding Indonesia's (Missing Link) Policy on MSME's Product/Service Invention and Innovation: a Case Study in Agricultural Industry**

Ario Wicaksono <sup>1</sup>, Rizki Ardinanta <sup>1</sup>, Mirwan Ushada <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of Public Policy and Management

<sup>2</sup> Research Centre, Universitas Gadjah Mada

The importance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) contribution to sustaining economic growth depends on how far they can innovate and compete in a borderless economy. However, we know little about the imperatives of setting guidelines and standardising product invention and innovation. The absence of policy regulating this matter and even the literature in the MSME policy sector pertaining to this issue also lacks discussion. This research is trying to initiate the conversation and understanding of the importance of the presence of product/service invention policy using the case of the agricultural industry, in particular, the food and beverages industry, in Yogyakarta Special Region, a fast-growing industry located in one of the creative centres in Indonesia. Reviews on invention policy and the Kansei engineering approach were utilised as a theoretical framework to investigate this issue, a novel and multidisciplinary approach combining public policy and agro-industrial technology literature. We could identify the urgency to set up a clear policy on this matter through document analysis and primary sources such as questionnaires and interviews with stakeholders.

A survey towards 192 MSMEs investigating their perspective on MSME's invention/innovation policy resulted as follows: 28 per cent of respondents strongly agree, and 41 per cent agree on the importance and the presence of local and national regulations regarding product/service development as well as their ability to update the said regulations. The findings also show that 3 points become the expectation of MSME for the policy content: human resource training and development, support and facilitation to ease the business processes, and promotion and marketing support.

In addition, 20 per cent of respondents strongly agree, and 37 per cent agree with the importance of incentives for MSMEs. Next, on participation in mentoring/training, 32 per cent of respondents strongly agree, and 39 per cent agree. Lastly, 19 per cent of MSMEs strongly agree, and 44 per cent agree with the importance of participation in the discussion on MSME's positions at the regional/national level, which include topics such as regulation, incentive, dan mentoring/training.

However, what remains as a question to answer is what type and how far a policy needs to be established so it would not hinder creative ideas emerging from the industry while at the same time ensuring any invention and innovation still comply with the necessity of essential requirements of a proper product, such as safety, health, as well as customer convenience and satisfaction. As with any other policy in different policy areas, striking a balance between flexibility and compliance is the critical success factor of policy success/failure.

## **Regulating Harmful Content in Indonesia: Legal Framework, Trends, and Concerns**

M. Perdana Karim Sasmita Jati, Alfredoi Putrawidjodo

Centre for Digital Society

Social Media 4 Peace merupakan sebuah proyek yang dicanangkan oleh UNESCO dan didanai oleh Uni Eropa. Proyek ini pertamakali diinisiasi pada tahun 2021 dengan mengusung tajuk, “Social Media 4 Peace: Countering online disinformation and hate speech to foster peace”. Tujuan dari inisiasi proyek ini adalah untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap konten berbahaya yang tersebar di dunia maya, khususnya disinformasi dan ujaran kebencian, seraya melindungi kebebasan berekspresi dan mempromosikan perdamaian melalui teknologi digital, terutama media sosial. Proyek ini selaras dengan strategi umum UNESCO untuk memerangi disinformasi dan mendorong informasi sebagai barang publik dan memperkuat transparansi ekosistem Internet.

Tiga negara dipilih menjadi percontohan pelaksanaan proyek Social Media 4 Peace. Ketiga negara tersebut adalah Bosnia and Herzegovina, Kenya, dan Indonesia. Indonesia dipilih karena keragaman masyarakat, tingkat penetrasi internet yang tinggi, persentase pengguna media sosial yang tinggi, dan komitmen politik untuk mengatasi risiko konten berbahaya. Pada tahap pertama pelaksanaan, UNESCO bermitra dengan CfDS untuk menganalisis akar penyebab konten daring berbahaya serta kerangka hukum terkait moderasi konten berbahaya yang ada di Indonesia.

Melalui tinjauan pustaka dan diskusi kelompok terpumpun, CfDS menemukan bahwa kerangka regulasi yang ada di Indonesia saat ini kurang memadai untuk menangani permasalahan konten daring berbahaya. Beberapa hal yang menunjukkan hal tersebut adalah:

- Definisi konten berbahaya di Indonesia cenderung sporadis, terlalu luas, dan belum jelas.
- Secara eksplisit, Indonesia tidak membedakan konten ilegal dengan konten harmful ‘berbahaya’. Padahal, pembedaan tersebut penting untuk dilakukan karena keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
- Moderasi yang dilakukan di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan punitif.
- Kerangka regulasi yang ada rawan digunakan mengkriminalisasi kelompok rentan seperti kelompok minoritas agama dan kepercayaan, kelompok minoritas gender dan orientasi seksual, jurnalis, serta aktivis demokrasi.
- Terdapat kesenjangan antara mekanisme pengaturan diri milik platform dan regulasi pemerintah: penerapan hukum global dan domestik, tanggung jawab hukum platform.

Berdasarkan temuan kajian, CfDS mengusulkan lima rekomendasi. Kelima rekomendasi tersebut adalah:

- Revisi UU ITE dan peraturan pelaksananya
  - Reformulasi pengaturan yang terkait dengan klasifikasi konten
  - Redefinisi istilah yang terkait dengan konten berbahaya
  - Mereformasi mekanisme penanganan konten berbahaya
- Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait konten berbahaya dan ilegal
  - Harmonisasi tersebut diproyeksikan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi dan tumpang tindih antar peraturan.
- Penyamaan persepsi tentang makna ketentuan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan UU terkait lainnya

- Peraturan mengenai konten berbahaya dapat ditafsirkan berbeda oleh penegak hukum. Kesamaan persepsi diperlukan dalam rangka implementasi peraturan terkait konten yang lebih setara dan adil, mengingat dampaknya terhadap masyarakat.
- Meningkatkan kerjasama antara negara dan platform media sosial dalam menangani konten berbahaya dan ilegal
  - Berbagai diskusi dan pertemuan *multi-stakeholder* ‘pemangku kepentingan jamak’ perlu didorong untuk memastikan bahwa negara dan platform media sosial bergerak ke arah yang sama dalam menangani konten daring berbahaya.
- Meningkatkan transparansi dalam moderasi konten
  - Praktik moderasi konten, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun platform media sosial, perlu dilakukan dengan lebih transparan guna menghindari penyalahgunaan peraturan yang dapat merugikan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Selain mengusulkan kelima rekomendasi tersebut, CfDS juga mengembangkan dan memperkenalkan laman web Anti Konten Negatif: <https://antikontennegatif.id>. Laman tersebut dikembangkan sebagai salah satu upaya menuju pemberdayaan masyarakat untuk berbagi pengalaman mereka tentang konten berbahaya, dan pada akhirnya berkontribusi pada dunia maya yang lebih aman untuk semua kalangan.

## **Penipuan Digital: Modus, Medium, dan Rekomendasi**

Dr. Novi Kurnia, M.Si., MA, Firyah Qurra'ain Abisono, S.I.P. M.A.

Centre for Digital Society

Revolusi digital telah membawa perubahan sangat mendasar di berbagai aspek kehidupan, baik dalam dampaknya yang positif maupun negatif. Selain menyediakan arena baru untuk berelasi dan berinteraksi bagi kohesi sosial, digitalisasi telah membuka kesempatan bagi sektor layanan publik serta ekonomi untuk bertransformasi. Namun tidak menutup kemungkinan, dampak negatif dari perkembangan digital juga perlu dimitigasi, seperti munculnya bentuk-bentuk kejahatan berupa penipuan yang terjadi di ranah digital. Penipuan digital adalah jenis kejahatan yang jumlah dan modusnya meningkat pesat seiring digitalisasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemetaan terhadap insiden, saluran, korban, kerugian, dan rekomendasi sangat penting untuk dilakukan.

Riset berjudul "**Penipuan Digital: Modus, Medium, dan Rekomendasi**" dilakukan untuk kepentingan pemetaan tersebut. Riset ini merupakan hasil kolaborasi antara CfDS Fisipol UGM, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) yang didukung oleh WhatsApp. Sebanyak 1700 responden dari 34 provinsi di Indonesia terlibat dalam survei nasional ini. Selain itu, 31 informan yang merupakan korban penipuan digital juga menjadi informan riset ini, baik sebelum penyusunan instrumen survei maupun setelah terselenggaranya survei. Riset Ini merupakan bentuk kolaborasi berkelanjutan dengan WhatsApp, setelah sebelumnya WhatsApp juga mendukung riset "WhatsApp Group and Digital Literacy among Indonesian Women" (2018-2019) dan "Pelatihan Literasi Digital untuk Perempuan Indonesia Melawan Hoaks Pilkada" (2020).

Temuan riset menunjukkan adanya kerentanan masyarakat terhadap penipuan digital, yaitu sebanyak 98,3% responden (1.671 orang) pernah menerima pesan penipuan digital, baik satu maupun lebih. Kemudian yang memprihatinkan, sebanyak 66,6% responden (1.132 orang) pernah menjadi korban penipuan digital, dengan 64,1% kasusnya terjadi di dalam medium komunikasi jaringan seluler (SMS/telepon). Dari seluruh korban penipuan tersebut, respons atau tindakan terbanyak yang mereka lakukan adalah menceritakan kepada keluarga atau teman (48,3%), tidak melakukan apa-apa (37,9%), menceritakan kepada warganet (5,3%), melaporkan kepada media sosial atau platform digital lainnya (5%), dan melaporkan kepada kepolisian (1,8%).

Untuk mencegah dan menangani penipuan digital, rekomendasi dari para responden adalah peningkatan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi (98%), kepastian hukum bagi penanganan penipuan digital (97,7%), publikasi kasus dan modus operandi penipuan digital terkini (97,4%), edukasi tentang keamanan digital (96,9%), ketersediaan laman dan aplikasi dari pihak berwenang untuk bisa mengecek validitas penjual (96,9%), dan kampanye publik agar warga berhati-hati dan tip cara menghindari penipuan (95,5%)

Monograf yang disusun dari riset ini memetakan berbagai jenis pesan, modus, medium, kerugian, respons, dan rekomendasi yang diusulkan korban dan target penipuan digital. Selain itu, temuan riset ini akan digunakan untuk mendiskusikan aksi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah selaku regulator, penyedia platform, maupun masyarakat

sebagai referensi penyusunan *policy brief* yang diharapkan menjadi awal aksi kolaborasi untuk mencegah dan menangani penipuan digital di Indonesia.

**Penurunan Pemahaman Siswa  
sebagai Dampak Pembelajaran Daring Era COVID-19 (Learning Loss)**

Anindya Dessi W, Annisa Paramita W., Arif Novianto, Cinintya Audori F., Dyah Ratih S., Kurnia Cahyaningrum E., Rini Wijayanti

*Institute of Government and Public Affairs*

Pembatasan sosial selama Pandemi Covid-19 telah menimbulkan tantangan baru pada dunia pendidikan, khususnya sekolah formal. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Nomor 03/KB/2019 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19, bahwa pembelajaran wajib dilakukan secara jarak jauh. Sebanyak 25,49 juta siswa SD, 10,13 juta siswa SMP, 7,78 juta siswa SMA, dan 4,9 juta siswa SMK pada Maret 2020 telah beralih pada metode pembelajaran daring hingga diputuskan untuk penerapan pembelajaran luring kembali mulai tahun 2022. Kami melakukan rapid appraisal di wilayah DIY pada bulan Maret-April 2021, meliputi: 3.344 siswa dari tingkat pendidikan SD, SMP/Sederajat, SMA/sederajat, dan SMK; 1.062 guru yang meliputi guru honorer, guru Aparatur Sipil Negara (ASN), dan guru swasta; 1.056 orang tua/ wali murid. Hasil penelitian menyatakan bahwa keterbatasan aksesibilitas siswa terhadap piranti digital menjadi faktor yang dominan penyebab terhambatnya kegiatan belajar mengajar secara daring, dibandingkan faktor lain terkait dengan kendala teknis atau kendala pendampingan. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang kami berikan: 1. Menjalin kerjasama dengan akademisi dalam bentuk program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa; 2. Reorientasi pelatihan siswa kejuruan; 3. Platform pembelajaran gratis; 4. Menyediakan perangkat digital seperti laptop, PC, tablet, dan akses internet yang memadai di sekolah.

## ***Tindak Kekerasan dan Konflik di Tanah Papua (Januari 2010 - Agustus 2022)***

Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A., Ibnu Nugroho, S.I.P., Arie Ruhianto, PhD.

Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama

Papua—baik Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat—merupakan wilayah Indonesia yang dianggap memiliki keterkaitan yang erat dengan kekerasan dan konflik. Sejak terintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1969, pelanggaran HAM dan kekerasan di Papua belum usai. Beberapa pihak menganggap aparat TNI/Polri sebagai dalang utama dari tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Namun, hasil riset Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) menunjukkan bahwa sejak 2010, pelaku kekerasan di Papua didominasi oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Data tindak kekerasan di Papua yang dihimpun GTP UGM sejak tahun 2010 hingga Agustus 2022 berasal dari berbagai media massa dan informan kunci. Metode triangulasi dilakukan dengan memvalidasi data kepada sumber-sumber kredibel di Papua. Riset ini mengidentifikasi pelaku, korban, motif, hingga wilayah terdampak. Selain itu, riset ini menyoroti pentingnya pemerintah untuk introspeksi terhadap pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah di Papua.

Sejak Januari 2010 hingga Agustus 2022, GTP UGM mencatat sedikitnya terdapat 2.165 korban, dimana 1.668 orang diantaranya mengalami luka-luka, sedangkan 497 orang lainnya meninggal dunia. Jumlah riil korban diprediksi jauh lebih besar daripada data yang tercatat. Hal tersebut dikarenakan tidak semua peristiwa bisa terekam dan diberitakan media massa. Selain itu, terdapat banyak korban meninggal dunia atau sakit parah di tempat-tempat pengungsian akibat konflik yang tidak kunjung usai. Pola kekerasan yang dilakukan pihak-pihak yang bertikai semakin brutal. Selain menggunakan senjata api dan tajam, tindak kekerasan dilakukan dengan pembakaran pesawat terbang, rumah warga, kios-kios dan sekolah; penganiayaan; penjarahan; pemerkosaan; hingga mutilasi.

Tidak bisa dipungkiri, eskalasi tindak kekerasan di Papua terus-menerus terjadi dan belum menemui jalan keluar. Masyarakat dibebberapa kabupaten, seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Nduga, Mimika, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang tergolong adalah pihak yang paling terdampak dari meningkatnya intensitas tindak kekerasan terutama dalam tiga tahun terakhir. Aktor utama dari serangkaian kasus tersebut melibatkan KKB dan aparat TNI/Polri. Korbannya semakin meluas bukan hanya anggota KKB dan aparat TNI/Polri, melainkan juga masyarakat sipil, termasuk tokoh agama dan adat, tenaga kesehatan, guru dan pelajar, pedagang, pekerja bangunan, tukang ojek, bahkan kepala kampung dan keluarganya.

Lebih jauh, wilayah terjadinya tindak kekerasan di tanah Papua semakin meluas dan merata. Pada 2022 (Januari-Agustus) telah terjadi 45 kasus kekerasan dengan kasus tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak (16 kasus) disusul Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Nduga (5 kasus) serta Kabupaten Pegunungan Bintang (4 kasus). Wilayah dengan tingkat kekerasan yang tergolong tinggi selama lebih dari satu dekade terakhir berada di Kabupaten Mimika (58 kasus), Kabupaten Intan Jaya (58 kasus), Kabupaten Puncak (53 kasus), Kabupaten Nduga (40 kasus), dan Kabupaten Puncak Jaya (38 kasus). Menariknya, sebagai wilayah dengan intensitas kekerasan tertinggi di Papua, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak menyandang ‘predikat’ tersebut hanya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Banyaknya korban yang berjatuhan semakin mempertebal catatan hitam tentang kondisi keamanan di Papua. Upaya membangun kedamaian di Papua menjadi hal mendesak untuk dilakukan, baik sebagai perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal maupun sebagai prasyarat untuk terwujudnya kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sebagai bukti bahwa negara benar-benar hadir ke hadapan rakyat.

**Politik Seni untuk Pendidikan Toleransi dan Pluralisme di Sekolah Menengah Atas:  
Studi Kasus Program CREATE – Creative Youth for Tolerance di Jawa Barat, Jawa Timur, dan  
Sulawesi Selatan**

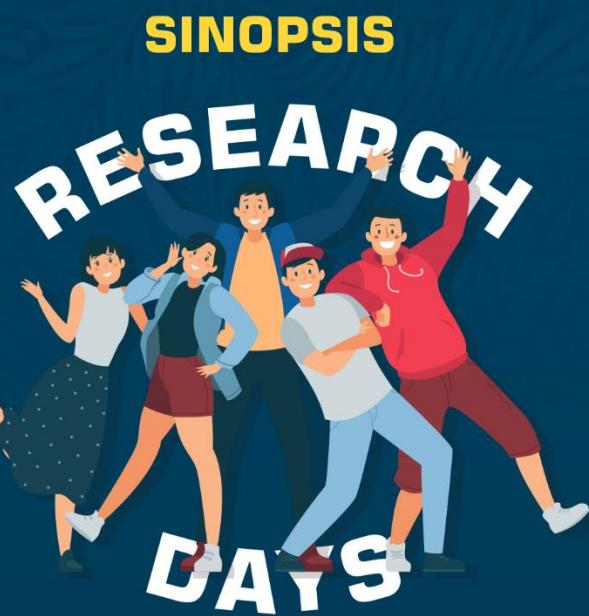
Evi Lina Sutrisno, Ph.D., Ulya Niami Efrina Jamson, M.A., Dr. RB Abdul Gaffar Karim, Desi Rahmawati, Ignasius Jaques Juru

Research Center for Politics and Government

*Creative Youth for Tolerance* (Generasi Muda Kreatif untuk Toleransi, selanjutnya disebut CREATE) merupakan program tiga tahunan yang dilaksanakan oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial yang bekerjasama dengan organisasi-organisasi lokal di tiga provinsi di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan). Program CREATE bertujuan untuk meningkatkan pluralisme dan toleransi di beberapa sekolah dengan menguatkan toleransi dan pluralisme di antara siswa dan meningkatkan peran orang tua dan komite sekolah untuk mendukung praktik-praktek toleransi. Program CREATE mengupayakan pendekatan seni yang inovatif dan jalan budaya sebagai pintu masuk untuk mempromosikan toleransi dan pluralisme di kalangan siswa di provinsi-provinsi di mana terjadi peningkatan jumlah kasus intoleransi, termasuk eksklusivisme agama, dan sejumlah besar peraturan daerah (perda) yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas.<sup>1</sup> Program ini menargetkan sekolah-sekolah di area perkotaan dan pedesaan tetapi memprioritaskan sekolah yang relatif berdekatan satu sama lain di tiga provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Yayasan Hivos menerapkan program CREATE yang memfasilitasi kolaborasi banyak aktor dan kerjasama yang menyasar pada toleransi agama, suku, gender dan disabilitas serta inklusivitas di Indonesia. CREATE merespons secara langsung masalah-masalah intoleransi di sekolah dengan menggunakan pendekatan inovatif. Pendekatan ini didukung oleh keterlibatan elemen-elemen kunci dalam komunitas pendidikan: orang tua, guru, komite sekolah, pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan akademisi. Jika sesuai, peluang-peluang untuk mengadakan kerjasama dengan sektor swasta juga perlu digali.

Hivos bekerjasama dengan PolGov, melaksanakan penelitian kualitatif memfokuskan diri pada pengumpulan data secara mendalam pada 7 (tujuh) sekolah yang telah menunjukkan kemajuan dan pembelajaran penting selama dua tahun pelaksanaan program. Pengumpulan data kualitatif dilaksanakan pada bulan Maret 2022, dan menyasar pada 4 (empat) Sekolah Menengah Atas Negeri dan 2 (dua) Madrasah Aliyah di Jawa Barat (Bandung dan Bogor), Jawa Timur (Surabaya dan Malang), dan Sulawesi Selatan (Makassar dan Gowa). Secara ringkas, studi kualitatif mengumpulkan data dari 10 pejabat pemerintah di tingkat nasional dan provinsi, 7 (tujuh) kepala/wakil kepala sekolah, 7 (tujuh) orang tua/wali, 57 siswa, dan 52 guru. Sebagai kelanjutan dari studi *baseline* sebelumnya (Rahmawati et al., 2021) dan studi *midline* kuantitatif (CREATE, 2021), penelitian ini menggunakan segitiga konflik ABC Galtung (Galtung, 1958) untuk memahami kemampuan individu dalam menangani konflik secara konstruktif. Akan tetapi, studi kualitatif ini melihat lebih dekat pada aspek “kontradiksi”, yang dapat dipahami sebagai konteks mendasar yang menciptakan konflik atau ketidaksesuaian tujuan, termasuk perubahan sosial budaya, ekonomi, atau politik, dan juga kelangkaan yang sering terjadi memicu persaingan atas sumber daya sosial, ekonomi, atau politik. Berdasarkan rekomendasi dalam studi baseline, studi ini menggunakan “tindakan toleransi dalam sebuah kontinum” (Rahmawati et al., 2021) dan juga konsep “toleransi sosial dan toleransi politik” (Bloom dan Bagno-Moldavsky, hal. 625 -626) untuk

memastikan setiap orang memiliki titik acuan yang sama dalam memahami toleransi. Toleransi sosial adalah kesediaan seseorang dan “kesiapan untuk hidup berdampingan secara sosial dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang paling tidak disukai atau kelompok yang merupakan ancaman potensial terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi atau budaya mayoritas” (Bloom dan Bagno-Moldavsky, 2015, hlm. 625- 626). Sementara toleransi politik didefinisikan sebagai “Penerimaan seseorang atas hak sipil dan politik orang lain terlepas dari seberapa berbeda pandangan mereka” (Bloom dan Bagno-Moldavsky, 2015, hlm. 62)



**COMMITTED TO SCIENCE  
FOR BETTER SOCIETY**

**UP3M**

Unit Publikasi, Penelitian,  
dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**Ruang BA 212, Gedung BA FISIPOL UGM  
Jl. Sosio Yustisia No. 2, Bulaksumur, Yogyakarta 55281**